LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK

2020

BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

DEPUTI BIDANG
METODOLOGI DAN
INFORMASI STATISTIK

2020

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi selama Tahun 2020 kepada Kepala Badan Badan Pusat Statistik. LAKIN ini disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan di Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Laporan ini juga memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, yakni melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi BPS dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2020 dan memberikan rekomendasi pada tahun 2021.

Jakarta, Februari 2021
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik,

Dr. Eng. Imam Machdi M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL ix

RINGKASAN EKSEKUTIF xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

1. 1 Latar Belakang 1

1. 2 Maksud dan Tujuan 2

1. 3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi 2

1. 4 Sumber Daya Manusia 3

1. 5 Potensi dan Permasalahan 4

1. 6 Sistematika Penyajian Laporan 7

BAB II PERENCANAAN_KINERJA 9

2. 1 Rencana Strategis 2020-2024 9

2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 10

BAB III AKUNTABILITAS_KINERJA 13

3. 1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2020 13

3.1.1. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) Tahun 2020 15

3.1.2. Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020 52

3.1.3. Capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2020 63

3. 2 Perkembangan Capaian Kinerja Deputi Bidang Bidang MIS Tahun 2020 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2019 85

3. 3 Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024 86

3. 4 Kegiatan Prioritas 2020 87

3. 5 Upaya Efisiensi 89

3.5.1. Upaya Efisiensi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020 89

3.5.2. Upaya Efisiensi Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020 91

3.5.3. Upaya Efisiensi Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2020 91

3. 6 Prestasi 91

3. 7 Realisasi Anggaran Tahun 2020 102

BAB IV PENUTUP 105
4.1. Tinjauan Umum 105
4.2. Tindak Lanjut 105
LAMPIRAN 111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 9
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2020 10
Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang MIS Tahun 2020 14
Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2020 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei 16
Tabel 5. Daftar Survei Bidang Sosial, Produksi, dan Distribusi Tahun 2020..... 19
Tabel 6. Jumlah Master Wikerstat yang Dimutakhirkan pada Tahun 2020 33
Tabel 7. Jumlah Master Wikerstat SLS yang Dimutakhirkan pada Tahun 2020 33
Tabel 8. Jenis Pembinaan/Konsultasi/Kerja Sama pada Direktorat PMSS 38
Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran 1 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020..... 52
Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran 2 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020..... 55
Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran 3 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020..... 58
Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran 4 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020..... 60
Tabel 13. Tingkat Pencapaian Tersedianya Platform Data Hub Yang Atraktif, Kolaboratif Dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia Tahun 2020 66
Tabel 14. Tingkat Pencapaian Peningkatan Kualitas Layanan TI Untuk Aspek Aksesibilitas, Kemudahan Dan Kecepatan Pelayanan Dengan Dukungan Tata Kelola TI Tahun 2020 71
Tabel 15. Tingkat Pencapaian Terlaksananya Pengelolaan Layanan TI yang Handal dengan Dukungan Sistem Terintegrasi dan Jaringan Komunikasi yang Handal Tahun 2020 77
Tabel 16. Tingkat Pencapaian Terwujudnya Keselarasan Strategi TI dan Bisnis dengan Digital EA Tahun 2020..... 78
Tabel 17. Tingkat Pencapaian Terwujudnya Tata Kelola TI Yang Terstandardisasi, Terintegrasi, Berkelanjutan, Dan Berorientasi Kepada Pengguna Tahun 2020..... 81
Tabel 18. Tingkat Pencapaian Terwujudnya Transformasi Digital Untuk Membangun BPS Yang Smart Dan Agile Tahun 2020..... 85
Tabel 19. Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Renstra 2020 - 2024 86
Tabel 20. Realisasi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun Anggaran 2020..... 103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komposisi SDM Deputi Bidang MIS Menurut Tingkat Pendidikan 3
Gambar 2. Perkembangan Capaian Kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2020 terhadap Realisasi Kinerja 2019 86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 57
Lampiran 2. Penetapan Kinerja Tahunan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2020 58
Lampiran 3. Capaian Kinerja Tahunan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2020 61
Lampiran 4. Jumlah Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menurut Unit Kerja dan Jenjang Pendidikan Tahun 2020 63

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

Visi Deputi Bidang MIS yaitu "Penyedia Metodologi dan Informasi Statistik berkualitas untuk Mendukung Indonesia Maju" untuk mendukung visi BPS "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju". Selanjutnya, penjabaran misi yang menerjemahkan visi tersebut di atas mencakup: 1). Mengembangkan metodologi dan sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas; dan 2). Membina K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik; 3). Meningkatkan layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional; dan 4). Membangun SDM yang kompeten untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

Pelaksanaan misi Deputi Bidang MIS bertujuan untuk : tersedianya metodologi dan sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas. meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk pelaksanaan kegiatan statistik, meningkatnya kualitas layanan statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).

Sasaran yang ingin dicapai dengan pelaksanaan misi di atas adalah:

a. Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas.
b. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan tata kelola TI, Sistem Terintegrasi dan Jaringan komunikasi yang andal.
c. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2020 Deputi Bidang MIS melaksanakan berbagai kegiatan yang mengacu pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 109.80%.

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan dalam DIPA Bagian Anggaran 54 dengan nilai sebesar Rp 12.777.391.000 realisasinya mencapai Rp 9.713.422.466 (76,02%). Pelaksanaan program Deputi Bidang MIS tersebut terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanakan kegiatan teknis dan administrasi.

Secara umum hambatan tersebut disebabkan oleh:

A. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

a. Tuntutan kualitas dan keragaman data dari pemerintah dan pemangku kepentingan kepada BPS menyebabkan peningkatan beban kerja Direktorat PMSS sangat tinggi, sehingga tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada, hal ini juga berdampak pada terbatasnya waktu untuk melakukan pengembangan terkait metodologi sensus dan survei.

b. Dukungan sarana dan prasarana IT (pc, laptop, server, penyimpanan) belum memadai untuk melakukan pengembangan metodologi sensus dan survey terutama untuk mengolah data geospasial dan citra beresolusi tinggi.

c. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM).

B. Direktorat Diseminasi Statistik

a. Koordinasi dan kolaborasi kerja yang kurang optimal dari semua pihak yang tersebar di beberapa direktorat yang berbeda dalam pengelolaan source code sistem metadata. Prioritas pekerjaan yang berbeda-beda menyebabkan penyelesaian pekerjaan kurang berjalan lancar dimana rencana kerja pembangunan sistem metadata tidak berjalan sesuai rancangan awal.

b. Tingkat kepatuhan K/L/OPD terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan dan hasil (metadata) kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS masih sangat rendah.

c. Adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menjadikan APBN yang menjadi sumber pendanaan kegiatan SSN mengalami refocusing untuk penanganan pandemi, akibatnya kegiatan yang sudah direncanakan mengalami penyesuaian prioritas pelaksanaan.

d. Masih kurangnya koordinasi, kolaborasi, dan komitmen dari semua pihak yang tersebar di beberapa direktorat berbeda (subject matter) dengan K/L/OPD dalam percepatan penyediaan data pada SIMDASI untuk keperluan rilis publikasi Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA).

e. Tidak adanya anggaran pelatihan desain perwajahan untuk BPS Kabupaten/Kota.

f. Masih minimnya koleksi aset desain (berupa gambar/foto, fonts, template presentasi, template Website, aset 3D, template video, audio, dan lainnya) serta

software yang legal yang dimiliki BPS untuk mendukung pembuatan desain publikasi.

g. PC untuk pembuatan desain perwajahan serta visual masih belum memadai.
h. Terbatas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknik penulisan dalam bahasa inggris (technical writing) dalam menyusun publikasi, baik di lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik secara khusus maupun di lingkungan BPS secara umum (subject matter penanggung jawab publikasi).
i. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik baik level pusat maupun daerah yang memiliki keterampilan dalam desaingrafis maupun videografis.
j. Terbatasnya pemahaman baik secara teori maupun praktisi dalam teknik marketing sektor publik.
k. Belum tersedianya kebijakan diseminasi yang lengkap dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
l. Terbatasnya kegiatan yang bersifat sosial akibat pandemi sehingga memberikan ruang terbatas untuk aktivitas promosi statistik yang bersifat offline.
m. Terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang proses penyiapan konten promosi digital.

C. Direktorat Sistem Informasi Statistik

a. Tata Kelola TI dilingkungan BPS dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perangkat keras yang terdapat di BPS belum optimal.
b. Tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM TI dalam hal database, perangkat lunak, perangkat keras, serta pengetahuan umum lainnya yang berkaitan dengan TI masih tidak merata.
c. Permintaan layanan TI berbagai kegiatan sensus dan survei yang tidak terkoordinir dengan baik menyebabkan penumpukan beban kerja di satu waktu sehingga dapat mengurangi kualitas layanan TI.
d. Kegiatan pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan banyak waktu dalam pembahasan dan persetujuan untuk Kerangka Acuan Kerja dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan semakin berkurang dan akhirnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai rencana.

Tindak lanjut yang dilakukan Deputi Bidang MIS untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu:

A. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, misalnya secara *online*, media elektronik (*internet*), forum diskusi atau pun perkumpulan statistisi, *knowledge sharing* antar-pegawai di dalam unit kerja, dll.

b. Mengoptimalkan pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, dan jumlah SDM,

c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait baik eksternal maupun internal BPS.

d. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia. Untuk keperluan pengolahan data tertentu, dilakukan pada server secara *on the fly*. Bersamaan dengan hal tersebut Direktorat PMSS mengusulkan pengadaan perangkat keras dengan spesifikasi yang tinggi.

B. Direktorat Diseminasi Statistik

a. Mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi melalui virtual meeting secara rutin untuk menggantikan pertemuan tatap muka.

b. Melakukan pembinaan statistik ke Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

c. Melakukan inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi untuk mendukung beberapa kegiatan.

d. Menyusun regulasi tentang petunjuk teknis metadata statistik sehingga sistem metadata yang dibangun, mengikuti standar metadata yang ada di regulasi tersebut.

e. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada terutama untuk meningkatkan kemampuan dalam mengemas publikasi menjadi output yang menarik seperti infografis maupun videografis.

f. Dilakukan pengadaan gambar dan elemen lain meliputi akses satu tahun berupa gambar dari Shutterstock; akses satu tahun berupa elemen graphics, fonts, templates dan stock video, music tracks dan sound effects, dan elemen lainnya dari Freepik dan Envato Elements; serta pembelian plugin dan paket templates dari Envato Market dan misterhorse.com.

g. Dilakukan peningkatkan kualitas video promosi BPS melalui pengadaan peralatan penyusunan video promosi statistik serta pengadaan laptop videografis.

h. Melakukan pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menyusun publikasi berbahasa inggris (technical writing) dengan virtual meeting.
i. Melakukan optimalisasi strategi promosi digital sebagai solusi promosi statistik di masa pembatasan aktivitas sosial.
j. Melakukan pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang marketing melalui kegiatan kursus/pelatihan.
k. Menyusun naskah kebijakan diseminasi yang komprehensif dan sesuai dengan isu terkini.
l. Merancang kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang proses penyiapan konten promosi digital.

C. Direktorat Sistem Informasi Statistik

a. Meningkatkan tata kelola dan tata laksana TI untuk mendukung kegiatan operasional statistik,
b. Untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia di bidang TIK, secara bertahap mengikuti pelatihan-pelatihan,
c. Dalam rangka untuk menyederhanakan permintaan dukungan layanan TI sehingga terkoordinir dengan baik, pada tahun 2020 kami telah membangun sistem manajemen layanan TI yaitu HaloSIS. Setiap permintaan dukungan diberikan sebuah nomor tiket yang dapat digunakan untuk melacak kemajuan dan tanggapan secara online, serta dapat mengevaluasi penanganan tiket layanan TI,
d. Kegiatan pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir terus diupayakan dengan melakukan beberapa kajian terkait teknologi baru untuk mendukung transformasi sistem informasi statistik dan manajemen,

Capaian kinerja Deputi Bidang MIS menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang MIS sudah sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi Deputi Bidang MIS.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada publik baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Kinerja BPS dalam melaksanakan UU No. 16 tahun 1997 diukur melalui pencapaian kinerja indikator-indikator sasaran yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja. Pada dasarnya Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) Tahun 2020 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang MIS sebagai penyelenggara negara. Laporan kinerja ini disusun dengan merujuk pada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Laporan ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja di lingkungan Deputi Bidang MIS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2020 tertuang hasil capaian kinerja selama tahun 2020. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Deputi Bidang MIS tahun 2020 juga merupakan perwujudan kewajiban Deputi Bidang MIS untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja tahun 2020 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Deputi Bidang MIS di tahun yang akan datang.

1. 2 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik selama tahun 2020.

1. 3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Tugas, fungsi, dan susunan organisasi Deputi Bidang MIS berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1. Tugas

   Sesuai Peraturan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas Deputi Bidang MIS mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

2. Fungsi

   Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang MIS menyelenggarakan fungsi:

   a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistic,
   b. Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik,
   c. Pelaksanaan pengembangan metodologi sensus dan survei, diseminasi statistik, dan sistem informasi statistik, dan
   d. Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

3. Susunan Organisasi

   Deputi Bidang MIS terdiri dari tiga unit kerja eselon II, yaitu Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS), Direktorat Diseminasi Statistik dan Direktorat Sistem

Informasi Statistik (SIS). Setiap Unit kerja eselon II masing-masing mempunyai empat unit kerja eselon III dan setiap unit kerja eselon III masing-masing mempunyai dua atau tiga unit kerja eselon IV. Bagan Organisasi Deputi Bidang MIS dapat dilihat pada Lampiran 1.

1. 4 Sumber Daya Manusia

Pada akhir tahun 2020, SDM Deputi Bidang MIS seluruhnya berjumlah 308 pegawai. Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Komposisi SDM terbesar dengan tingkat pendidikan D-IV/ S1, yaitu mencapai 56 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM Deputi Bidang MIS cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Komposisi SDM menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.

Gambar 1. Komposisi SDM Deputi Bidang MIS Menurut Tingkat Pendidikan

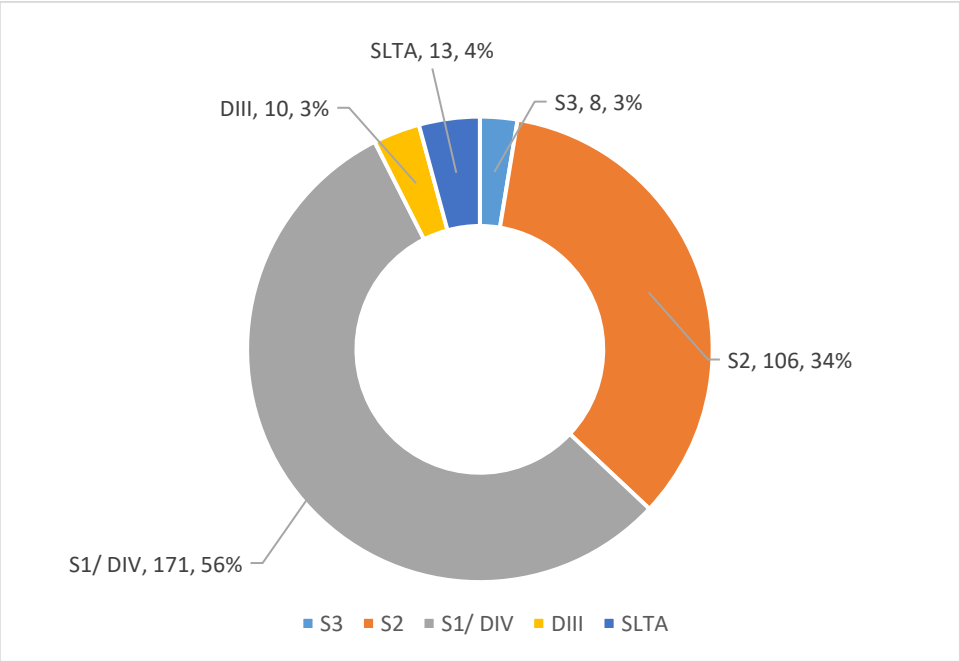

1. 5 Potensi dan Permasalahan

Dalam perjalanannya mengemban tugas sesuai amanat Perka BPS Nomor 7 Tahun 2008 dan mengacu uraian tugas yang tercantum dalam Perka BPS Nomor 1 Tahun 2009, Deputi Bidang MIS berupaya memenuhi kebutuhan *stakeholder* dalam rangka penyelenggaraan kegiatan statistic dasar dan sektoral oleh internal maupun eksternal BPS. Dukungan metodologi, pengolahan data, infrastruktur TI, dan diseminasi statistic yang optimal sangat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan statistic. Potensi yang dimiliki Deputi Bidang MIS untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan antara lain:

1. Peningkatan pelayanan dan koordinasi terkait metodologi sensus maupun survei.
2. Dengan ditetapkannya kebijakan Satu Data Indonesia dan tanggung jawab BPS sebagai instansi pembina statistik sectoral, Deputi Bidang MIS mulai menyiapkan standarisasi dalam bentuk petunjuk teknis yang baku terkait penyelenggaraan kegiatan statistik baik dalam hal konsep, definisi, kode referensi, desain, dan kerangka sampel survei sebagai rujukan bagi produsen data.
3. Berkembangnya teknologi informasi berbasis geospasial juga membuka potensi yang besar dalam pengembangan metodologi sensus dan survei. Penggunaan data pengindraan jarak jauh mulai dijajaki terutama untuk merancang survei bidang pertanian yang berbasis area.
4. Semakin baiknya tata kelola data administrasi yang dimiliki oleh Kementrian, Lembaga dan Instansi lainnya juga membuka potensi untuk mengembangkan metodologi terbaru untuk penyelenggaraan kegiatan statistik yang bersumber dari data administratif.
5. Peningkatkan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral dan Khusus
6. Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
7. Peningkatkan Kualitas Layanan Publikasi dan Kompilasi Statistik
8. Peningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Promosi Statistik
9. Pewujudkan Layanan Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik yang Prima
10. SDM yang cukup banyak di Direktorat SIS dapat dioptimalkan untuk menangani berbagai inisiatif kegiatan pengembangan system di lingkungan Direktorat SIS yang akan memperlancar penyelenggaraan kegiatan statistik.
11. BPS memiliki sarana dan prasarana TI yang cukup memadai untuk digunakan dalam pengembangan system dan aplikasi untuk mendukung visi dan misi BPS.

Dalam pelaksanaan program Deputi Bidang MIS terdapat beberapa hambatan yang mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi. Secara umum hambatan tersebut disebabkan oleh:

1. Tuntutan kualitas dan keragaman data dari pemerintah dan pemangku kepentingan kepada BPS menyebabkan peningkatan beban kerja Direktorat PMSS sangat tinggi, sehingga tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada, hal ini juga berdampak pada terbatasnya waktu untuk melakukan pengembangan terkait metodologi sensus dan survei.
2. Dukungan sarana dan prasarana IT (pc, laptop, server, penyimpanan) belum memadai untuk melakukan pengembangan metodologi sensus dan survey terutama untuk mengolah data geospasial dan citra beresolusi tinggi.
3. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM),
4. Koordinasi dan kolaborasi kerja yang kurang optimal dari semua pihak yang tersebar di beberapa direktorat yang berbeda dalam pengelolaan source code sistem metadata. Prioritas pekerjaan yang berbeda-beda menyebabkan penyelesaian pekerjaan kurang berjalan lancar dimana rencana kerja pembangunan sistem metadata tidak berjalan sesuai rancangan awal.
5. Tingkat kepatuhan K/L/OPD terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan dan hasil (metadata) kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS masih sangat rendah.
6. Adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menjadikan APBN yang menjadi sumber pendanaan kegiatan SSN mengalami refocusing untuk penanganan pandemi, akibatnya kegiatan yang sudah direncanakan mengalami penyesuaian prioritas pelaksanaan.
7. Masih kurangnya koordinasi, kolaborasi, dan komitmen dari semua pihak yang tersebar di beberapa direktorat berbeda (subject matter) dengan K/L/OPD dalam percepatan penyediaan data pada SIMDASI untuk keperluan rilis publikasi Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA).
8. Tidak adanya anggaran pelatihan desain perwajahan untuk BPS Kabupaten/Kota.
9. Masih minimnya koleksi aset desain (berupa gambar/foto, fonts, template presentasi, template Website, aset 3D, template video, audio, dan lainnya) serta software yang legal yang dimiliki BPS untuk mendukung pembuatan desain publikasi.
10. PC untuk pembuatan desain perwajahan serta visual masih belum memadai.
11. Terbatas sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknik penulisan dalam bahasa Inggris (technical writing) dalam menyusun publikasi, baik di lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik secara khusus maupun di lingkungan BPS secara umum (subject matter penanggung jawab publikasi).

12. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Direktorat Diseminasi Statistik baik level pusat maupun daerah yang memiliki keterampilan dalam desaingrafis maupun videografis;
13. Terbatasnya pemahaman baik secara teori maupun praktisi dalam teknik marketing sektor publik;
14. Belum tersedianya data karakteristik pengguna data BPS sehingga analisis paradata pengguna layanan tidak dapat dilakukan secara lengkap;
15. Belum tersedianya kebijakan diseminasi yang lengkap dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
16. Terbatasnya kegiatan yang bersifat sosial akibat pandemi sehingga memberikan ruang terbatas untuk aktivitas promosi statistik yang bersifat offline.
17. Terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana penunjang proses penyiapan konten promosi digital.
18. Pandemi Covid-19 merubah sistem kerja dengan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) secara bergantian, memerlukan dukungan perangkat teknologi informasi seperti laptop dan jaringan internet untuk WFH yang belum merata di setiap pegawai, sehingga terjadi keterlabatan dalam penyelesaian pekerjaan.
19. Terbatasnya layanan data dan informasi statistik di masa pandemi, khususnya untuk layanan kunjungan langsung.
20. Terbatasnya laptop untuk layananan dan informasi secara online di masa pandemi.
21. Pandemi yang terjadi sejak Maret 2020 menjadikan terbatasnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak ke-tiga yaitu konsultan pembangunan Website Sensus Penduduk 2020.
22. Tata Kelola TI dilingkungan BPS dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan perangkat keras yang terdapat di BPS belum optimal.
23. Tingkat pengetahuan dan kemampuan SDM TI dalam hal database, perangkat lunak, perangkat keras, serta pengetahuan umum lainnya yang berkaitan dengan TI masih tidak merata.
24. Permintaan layanan TI berbagai kegiatan sensus dan survei yang tidak terkoordinir dengan baik menyebabkan penumpukan beban kerja di satu waktu sehingga dapat mengurangi kualitas layanan TI.
25. Kegiatan pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan banyak waktu dalam pembahasan dan persetujuan untuk Kerangka Acuan Kerja dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan semakin berkurang dan akhirnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai rencana.

1. 6 Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2020 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia; potensi dan permasalahan yang dihadapi Deputi Bidang MIS; serta sistematika penyajian laporan.

BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang MIS Tahun 2020.

BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi analisis pencapaian kinerja tahun 2020; perkembangan capaian kinerja tahun 2020 terhadap realisasi kinerja tahun 2019; capaian kinerja tahun 2020 terhadap target renstra 2020-2020; kegiatan prioritas; upaya efisiensi; dan realisasi anggaran tahun 2020.

BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2. 1 Rencana Strategis 2020-2024

Sebagai dasar menyusun perencanaan kinerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan di BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Deputi Bidang MIS mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 yang sudah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2020-2024.

Untuk mencapai Visi Misi Deputi Bidang MIS telah menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari masing-masing tujuan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024

Tujuan		Sasaran Strategis	
(1)		(2)	
1.	Tersedianya Metodologi dan Sistem yang handal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas	1.1	Tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna
		1.2.	Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal dan transformasi digital untuk membangun Smart BPS
2.	Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik	2.1.	Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
3.	Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)	3.1	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

Masing-masing tujuan dan sasaran strategis pada Tabel 1 di atas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya.

2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Selama periode tahun 2020 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Deputi Bidang MIS yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Pada subbab ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang MIS. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur indikator kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2020

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang handal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualita 1.1. Tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna	Persentase koordinasi penyelenggaran kegiatan statitsik terkait metodologi yang direalisasikan (%)	Persen	100
1.2. Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal dan transformasi digital untuk membangun Smart BPS	Indeks Kepuasan Layanan TI	Poin	75
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik	Jumlah Sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	Instansi	14
2.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I	Aktivitas	3
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)			

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	80

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3. 1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2020

Capaian kinerja Deputi Bidang MIS tahun 2020 didasarkan pada tujuan dan sasaran strategis yang diukur dari indikator utama Deputi Bidang MIS. Hal tersebut dirangkum dan dijabarkan dari penetapan kinerja seluruh Direktorat yang berada di bawahnya. Hasil penjabaran antara lain:

1. Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas,
2. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran,
3. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data,
4. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas,
5. Terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei (baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik,
6. Meningkatkan peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN),
7. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN,
8. Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dalam penyelenggaraan SSN,
9. Tersedianya platform data hub yang atraktif, kolaboratif, dan terpercaya untuk mewujudkan SDI [Stakeholder Satisfaction]
10. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal [Customer Perspective]
11. Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka transformasi digital[Internal Process]

Dari capaian kinerja tersebut ditetapkan tiga tujuan dari sasaran strategis, yaitu:

1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang handal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas, merupakan sasaran strategis dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik, yang merupakan sasaran strategis dari Direktorat Diseminasi Statistik (DDS).

3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN), yang merupakan sasaran strategis dari Direktorat Sistem Informasi Statistik (SIS).

Selama periode tahun 2020, Deputi Bidang MIS telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi terkait pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja ditandai dengan realisasi rata-rata hasil pencapaian kinerja sebesar 109.8 %. Rincian capaian kinerja Deputi MIS dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang MIS Tahun 2020

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang handal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas					
1.1. Tersedianya dukungan Metodologi Sensus dan survei yang tepat guna	Persentase koordinasi penyelenggaran kegiatan statitsik terkait metodologi yang direalisasikan (%)	Persen	100	134,69	131,24
1.2. Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal dan Transformasi Digital untuk membangun Smart BPS	Indeks Kepuasan Layanan TI	Poin	75	75	100
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik					
2.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah Sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	Instansi	14	10	71,43
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)					
3.1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I	Aktivitas	3	4	133,33

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	80	90,41	113,01

Selanjutnya dijelaskan capaian kinerja dari masing-masing Direktorat sesuai Indikator sasaran yang ditetapkan.

3.1.1. Capaian Kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) Tahun 2020

Direktorat PMSS memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tercapainya kinerja sasaran strategis 1.1 Tersedianya dukungan Metodologi Sensus dan survei yang tepat guna. Indikator kinerja untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut adalah persentase koordinasi penyelenggaran kegiatan statistik terkait metodologi yang direalisasikan.

Capaian kinerja 2020 merupakan pencapaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian tersebut diukur melalui indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2020. Capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target Perjanjian Kinerja 2020 yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Persentase koordinasi penyelenggaran kegiatan statistik terkait metodologi yang direalisasikan yang merupakan kinerja Direktorat PMSS sebesar 131,24% pada tahun 2020 lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator ini diukur melaui rata-rata tingkat pencapaian 5 (lima) indikator kinerja utama Direktorat PMSS yang dapat dilihat pada Tabel 4. Secara umum, kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS menunjukkan keberhasilan karena semua sasaran strategis Direktorat PMSS dapat tercapai, bahkan pada beberapa sasaran strategis pencapaiannya melebihi target yang ditetapkan. Hal ini ditandai dengan tingkat capaian untuk semua sasaran strategis yang mencapai 100% atau lebih.

Tingkat capaian tertinggi adalah pada sasaran strategis terwujudnya pembinaan dan/atau kerjasama dalam bidang metodologi sensus dan survei dengan tingkat capaian sebesar 210,67%. Dari 75 jumlah pembinaan/kerjasama yang ditargetkan pada tahun 2020, realisasinya sebanyak 158

kegiatan. Selain itu, pencapaian indikator kinerja jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran juga melampaui target yaitu sebanyak 59 dokumen dari 47 dokumen yang ditargetkan pada awal tahun 2020. Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data sebanyak 6 (enam) publikasi/laporan dari target sebanyak 5 (lima) laporan.

Dengan demikian, selama kurun waktu satu tahun, sasaran strategis telah berhasil dilaksanakan dengan pencapaian yang baik. Meskipun demikian, di setiap sasaran masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, diperlukan strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi. Berikut ini diuraikan permasalahan yang ditemui dan strategi untuk mengatasi masalah pada setiap indikator.

Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2020 Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas					
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Persen	100	100	100 %
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Dokumen	47	59	125,53 %
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikas/ Laporan	5	6	120,00%
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)	Persen	100	100	100 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data					
Terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei (baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik)	Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Kegiatan	75	210	210,67%

Sasaran 1. Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas

- **Indikator Kinerja: Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)**

Pencapaian Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam capaian indikator jumlah dokumen desain sampling sensus dan survei yang mutakhir tidak terlepas dari indikator lain yang saling terkait. Dalam periode 2020, Direktorat PMSS telah menghasilkan 47 dokumen desain sampling sensus dan survei sesuai dengan target. Perencanaan target sebanyak 47 dokumen didasarkan pada infomasi awal dari unit kerja yang menangani program kegiatan BPS. Dokumen desain sensus dan survei merupakan naskah desain survei yang disiapkan untuk masing-masing survei bidang statistik sosial, bidang statistik produksi, serta bidang statistik distribusi dan jasa. Isi dalam dokumen desain ini mencakup antara lain jumlah sampel, metode dan prosedur pengambilan sampel, prosedur penghitungan penimbang (*sampling weight*), prosedur penghitungan kesalahan sampling (*sampling error*), dan prosedur pengumpulan data.

Namun dalam perjalanannya, pada pertengahan tahun ada tambahan permintaan rancangan survei yang berasal dari lembaga lain. Kegiatan ini dibiayai dengan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebagai Pembina statistik sektoral yang menangani bidang metodologi sensus dan survei, tentu hal ini menjadi kewajiban Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.

Permasalahan yang terjadi adalah:

1. Adanya adendum/perubahan ruang lingkup kerja sama tetapi tidak dilakukan revisi anggaran sehingga penggunaan anggaran tidak dapat dioptimalkan karena sebagian anggaran harus dikembalikan ke negara.
2. Kurang optimalnya penyerapan anggaran yang diakibatkan adanya peraturan tentang batas maksimum penerimaan honor kelompok kerja (pokja) dan jumlah hari kerja yang digunakan untuk kegiatan berbayar (yang dapat di-SPJ-kan).
3. Perjanjian Kerjasama yang disiapkan pada akhir tahun mengakibatkan penyelesaian pekerjaan memerlukan waktu lebih di luar jam kantor karena waktu dan sumber daya tidak sesuai dengan beban dan jumlah hari kerja yang diperlukan.
4. Terbatasnya sarana (laptop, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia), dan waktu yang diperlukan untuk pengembangan desain survei.
5. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja.
6. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral, serta kurangnya kesadaran unit kerja terkait lainnya dalam mendukung kelancaran pembinaan sesuai peraturan yang berlaku.

Strategi untuk mengatasi masalah:

1. Adanya keterbatasan sarana memaksa pegawai menggunakan laptop pribadi untuk pengayaan di bidang desain sensus dan survei.
2. Pengayaan dan peningkatan kapasitas SDM dilakukan secara *learning by doing* dan juga di luar jam kerja.
3. Pengaturan pembagian tugas kepada SDM disesuaikan dengan beban dan kemampuannya SDM, serta tenggat waktu yang ditentukan.
4. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk meningkatkan pemahaman mekanisme pemintaan layanan di bidang metodologi survei bagi penyelenggara kegiatan statistik (termasuk bagi *subject matter* di BPS).

Sasaran 2. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran

- **Indikator Kinerja: Jumlah dokumen pengembangan kerangka sampel survei**

Tahun 2020, penyusunan dokumen kerangka sampel survei yang mutakhir diperoleh sebanyak 59 dokumen atau terealisasi menjadi 125,53 persen dibandingkan target yang direncanakan sebanyak 47 dokumen. Penyusunan dokumen tersebut meliputi penyusunan kerangka sampel survei bidang statistik Sosial, bidang statistik Produksi, dan bidang statistik Distribusi dan Jasa. Daftar dokumen Kerangka Sampel Survei dapat dilihat pada Tabel 5.

Kegiatan penyusunan kerangka sampel sudah dilakukan tepat waktu meskipun ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Terjadi perubahan proses bisnis pada pendataan lapangan akibat pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada:
   - dilakukannya penyusunan ulang kerangka sampel dan penarikan sampel beberapa survei,
   - pembatalan atau penundaan pelaksanaan lapangan survei tahun 2020 meskipun seluruh dokumen persiapan survei telah selesai dibuat.
2. Infrastruktur TI belum memadai untuk mengelola survei berbasis geospasial.
3. Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan.
4. Penarikan sampel tahap kedua yaitu pemilihan sampel rumah tangga tidak dapat difasilitasi menggunakan aplikasi CAPI.

Tabel 5. Daftar Survei Bidang Sosial, Produksi, dan Distribusi Tahun 2020

Sosial	Produksi	Distribusi
(1)	(2)	(3)
1. Survei Angkatan Kerja Nasional Panel 2020 **2. Survei Sosial Ekonomi Nasional & SSGI** **3. Survei Konsumsi Makanan Indonesia** **4. Survei Natrium Indonesia** **5. Survei Perilaku Anti Korupsi** **6. Pendataan Podes 2020** **7. Pendataan Keluarga 2020** **8. Survei Kepuasan Masyarakat BPOM** **9. Global Adult Tobacco Survei 2020** **10. Sampel PES SP2020** **11. Survei Angkatan Kerja Nasional Panel + Komplemen** **12. Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul** **13. Sensus Penduduk - pembentukan subsls** **14. Survei Konsumsi Air Minum** **15. Survei Status Gizi Balita Indonesia**	1. Survei Ubinan Palawija 2. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Maret-April 2020 3. SUB-KSA Covid SR2 2020 4. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Mei-Juni 2020 5. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Juli-Agustus 2020 6. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan September-Oktober 2020 7. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan November-Desember 2020 8. Survei Ubinan Padi Berbasis KSA (SUB-KSA) Bulan Januari-Februari 2021 9. Survei Hortikulruta Potensi (SHOPI2020) 10. Survei Komoditas Strategis Perkebunan (KOMSTRAT2020) 11. Survei IMK Tahunan	1. Survei Pola distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas (Poldis) 2. Survei Perdagangan Antar Wilayah 3. Survei Perdagangan 4. Uji Coba PDN Terintegrasi 5. Udating Direktori 47 6. Updating Pasar 2020 7. Survei Triwulan Kegiatan Usaha 2020 8. Survei E-Commerce 9. Business Character Survei 10. Survei Profil Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 11. Survei Wisatawan Nusantara 12. Survei Restoran (UMK) 13. Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga 14. Survei Tarif Sewa/Kontrak Rumah, Pembantu Rumah Tangga dan Baby Sitter 15. Survei Triwulan Kegiatan Usaha 2020

Sosial	Produksi	Distribusi
(1)	(2)	(3)
16. Updating Wilkerstat- SLS Rakorcam **17. Updating Wilkerstat – SLS Lapangan SP September** **18. MFDonline Semester 1** **19. MFDOnline Semester 2** **20. Pembentukan BS2020** **21. Assesment Dampak Cofid-19 terhadap rumah tangga di Indonesia.** **22. Survei Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 terhadap Perempuan (BAPPENAS-MAMPU)** **23. Survei Sero Covid19 Bali**	12. Survei IMK Triwulanan 13. Survei Konstruksi Tahunan dan Triwulanan (SKTH dan SKTR) 14. Survei Konstruksi Perorangan (SKP) 15. Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) 16. Uji Coba Pembangunan Frame Jagung 17. Survei KSA secara Mandiri oleh BPS 18. Survei Rumput Laut 19. Pembangunan FRS dengan konsultan 20. Pembangunan FRS Mandiri	16. Survei Pelaku Usaha Dampak Covid19

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Melakukan penyesuaian pada desain metodologi survei dan mekanisme identifikasi daftar sampel agar survei pada masa pandemi dapat berjalan lebih optimal. Penyesuaian yang dilakukan antara lain:
   - melakukan identifikasi awal untuk mengetahui kondisi zona pandemi di wilayah sampel
   - melakukan perubahan prosedur updating rumah tangga dengan menyediakan beberapa alternatif metode seperti *door to door* dan *snowball* sesuai zona pandemi. Untuk wilayah zona merah, metode snowball dilakukan dengan identifikasi rumah tangga melalui nara sumber.
2. Berkoordinasi dengan Direktorat SIS melalui aplikasi halosis untuk melaporkan kendala terkait infrastruktur dan membangun aplikasi berbasis web untuk mengelola kerangka sampel berbasis geospasial.
3. Memberdayakan SDM yang ada dengan menambah jam kerja.
4. Melakukan kolaborasi dengan Direktorat SIS untuk melakukan *Joint Developmet* membangun sistem penarikan sampel secara otomatis di dashboard web monitoring sehingga penarikan sampel bisa dilakukan real time.

Sasaran 3. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data

- **Indikator Kinerja: Jumlah publikasi standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data**

Pada tahun 2020 Subdirektorat Sandardisasi dan klasifikasi statistik, Direktorat PMSS telah mampu menghasilkan 6 output laporan/aktivitas/Perban/Perka meliputi 3 (tiga) buah peraturan

Badan Pusat Statistik/ peraturan Kepala Badan Pusat Statistik serta 3 (tiga) buah laporan (Laporan Penterjemahan COICOP, Laporan *Statistical Business Register*, Laporan Konsultasi Klasifikasi) , sehingga capaian kinerja melebihi target semula menjadi 120%. Adapun rincian capaian output tersebut adalah :

1. **Laporan Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan Di Indonesia Tahun 2020 (Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Desa Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia Tahun 2020)**

   Dalam rangka kegiatan Sensus Penduduk (SP) 2020 dan updating atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2010. Untuk memastikan konsistensi, updating dan validitas data wilayah administrasi terkecil sesuai dengan kondisi terkini, maka diperlukan updating terhadap metode penghitungan klasifikasi desa perkotaan yang digunakan pada tahun 2010 sekaligus melakukan update terhadap status klasifikasi desa perkotaan perdesaan berdasarkan data tahun 2020 . Sehingga pada tahun 2020 metode penghitungan klasifikasi desa perkotaan perdesaan mengalami sedikit perubahan yaitu tidak dimasukkan lagi variabel bioskop, perubahan kriteria pada persentase keluarga pengguna telepon kabel dan keluarga pengguna listrik, serta berubahnya batas titik potong skor total dalam menentukan pembeda status desa perkotaan dan desa perdesaan.

   Selama 2020, kegiatan klasifikasi desa perkotaan perdesaan dilakukan dengan beberapa tahapan. Sebagai tahap awal adalah menggunakan data dasar potensi desa (PODES) 2019 update, untuk luas wilayah desa menggunakan data hasil pemetaan 2019, dan untuk jumlah penduduk menggunakan data jumlah penduduk kabupaten/kota hasil proyeksi penduduk per September 2019, dimana untuk mendapatkan hasil jumlah penduduk per desa dilakukan dengan menggunakan metode proporsi penduduk dari data penduduk hasil SP 2010 sehingga jumlah secara total penduduk kabupaten/kota sama dengan jumlah hasil proyeksi penduduk September 2019.

   Tahap selanjutnya setelah dilakukan penghitungan dengan metode penghitungan klasifikasi desa perkotaan perdesaan yang terbaru, dengan tetap mempertahankan hasil verifikasi dan masukan dari daerah yang dilakukan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2019 sebelumnya; didapatkan hasil jumlah desa perkotaan pada tahapan ini adalah sebanyak 35.55 % desa berstatus desa perkotaan dan 64.45 % bestatus desa perdesaan. Terjadi peningkatan sebanyak 15.08 % desa perkotaan bila dibandingkan dengan kondisi status desa perkotaan pada tahun 2010 yang hanya sebanyak 20.47 % desa perkotaan.

Dari hasil yang didapat tersebut selanjutnya dilakukan konfirmasi pengecekan terhadap dampak penggunaan pada data kemiskinan, membandingkan dengan hasil jumlah penduduk perkotaan dan perdesaan yang dihitung berdasarkan proyeksi penduduk yang dilakukan demografi dan kependudukan serta melakukan pengecekan terhadap korelasi Indeks Kesulitan Geografis (IKG) 2019. Dari konfirmasi dan pengecekan tersebut maka dilakukan sedikit perubahan dalam hal sumber penggunaan jumlah penduduk untuk penghitungan klasifikasi desa perkotaan perdesaan 2020 yaitu untuk menggunakan jumlah penduduk sementara hasil SP2020.

Berdasarkan penghitungan ulang dengan jumlah penduduk bersumber dari data sementara hasil SP2020 didapatkan bahwa status desa perkotaan 35.31 % dan status desa perdesaan 66.70 %, dengan peningkatan paling besar terjadi pada provinsi-provinsi yang berada di pulau jawa yaitu terjadi peningkatan dari 36.66% status desa perkotaan pada 2010 menjadi 65.15% status desa perkotaan pada tahun 2020. Hasil status klasifikasi desa perkotaan dan desa perkotaan serta perubahan metode skoringnya tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Desa Perkotaan Dan Perdesaan Di Indonesia Tahun 2020.

2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dan Master File Standar Data Statistik Tahun 2020

Pada tahun 2019 terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; yaitu kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Dalam Peraturan Presiden tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik mempunyai tugas sebagai pembina data statistik yang salah satunya adalah menetapkan Standar Data yang berlaku lintas instansi pusat dan/atau Instansi Daerah. Salah satu tugas yang diberikan pada fungsi pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik adalah membuat petunjuk teknis mengenai standar data statistik dan penetapan standar data statistik versi awal yaitu master file standar data statistik tahun 2020.

Dalam rangka menyusun petunjuk teknis standar data statistik dan master file standar data statistik versi awal dilakukan beberapa hal yaitu:

a. Uji coba terhadap beberapa Instansi Pusat yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Instrumen yang diujicobakan selain konten

dari standar data stastistik itu sendiri (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan) juga ujicoba alur usulan baru dan pemutakhiran dari standar data statistik, serta meminta masukan dari KL terhadap petunjuk teknis standar data statistik yang disusun.

b. Terkait penyusunan master file data stastisik versi awal dilakukan inventarisasi standar data yang berasal indikator-indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Edisi 1/Versi 1 dan Indikator Sensus Penduduk.

c. Melakukan inventarisasi masukan terkait standar data pada poin b pada beberapa subjek meter utamanya dari deputi bidang sosial.

d. Melakukan inventarisasi masukan terhadap penyusunan dan tata kelola pada petunjuk teknis teknis standar data kepada pimpinan Kepala BPS Provinsi Seluruh Indonesia sekaligus melakukan sosialisasi Satu Data Indonesia.

Secara umum petunjuk teknis standar data statistik memuat tata kelola dan alur pengajuan standar data baru, pengajuan standar data pemutakhiran, peran produsen data dan wali data baik di tingkat pusat maupun daerah, peran dan kewajiban pembina data statistik di pusat maupun daerah, juga alur penetapan standar data statistik. Petunjuk teknis tersebut tertuang pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik. Sedangkan penyusunan master file standar data statistik telah disusun sebanyak 2243 standar data versi awal yang sebagian besar bersumber dari Indikator SDGs Edisi 1 dan Indikator Sensus Penduduk.

3. Publikasi Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) 2020 (Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan salah satu klasifikasi baku yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk aktivitas ekonomi. Pada awalnya KBLI dirancang untuk keperluan analisis ekonomi, pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dengan semakin strategisnya peranan dan penggunaan KBLI, klasifikasi ini juga digunakan untuk penentuan bidang usaha yang tercantum pada Online Single Submission (OSS) yaitu sistem yang digunakan untuk mempermudah perizinan usaha secara daring. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang dijadikan dasar penggunaan KBLI 2020 dalam bentuk Peraturan BPS. Dengan adanya Peraturan BPS tersebut maka pengklasifikasian aktivitas ekonomi menurut kelompok lapangan usaha yang ada di Indonesia diwajibkan merujuk pada kode KBLI 2020.

KBLI 2020 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2015 Peraturan Kepala BPS Nomor 19 Tahun 2017 (Perka 2017), sehingga KBLI 2020 masih tetap mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 4 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2008 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan

5 digit, KBLI 2020 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. KBLI 2020 diterbitkan dalam bentuk Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 2 tentang KBLI Tahun 2020, secara bertahap KBLI 2015, KBLI 2009 dan KBLI versi sebelumnya, harus ditinggalkan dan tidak berlaku lagi. KBLI 2020 juga disusun untuk menunjang perubahan bidang usaha serta perizinan.

Proses penyusunan KBLI 2020 dimulai sejak diadakannya sosialisasi KBLI 2015 pada tanggal 2 Mei 2019. Sosialisasi tersebut dihadiri K/L dengan agenda selanjutnya adalah penyampaian usulan perbaikan oleh K/L kepada BPS. Durasi penyampaian usulan perbaikan tersebut dibuka cukup panjang, yakni sampai tgl 30 Juni 2020. Kemudian dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam bentuk rapat pembahasan KBLI yang diadakan berdasarkan kategori. Rapat pembahasan tersebut dimulai sejak Bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 dengan melibatkan 24 K/L yang berperan aktif menyampaikan usulan perbaikan kode KBLI, dengan total usulan sebanyak 1.870 kode.

Pada perencanaan awal, pembahasan akan dilakukan melalui diskusi secara tatap muka langsung. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, maka perlu dibuat penyesuaian sehingga diputuskan untuk mengadakan diskusi secara daring. Dari total diskusi yang dilakukan sebanyak 44 pertemuan, 35 pertemuannya dilakukan secara daring, sedangkan sisanya adalah pertemuan secara tatap muka yang dilakukan sebelum adanya pandemi. Penerbitan KBLI 2020 ditandai dengan launching Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 dan aplikasi Sibaku secara daring melalui zoom dan youtube pada rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional.

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), adalah salah satu dari beberapa klasifikasi yang diterbitkan oleh BPS yang dalam perkembangannya juga harus dimutakhirkan. Dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, maka kebijakan dan kegiatan yang mengacu pada KBLI 2015 dapat mengganti acuannya pada KBLI 2020. Namun dalam pergantian penggunaan KBLI 2015 dengan KBLI 2020, tidak cukup hanya dengan mengandalkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, karena keterbatasan cakupan yang dituangkan dalam peraturan tersebut. Sehingga publikasi ini disusun sebagai panduan yang melengkapi peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 sehingga lebih mudah dalam memahami dan mengimplementasikan KBLI 2020.

Penyusunan Publikasi KBLI 2020 merupakan penyempurnaan Publikasi KBLI 2015, sehingga terjadinya perubahan dan pergeseran struktur dan judul nomenklatur KBLI 2020 tidak mengubah tatacara dan makna klasifikasi. Klasifikasi KBLI 2020 terdiri dari struktur

pengklasifikasian aktivitas ekonomi yang konsisten dan saling berhubungan, didasarkan pada konsep, definisi, prinsip, dan tatacara pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Struktur klasifikasi menunjukkan format standar untuk mengelola informasi rinci tentang keadaan ekonomi, sesuai prinsip-prinsip dan persepsi ekonomi.

Secara umum, baik KBLI 2020 dan KBLI 2015 masih mengacu pada rujukan yang sama yaitu ISIC Rev. 4 yang terdiri dari 21 kategori. Perubahan struktur berupa pergeseran atau pengelompokkan suatu kegiatan dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya, dan penambahan klasifikasi baru yang disebabkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi, memungkinkan untuk terbentuknya kelompok yang berdiri sendiri atau digabungkan dengan kategori lain yang lebih sesuai. Di dalam publikasi ini lah akan dituangkan informasi-informasi terkait:

- Prinsip Dasar KBLI, yaitu sifat dan tujuan klasifikasi, Cakupan Klasifikasi, Prinsip dalam pengklasifikasian, struktur dan sistem pengkodean.
- Penerapan KBLI, yaitu terkait aktivitas utama, aktivitas sekunder, aktivitas penunjang, definisi aktivitas dalam KBLI, penjelasan terkait unit statistik, serta penetapan KBLI bagi unit statistk.
- Perubahan KBLI, yaitu Perubahan ISIC Rev. 4 menjadi KBLI 2020, Perubahan KBLI 2015 Perka No. 19 tahun 2017 menjadi KBLI 2020 Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020.

Dengan adanya publikasi KBLI 2020 ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan dan mengimplementasikan KBLI 2020. Baik dalam penggunaanya untuk kegiatan statistik maupun dalam kebijakan selain kegiatan statistik.

4. Laporan Penerjemahan COICOP 2018

Klasifikasi baku pengeluaran konsumsi rumah tangga menurut tujuan *(the Classification of Individual Consumption According to Purpose*/COICOP) adalah referensi klasifikasi pengeluaran rumah tangga internasional. Tujuan dari COICOP adalah untuk menyediakan kerangka kerja kategori homogen barang dan jasa, yang dianggap sebagai fungsi atau tujuan pengeluaran konsumsi rumah tangga. COICOP merupakan bagian kesatuan dari Sistem Neraca Nasional (SNA), tetapi juga digunakan di beberapa area statistik lainnya, seperti statistik pengeluaran rumah tangga berdasarkan survei anggaran rumah tangga dan analisis standar hidup; indeks harga konsumen; perbandingan internasional dari produk domestik bruto (PDB) dan komponen pengeluarannya melalui paritas daya beli; dan statistik yang berkaitan dengan budaya, olahraga, makanan, kesehatan, dan pariwisata.

COICOP 2018 mengakomodir kebutuhan pengguna agar lebih detail, dan membahas beberapa isu lain yang diperlukan dalam revisi klasifikasi. COICOP 2018 mencerminkan perubahan signifikan dalam barang dan jasa, menguatkan hubungan COICOP dengan klasifikasi

lain, dan menangani kebutuhan statistik dan kebijakan yang muncul dari beberapa organisasi internasional.

Pada bulan Maret 2018, Sidang Komisi Statistik PBB ke-49 mengesahkan COICOP 2018 sebagai standar yang diterima secara internasional. Pada Tahun 2020 Badan Pusat Statistik dalam hal ini Fungsi Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik mulai melakukan penerjemahan COICOP 2018 ini. COICOP dalam versi Indonesia ini dinamakan Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Indonesia (KBPRTI) 2020.

5. Laporan *Statistical Business Register* (SBR) 2020

Pada tahun 2013, BPS mulai membangun SBR dengan nama *Integrated Business Register (IBR)* yang bertujuan untuk mengintegrasikan data direktori seluruh *subject matter* secara terpusat ke dalam satu sistem. SBR ditetapkan sebagai salah satu prinsip dasar transformasi statistik dan peningkatan kualitas melalui program STATCAP-CERDAS dan Reformasi Birokrasi BPS. SBR dibangun dengan konsep dan definisi unit statistik yang baku mengikuti *System of National Account (SNA) 2008*. SBR merupakan basis data unit ekonomi yang terintegrasi, mutakhir, dan komprehensif yang dipelihara oleh institusi statistik untuk tujuan statistik. SBR berfungsi menyediakan populasi unit statistik ekonomi sebagai kerangka induk untuk survei-survei ekonomi, sehingga SBR dapat dijadikan sebagai alat koordinasi cakupan sensus/survei dan integrasi data. Pemeliharaan data SBR dilakukan melalui *survey feedback*, *quality improvement survey*, *profiling,* dan sumber data administratif.

Bertransisi dari sistem pemutakhiran direktori perusahaan/usaha yang masih dikelola oleh masing-masing subject matter produsen data, proses updating data SBR belum memiliki proses bisnis yang terintegrasi. Oleh karena itu, kegiatan SBR pada tahun 2020 berfokus kepada penyiapan statistik ekonomi terintegrasi, di samping pemeliharaan data dan pelayanan kebutuhan kerangka induk survei berbasis perusahaan/usaha.

Pertama, SBR melakukan kegiatan penyusunan standar data variabel statistik ekonomi berbasis perusahaan. Selaras dengan penyusunan standar data dalam kerangka Satu Data Indonesia, kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan dasar statistik ekonomi hulu-hilir, menyamakan interpretasi konsep definisi, koherensi, konsistensi, dan keterbandingan data ekonomi mengacu referensi internasional, serta memudahkan integrasi data hasil survei untuk pemutakhiran SBR. Output dari kegiatan ini adalah draft standar data variabel SBR yang akan masuk dalam Master File Standar Data Statistik (MFSDS) versi 2 pada tahun 2021.

Kedua, SBR melakukan kegiatan perancangan Petunjuk Teknis Penyiapan Statistik Ekonomi Terintegrasi melibatkan tim terintegrasi lintas unit kerja dari Deputi Bidang MIS, subject

matter, dan neraca. Penyusunan petunjuk teknis ini penting untuk mendefinisikan proses bisnis baru yang terintegrasi dan memastikan aliran data dari sumber data hasil survei internal BPS dan data administratif Kementerian/Lembaga untuk pemutakhiran SBR berjalan dengan baik. Dengan demikian, SBR dapat menyediakan kerangka induk *(master frame)* survei berbasis perusahaan/usaha yang komprehensif dan *up-to-date* sesuai harapan pengguna. Output dari kegiatan ini adalah draft petunjuk teknis penyiapan statistik ekonomi terintegrasi yang akan ditetapkan sebagai Peraturan Kepala BPS pada tahun 2021.

Ketiga, SBR membangun diskusi kolaboratif dengan Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan LKPP untuk menginisiasi kerjasama perolehan data administratif. Dengan Kementerian Keuangan, pada tahun 2019 telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pertukaran data BPS dan Kementerian Keuangan termasuk di dalamnya data wajib pajak/ data Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meng-*update* SBR. Data wajib pajak telah mengalir ke SBR namun karena *volume*-nya yang cukup besar dalam prosesnya masih mengalami kendala dari sisi sistem dan kelengkapan data sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk mengupdate SBR dan dilakukan diskusi evaluasi dengan penyedia data. Dengan BKPM, SBR menginisiasi kerjasama untuk perpanjangan MoU antara BPS dan BKPM serta PKS untuk perolehan data registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) pada *Online Single Submission (OSS)* dan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk mengupdate SBR. Sedangkan dengan LKPP, diskusi untuk inisiasi kerjasama pemanfaatan KBLI dan perolehan data perusahaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah untuk SBR telah dilakukan dengan didukung tim Biro Hukum dan Kerjasama untuk *drafting* Nota Kesepahaman/MoU dan PKS.

Keempat, SBR melakukan pengembangan sistem secara mandiri/*inhouse* sebagai salah satu modul dari *Frame Register System* (FRS) melanjutkan pengembangan sistem oleh pihak ketiga (sistem lelang) pada tahun 2019 (lebih detailnya lihat pada bagian Sistem Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei).

Kelima, SBR melakukan pengintegrasian/ pemutakhiran basis data hasil kegiatan Updating Direktori SBR 2019, Direktori Perusahaan Pertanian (DPP) 2019, dan kegiatan Statistik Pariwisata 2019. Kegiatan pemutakhiran basis data dari hasil Updating Direktori SBR 2019 merupakan kelanjutan kegiatan pemutakhiran yang baru dilakukan pada tahap *matching* awal dengan program otomasi. Pada tahun 2020, proses *matching* dilanjutkan dengan penilaian petugas dari hasil program otomasi di 2019 untuk memastikan kualitas data integrasi. Sebanyak 215.710 usaha/perusahaan SBR diupdate menggunakan *feedback* survei pariwisata. Dari jumlah tersebut 213.477 (98,96%) aktif, 307 (0,14%) tutup, dan 1.926 (pindah). Dari hasil integrasi

dengan usaha DPP (Direktori Perusahaan Pertanian terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan) ditambahkan usaha sebanyak 6.610 usaha/perusahaan berlokasi di sekitar ibu kota provinsi. Secara total, output dari kegiatan ini adalah persentase data SBR yang ter-*update* pada tahun 2020 sebanyak 100,00% dari target.

Keenam, SBR memberikan pelayanan permintaan data dari beberapa unit kerja internal untuk keperluan penyiapan kerangka survei di antaranya Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri (PDN) dan Neraca Jasa. Di samping keenam kegiatan tersebut, SBR berpartisipasi aktif dalam pembahasan indikator ekonomi digital di tingkat internasional sebagai delegasi BPS dalam Digitalization dan Globalization Task team pada *UN Committee Expert on Business and Trade Statistics*. SBR juga ikut serta dalam diskusi pembahasan draft Peraturan BPS terkait pengumpulan data pelaku usaha Perdagangan Melalui Sarana Elektronik (PMSE) atau yang dikenal dengan pelaku *e-commerce* dengan tim Neraca dan K/L terkait. Tim SBR juga tergabung dalam tim penyiapan Economic Wide Survey (EWS) yang merupakan cikal bakal survei terintegrasi di BPS.

Rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan SBR pada tahun 2020 ini dirangkum dalam laporan *Statistical Business Register* 2020.

6. Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2020

Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2020 merupakan kumpulan dokumentasi laporan konsultasi klasifikasi statistik. Laporan tersebut disusun berdasarkan pengumpulan laporan konsultasi klasifikasi statistik yang dilakukan pada Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik (PSKS) dalam rangka dokumentasi laporan untuk pengembangan klasifikasi di masa yang akan datang. Bentuk media konsultasi dapat melalui:

- Sistem Informasi Layanan Statistik (SILASTIK), sebelumnya Sistem Pencarian Klasifikasi (SPK) Online;
- Telepon ke Subdit. PSKS;
- Kunjungan ke Subdit. PSKS; dan
- Media lainnya, seperti Email, WhatsApp (WA), surat dan lainnya.

Kegiatan konsultasi klasifikasi statistik menggambarkan kebutuhan kode klasifikasi statistik dari pengguna. Pengguna menggunakan media yang telah disediakan untuk mengkonfirmasi kode yang tepat atau bertanya mengenai kode klasifikasi yang menjadi kebutuhannya. Pengguna media konsultasi yang menanyakan kode klasifikasi statistik ke Subdirektorat Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik (PSKS) selama tahun 2020

sebanyak 98 dokumen penanya, baik melalui SILASTIK, telepon, kunjungan ke subdirektorat PSKS maupun melalui media lain seperti email, WA atau surat.

Pada tahun 2020 media SPK Online sedang mengalami transisi ke aplikasi yang terbaru yaitu Sistem Pembakuan (SIBAKU) yang konsultasinya sudah di-inlinekan dengan SILASTIK, sehingga penyesuaian penggunaan SILASTIK menjadi salah satu persoalannya. Selain persoalan tersebut juga ada masa pandemik Covid 19, yang mengakibatkan media lain seperti telepon dan kunjungan yang semakin menurun. Konsultasi melalui telepon dan kunjungan langsung mengharuskan petugas dan pengguna melakukan konsultasi secara offline, namun pada masa pandemik karena dilakukan pembatasan sehingga layanan offline menjadi kurang optimal karena adanya petugas yang WFH dan WFO. Persoalan tersebut menjadikan penurunan jumlah dokumen laporan konsultasi statistik.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik serta penyusunan dan pengembangan *Statistical Business Register* :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)
   - Terbatasnya SDM TI yang dapat mengembangkan dan membangun sistem berbasis website/aplikasi guna mengakomodasi kebutuhan dari penerapan atas petunjuk teknis standar data, klasifikasi statistik, dan SBR agar berjalan efektif dan efisien; saat ini masih mengandalkan pengembang sistem *(developer)* Direktorat PMSS yang tidak hanya mengerjakan sistem tetapi juga mengerjakan proses bisnis rutin terkait pengembangan konten/ pemeliharaan standar data, klasifikasi statistik, dan SBR. Hal ini ke depan dapat menjadi kendala karena volume pekerjaan yang terus meningkat dengan ditetapkannya Peraturan Badan terkait KBLI dan standar data statistik serta integrasi data SBR yang melibatkan lintas unit kerja dan lintas K/L. Permintaan bantuan pengembangan dari fungsi Direktorat SIS yang diperoleh terbatas, tidak ada tim yang khusus berfokus hanya melayani satu fungsi klasifikasi, standar data, dan SBR dimana belum mendapatkan prioritas utama dalam penyelesaiannya dibandingkan pengembangan sistem fungsi/subdirektorat lain.
   - Diperlukan Seksi atau Sub Koordinator SBR tersendiri yang terpisah dari Sub Koordinator Klasifikasi dan Standardisasi; disamping juga terbatasnya SDM dalam menangani kebutuhan SBR yang semakin banyak dan besar dari berbagai aspek.

b. Koordinasi dan Sosialisasi
   - Belum berjalannya koordinasi di internal BPS sendiri maupun BPS dengan K/L dalam hal Standar Data Statistik dan SBR
   - Kurangnya pemahaman baik internal BPS sendiri maupun di Kementerian/Lembaga dalam penerapan petunjuk teknis standar data statistik

- Terbatasnya sisi anggaran dalam melakukan sosialisasi produk/output seperti standar data statistik dan KBLI.

c. Volume/ beban pekerjaan

- Tindak lanjut implementasi Peraturan Badan Pusat Statistik terkait Standar Data Statistik dan KBLI 2020 memerlukan pembinaan/ layanan yang semakin meluas dan meningkat kepada internal/eksternal BPS dalam kaitannya dengan Satu Data Indonesia.
- Meningkatnya sumber data untuk mengupdate SBR baik internal maupun eksternal untuk diintegrasikan dan dimutakhirkan secara berkelanjutan.
- Meningkatnya permintaan data SBR untuk kerangka induk (master frame) survei berbasis perusahaan/usaha secara berkelanjutan.
- Kebutuhan pengembangan dan penyusunan metodologi integrasi data SBR, standar data, klasifikasi statistik dan penyusunan output yang belum memiliki proses bisnis yang efisien dan sarana yang memadai untuk dapat memberikan output yang berkualitas dan mendukung berbagai kebutuhan berbagai pengguna termasuk kebutuhan data baru terkait isu-isu dampak fenomena statistik terkait pandemi, digitalisasi, globalisasi, dan sustainability.

d. Konten dan Support Data

- Diperlukan tersedianya sumber data kependudukan dan luas wilayah pada level desa yang terupdate sesuai dengan kondisi data potensi desa (podes) yang dipakai pada tahun berjalan yang digunakan dalam penghitungan skoring klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan.
- Updating SBR dengan metode survey feedback masih belum terintegrasi dan belum mencakup seluruh subject matter sehingga updating hanya dilakukan pada sebagian data SBR.
- SBR belum memiliki sumber data administratif yang mengalirkan datanya secara rutin untuk meminimalisasi kegiatan pemutakhiran lapangan karena proses bisnis terintegrasi belum terbentuk.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik serta penyusunan dan pengembangan *Statistical Business Register*:

a. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi KBLI sebagai salah satu instrumen Satu Data Indonesia.
b. Penentuan unit yang bertanggung jawab terhadap klasifikasi statistik di BPS Daerah belum secara formal ditentukan, mengupayakan berkoordinasi dengan Kepala Bidang IPDS Seluruh

Indonesia untuk sementara merupakan tugas kepala seksi Jaringan dan Rujukan Statistik BPS Daerah.

c. Mengusulkan ke pimpinan dan berkoordinasi dengan bagian hukum untuk dapat membentuk unit kerja khusus untuk menangani SBR, walaupun sampai saat ini belum bisa terlaksana.
d. Meningkatkan koordinasi antara SBR dan *subject matter ,* untuk menyepakati pembangunan tatakelola transfer data hasil survei.
e. Berkoordinasi dengan *subject matter* untuk mengisi variabel SBR yang belum terisi
f. Berkoordinasi dengan tim Neraca Nasional untuk upaya peningkatkan pemahaman SNA melalui *Focus Group Discussion (FGD)* ataupun *capacity building*.
g. Data luas wilayah menggunakan data luas pemetaan walaupun tidak sepenuhnya match dengan podes dan data jumlah penduduk menggunakan proporsi dari data penduduk hasil proyeksi dan menggunakan data hasil SP2020 sementara.
h. Dalam masa transisi updating SBR dilakukan secara bertahap dengan subject matter tertentu sebagai prototype yang akan dikembangkan kepada subject matter lainnya dengan membangun petunjuk teknis pemutakhiran survey feedback dan data administratif pada tahun 2020.
i. Menindaklanjuti MoU Pertukaran Data BPS dan Kementerian Keuangan pada tahun 2019 untuk mendapatkan data wajib pajak sebagai bahan untuk memperbarui data BPS secara terus menerus dan inisiasi kerjasama dengan Kementerian/Lembga lainnya, dalam hal ini terkait dengan SBR.

Sasaran 4. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas

- **Indikator Kinerja: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)**

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dibutuhkan master dan peta wilayah kerja statistik yang up to date dan berkualitas. Untuk memperoleh tujuan tersebut, setiap tahun Direktorat PMSS melakukan pemutakhiran master dan peta wilayah kerja statistik dengan memanfaatkan teknologi mulai dari proses updating wilkerstat sampai dengan pengiriman hasil peta yang diupate. Capaian indikator dalam bentuk persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Turunan: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas (%)

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Turunan IKU	Penanggung Jawab	Capaian Indikator Turunan	Capaian IKU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master wilkerstat yang diupdate	Subdit Pengembangan Kerangka Sampel	Persentase master wilkerstat yang diupdate terhadap perubahan wilkerstat yang dilaporkan = 100 %	100 %
	Persentase peta wilkerstat yang diupdate	Subdit Pengembangan Pemetaan Statistik	Persentase peta wilkerstat yang diupdate terhadap perubahan wilkerstat yang dilaporkan = 100 %	

1. Pemutakhiran Master Wilayah Kerja Statistik

a. Pemutakhiran Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS)

Pemutakhiran data wilayah kerja statistik meliputi wilayah administrasi dan blok sensus dilakukan melalui sistem MFD dan MBS berbasis web oleh BPS Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang dilakukan secara rutin 2 kali selama setahun yaitu periode Januari-Juni dan Juli-Desember. Sebelum akhir periode, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan ke Subdit. Pengembangan Kerangka Sampel dalam format Berita Acara baik ada perubahan maupun tidak ada perubahan diwilayahnya. Capaian yang ingin dilihat adalah kelengkapan dokumen dan database serta ketepatan waktu pemutakhiran yang dilakukan oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Persentase master wilayah kerja statistik yang diupdate terhadap perubahan wilayah yang dilaporkan mencapai 100 persen.

Pemutakhiran Master Wilkerstat Semester 1 Semester 2 Tahun 2020 melalui MFDONLINE menghasilkan jumlah master sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Master Wikerstat yang Dimutakhirkan pada Tahun 2020

Master Wilkerstat	Jumlah Master Wilkerstat	
	2020 Semester 1	2020 Semester 2
(1)	(2)	(3)
Provinsi	34	34
Kabupaten/Kota	514	514
Kecamatan	7.263	7265
Desa/Kelurahan	83.831	82.839
Blok Sensus	845.657	845. 658

b. Pemutakhiran Master Wilkerstat Satuan Lingkungan Setempat (SLS) dalam rangka SP2020

Selain pemutakhiran yang dilakukan rutin, pada tahun 2020 dilakukan pemutakhiran wilkerstat Satuan Lingkungan Setempat (SLS) untuk keperluan penyusunan kerangka induk SP2020. Kegiatan yang dilakukan meliputi updating SLS pada kegiatan Rapat koordinasi Kecamatan (Rakorcam), pembentukan SubSLS untuk SLS yang bermuatan besar, dan updating SLS untuk pelaksanaan lapangan SP2020 bulan September. Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah peta wilkerstat, master dan muatan SLS/Non SLS. Hasil kegiatan ini juga digunakan sebagai dasar hitung untuk pengalokasian petugas Sensus Penduduk 2020.

Tabel 7. Jumlah Master Wikerstat SLS yang Dimutakhirkan pada Tahun 2020

Master Wilkerstat SLS	Jumlah Master Wilkerstat SLS
(1)	(2)
Pemetaan 2019	1.179.557
Rakorcam SP 2020	1.183.091
SP2020 Lapangan September 2020	1.184.431

c. Pembentukan Wilkerstat Blok Sensus 2020

Selain melakukan pemutakhiran wilkerstat BS2010, pada tahun 2020 juga dilakukan pembentukan master wilkerstat baru yaitu BS2020 sebagai dasar perencanaan kegiatan survei selama 1o tahun mendatang. Tahapan Pembentukan BS2020 dimulai dari tahap persiapan yaitu membuat petunjuk teknis yang dituangkan dalam Buku Pedoman Pembentukan BS2020, Pelatihan Innas yang dihadiri oleh Kasi Jaringan dan Rujukan Statistik BPS Provinsi, Pelaksanaan

pengolahan, Evaluasi, dan Finalisasi BS2020. Jumlah BS2020 hasil kegiatan ini sebanyak 855.025 BS yang terdiri dari 738.142 BS Biasa, 2859 BS Khusus, dan 114.022 BS Persiapan. Hasil pembentukan BS ini akan digunakan sebagai data dasar pada pelaksanaan SP2020 Lanjutan (Long Form) dan survei-survei bidang sosial pada tahun 2021.

Masalah/kendala yang dihadapi:

1. Proses bisnis updating SLS belum terakomodir melalui aplikasi MFDOnline yang ada saat ini sehingga proses updating dilakukan manual. Beberapa kendala akibat proses manual ini antara lain:
   - beberapa data yang dikirim dari daerah tidak konsisten dengan data sebelumnya,
   - tidak adanya validasi menyebabkan beberapa data tidak valid karena kesalahan input
2. Belum terintegrasinya pengelolaan master dan peta wilkerstat
3. Masih ada perbedaan jumlah desa hasil updating MFD dengan jumlah desa hasil kegiatan Potensi Desa. Perbedaan ini terjadi akibat kedua kegiatan ini mempunyai konsep dan tujuan yang berbeda.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Mengajukan kegiatan pembangunan ulang aplikasi MFDOnline untuk mengakomodir proses updating Master Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Pengajuan dilakukan melalui aplikasi pelayanan IT BPS yaitu halosis.bps.go.id. Selama proses pembangunan ulang MFDOnline, pemutakhirn Master SLS dilakukan secara manual dengan mekanisme pelaporan yang sudah disusun, membuat program khusus untuk melakukan pengecekan data, kemudian melakukan konfirmasi ulang ke BPS di daerah ketika menemukan anomali data.
2. Pengelolaan saat ini dilakukan dengan pengecekan secara manual antara perubahan master dengan peta perubahannya. Pada 2020, sudah dibuat rancangan pembangunan *Frame Register System* yang terintegrasi dengan *Geospasial System* untuk mengelola master dan peta yang sinkron.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait antara lain Direktorat Statistik Ketahanan Sosial yang menangani Survei PODES. Setelah dilakukan kooordinasi sudah disepakati bahwa data yang dihasilkan memang berbeda secara konsep dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga pada sistem MFDOnline sebagian perbedaan data tersebut tetap disajikan dengan diberikan beberapa catatan agar pengguna data dapat menggunakan informasinya secara bijak. Pada penyusunan kuesioner PODES selanjutnya digagas untuk menyediakan predefined data sebagai data awalan yang berasal dari data-data yang

dihasilkan Direktorat PMSS, sehingga perbedaan data akan diminimalisir di kemudian hari.

2. Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik

a. Jumlah peta wilayah kerja statistik SP2020 (desa/kelurahan) yang mutakhir

Kegiatan Pemetaan dan Pemutakhiran Wilkerstat SP2020 yang dilakukan tahun 2019 telah menghasilkan kerangka wilkerstat setingkat desa dan SLS yang digunakan untuk pencacahan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) di tahun 2020. Dalam pelaksanaan SP2020, kerangka wilkerstat berupa master kode dan nama wilkerstat yang digunakan bersumber dari MFD tahun 2019 semester 1, yang dimutakhirkan hingga kondisi bulan Februari tahun 2020 pada kegiatan Rakor Kecamatan (Rakorcam). Namun saat pelaksanaan lapangan SP2020 di bulan September 2020, perubahan atau perkembangan yang terjadi di lapangan tetap dapat dilaporkan untuk digunakan sebagai master. Sehingga peta wilkerstat yang digunakan pun mengalami perbaikan oleh petugas.

Laporan peta desa yang mutakhir dituangkan dalam Perka BPS tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik. Laporan tahun 2019 ada pada Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2019. Dalam Perka tersebut, jumlah desa yang dimutakhirkan kondisi 2019 adalah sejumlah 83.813 desa yang sudah termasuk juga di dalamnya kelurahan dan unit pemukiman transmigrasi (UPT).

Seiring berjalannya waktu, kondisi desa/kelurahan dan SLS/non SLS mengalami perubahan atau perkembangan. Secara bertahap, BPS daerah melakukan pemutakhiran wilkerstat agar saat pendataan lapangan SP2020 tidak terjadi kendala.

Kemudian pada bulan Februari 2020 dilaksanakan kegiatan Rakorcam yang dihadiri oleh kepala/aparat desa di kecamatan setempat yang bertujuan untuk membangun koordinasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran pemerintahan wilayah administrasi terkecil, menyebarkan informasi tentang SP2020, serta melakukan konfirmasi kondisi desa dan SLS. Dari hasil Rakorcam diperoleh informasi perubahan desa dan SLS baik dari batas maupun jumlah, sehingga master wilkerstat untuk SP2020 dimutakhirkan sesuai hasil Rakorcam.

Pada saat pencacahan lapangan SP2020 di bulan September tahun 2020, petugas sensus masih menemukan perubahan wilayah desa dan SLS. BPS kabupaten/kota dibolehkan untuk melaporkan perubahan tersebut dalam rangka memutakhirkan kembali master wilkerstat SP2020 sehingga pendataan sesuai dengan kondisi wilayah di lapangan terkini.

Berdasarkan perkembangan pemutakhiran SLS/non SLS dari kondisi tahun 2019 semester 1 (kondisi RD) sampai dengan kondisi lapangan SP2020 (September 2020), ada perubahan jumlah desa/kelurahan, namun tidak banyak (hanya 8 desa di 3 provinsi). Namun secara peta, terdapat 290 peta desa/kelurahan yang mengalami pemutakhiran (termasuk batas wilayah). Hal ini dapat diketahui dari Geospatial System (GS), yang merupakan sarana untuk mengatur/manajemen peta digital (upload, download, dan pengecekan peta). Jumlah ini melebihi target awal yang hanya sebesar 200 pemutakhiran desa/kelurahan menjadi 290 peta desa/kelurahan. Hal ini menunjukkan tingkat capaiannya melebihi 100%, yaitu sebesar 145%.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. Perubahan informasi desa dan SLS/non SLS yang begitu cepat sering kali tidak dapat secara otomatis diupdate.
2. Belum terintegrasinya sistem MFD online dengan *Geospatial System*, sehingga perubahan nama dan/atau kode wilkerstat tidak otomatis berubah pada atribut peta digital, demikian pula dengan perubahan batasnya.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

1. Segala perubahan dicatat oleh kabupaten/kota dan secara bertahap pemutakhiran dilaporkan dalam periode yang telah ditentukan.
2. Pemutakhiran master wilayah dengan pemutakhiran petanya masih dilakukan secara manual. Diharapkan ke depannya, saat peta desa diupdate secara spasial dan tabularnya, maka pada sistem master wilayahnya juga ikut ter-update, sehingga integrasi antar sistem sangat diperlukan.

b. Jumlah peta blok sensus

Pada tahun 2020 telah dilakukan kegiatan penyusunan master dan peta blok sensus 2020 (BS2020). Pembentukan peta BS2020 didasarkan pada peta Satuan Lingkungan Setempat (SLS) yang telah dihasilkan di tahun 2019 yang terbagi-bagi ke dalam jumlah muatan yang seragam dan telah ditentukan. Pembentukan BS2020 ini akan digunakan sebagai kerangka induk dalam pelaksanaan kegiatan sensus dan survei selama kurun waktu 10 tahun ke depan.

Pembentukan master dan peta BS2020 telah diselesaikan oleh masing-masing kabupaten/kota pada Desember 2020. Tingkat capaian indikator jumlah peta blok sensus 2020 ini mencapai 94,7%, dimana target sebesar 900.000 peta blok sensus, sementara realisasinya 851.162 peta blok sensus. Tingkat capaian realisasi yang kurang dari target disebabkan oleh adanya perubahan konsep mengenai jumlah muatan dalam pembentukan satu blok sensus. Pada tahun 2010, pembentukan blok sensus didasarkan pada muatan berkisar 80-120 KK/BSTT, BSBTT, BSTTK, namun pada tahun 2020 muatan yang ditetapkan dalam pembentukan BS2020 adalah 120-180

KK/BSTT, BSBTT, BSTTK. Dengan demikian, jumlah BS2020 yang dihasilkan menjadi berkurang dari target yang telah ditentukan.

Dalam pelaksanaan pembentukan peta blok sensus, tidak terlepas dari beberapa masalah dan kendala. Namun demikian, berbagai mitigasi dan solusi sudah diupayakan baik secara teknis maupun administrasi. Berikut diuraikan masalah/kendala dan solusi yang telah dilakukan.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. SDM di kabupaten/kota non organik yang belum menguasai software GIS sehingga mengalami kesulitan dalam memahami materi yang bersifat aplikatif.
2. Kualitas signal/jaringan internet yang tidak stabil mengakibatkan terjadinya *lag* saat penyampaian materi kepada petugas.
3. Adanya proses yang terlewat atau kesalahan dalam digitasi penyesuaian batas blok sensus sehingga pembentukan BS tidak optimal.
4. Adanya SLS kantong yang membingungkan dalam pembentukan blok sensus.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

1. Untuk masalah SDM, dilakukan briefing kepada petugas mengenai tahapan penggunaan software QGIS. Materi praktek dan contoh studi kasus juga diperbanyak.
2. Untuk mengatasi masalah signal selama pelatihan, rekaman pelatihan dan materi dibuatkan dalam bentuk video dan softcopy file buku pedoman yang dapat diputar ulang oleh peserta.
3. Adanya kesalahan atau proses pengolahan yang terlewat diberikan solusi dengan memberi tanda/flag peta Blok Sensus.
4. Permasalahan SLS kantong perlu dipecah menjadi blok sensus tersendiri.

c. Peraturan Badan Pusat Statistik tentang kode dan nama wilayah kerja statistik

Di tahun 2020, Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang kode dan nama wilayah kerja statistik diterbitkan dalam bentuk publikasi pada web BPS, yaitu Peraturan BPS tentang kode dan nama wilayah kerja statistik kondisi tahun 2019 semester 1 dan kondisi tahun 2019 semester 2. Untuk Peraturan BPS kondisi tahun 2020 semester 1 sudah selesai dibuat, namun masih menunggu hasil dari proses pengusulan di Biro Humas dan Hukum – Kemenkum HAM.

Laporan peta desa yang mutakhir kondisi 2019 semester 2 dituangkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Dan Nama Wilayah Kerja Statistik. Dalam Peraturan tersebut, jumlah desa yang dimutakhirkan kondisi 2019 Semester 2 adalah sejumlah 83.820 desa yang sudah termasuk juga di dalamnya kelurahan dan unit pemukiman transmigrasi (UPT). Sementara itu, berdasarkan Peraturan BPS tentang kode dan nama wilayah kerja statistik kondisi 2020 semester

1 yang masih dalam proses pengesahan, jumlah desa mutakhir yang dilaporkan berjumlah 83.831 desa/kelurahan.

Tingkat capaian indikator Peraturan BPS tentang kode dan nama wilayah kerja statistik sudah mencapai 100%, dengan target dan realisasi masing-masing 2 Perka. Masalah dan kendala yang dihadapi dan strategi mengatasinya dalam mencapai indikator kinerja ini dijelaskan sebagai berikut.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. Proses pengesahan Peraturan memerlukan waktu yang lama.
2. Kapasitas file yang besar menyebabkan dokumen Peraturan tidak dapat di-*upload* ke dalam sistem.

Strategi untuk mengatasi kendala adalah:

1. Menunggu proses yang dilakukan Biro Humas dan Hukum sesuai prosedur yang telah ditentukan.
2. Pengiriman file dokumen dilakukan melalui email.

Sasaran 5. Terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei (baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik)

- **Indikator Kinerja: Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei**

Secara umum, pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik yang dilakukan oleh Direktorat PMSS dapat dikelompokkan menjadi 5 kegiatan sebagai berikut:

Tabel 8. Jenis Pembinaan/Konsultasi/Kerja Sama pada Direktorat PMSS

No	Jenis Pembinaan dan/atau kerja sama	Jumlah
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Kerjasama penyusunan metodologi sampling survei sektoral (desain sampling, daftar sampel dan peta wilkerstat)	6
2	Layanan konsultasi klasifikasi statistik	98
3	Pelatihan klasifikasi statistik	47
4	Konsultasi dan kerjasama pemanfaatan peta	3
5	Konsultasi terkait metodologi survei	4
	Jumlah	158

1. Kerjasama Penyusunan Metodologi Sampling Survei Sektoral

Pada tahun 2020, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei melakukan kerja sama penyusunan metodologi sampling survei-survei statistik sektoral, yaitu:

a. Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) / Survei Determinan Status Gizi (SDSG) yang dilaksanakan oleh Balitbang-Kementerian Kesehatan. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan daftar pemutakhiran, penyediaan peta wilayah, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.
b. Survei Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) yang dilakukan oleh Balitbang-Kementerian Kesehatan. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan daftar sampel rumah tangga, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.
c. Survei Pengukuran Indeks Kepuasan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan daftar sampel rumah tangga, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.
d. Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh BKKBN. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel desa/kelurahan, dan konsultasi terkait metode sampling.
e. Assesment Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 terhadap rumah tangga di Indonesia yang dilakukan oleh UNICEF. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan daftar sampel rumah tangga, penyediaan peta wilayah, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.
f. *Population-based sero-survey* Covid-19 di Provinsi Bali yang dilakukan oleh UNICEF. Ruang lingkup kerjasama meliputi penyusunan desain sampling, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan daftar sampel rumah tangga, penyediaan peta wilayah, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.

Secara keseluruhan kerjasama bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap K/L agar bisa menyusun kerangka sampel sesuai kaidah survei serta dapat melakukan pemilihan sampel yang menggunakan probability sampling sehingga kualitas statistik sektoral yang dihasilkan menjadi baik. Tantangan yang dihadapi adalah dibutuhkan penyusunan petunjuk teknis yang baku dalam hal penyusunan kerangka sampel dan pemilihan sampel sesuai dengan standar penyelenggaraan kegiatan statistik yang baik.

2. Pembinaan, Kerjasama dan Konsultasi Klasifikasi Statistik

Jumlah pembinaan dan/atau kerjasama kegiatan statistik terkait klasifikasi statistik dapat diketahui melalui jumlah permintaan layanan konsultasi klasifikasi Kementrian/lembaga/institusi/ perorangan dan jumlah undangan narasumber dari Kementerian/Lembaga.

Layanan Konsultasi Klasifikasi Statistik disediakan untuk berbagai kalangan pengguna klasifikasi statistik baik pegawai internal BPS untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sensus/survei BPS, maupun pihak eksternal yaitu institusi pemerintah, perusahaan, dan perorangan. Laporan konsultasi klasifikasi statistik disusun dalam rangka pendokumentasian kegiatan konsultasi dan penyesuaian dengan perubahan perekonomian, khususnya kode klasifikasi yang sering berhubungan dengan kebutuhan pengguna, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai klasifikasi statistik yang belum secara eksplisit terjawab dari deskripsi publikasi klasifikasi statistik baik KBLI, KBJI, maupun KBKI. Hal ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan/revisi klasifikasi. Di samping itu, laporan menjadi acuan bagi tim layanan konsultasi ke depan dalam memberikan rekomendasi kode klasifikasi statistik yang tepat sehingga meningkatkan kualitas data yang berhubungan dengan penggunaan klasifikasi. Jumlah konsultasi pada periode penyusunan laporan tahun 2020 (Oktober 2019 s.d. September 2020) mencapai 98 dokumen penanya, baik melalui SPK Online, telepon, kunjungan langsung, email, WA, maupun surat ke Direktorat PMSS.

Sedangkan untuk kegiatan pembinaan/ pelatihan klasifikasi statistik kepada Kementerian/ Lembaga terkait klasifikasi statistik sebagai narasumber yang melibatkan peserta dalam grup/ sekelompok orang/ unit kerja instansi berdasarkan permintaan/ undangan pada tahun 2020 terhitung 47 kegiatan. Dengan demikian, total pembinaan, kerjasama, dan konsultasi klasifikasi statistik pada tahun 2020 sebanyak 145 kegiatan.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

a. Pandemi Covid 19, yang mengakibatkan layanan media tatap muka langsung seperti telepon dan kunjungan menjadi kurang optimal.
b. Media SPK Online sedang mengalami transisi ke aplikasi yang terbaru yaitu Sistem Pembakuan (SIBAKU) dan MMS yang konsultasinya sudah di-inlinekan dengan SILASTIK
c. Sibaku Online belum dapat diakses secara publik sebagai salah satu cara pencarian klasifikasi statistik.

Strategi yang diambil untuk mengatasi masalah/kendala:

a. Mengoptimalkan pengalihan layanan melalui daring menggunakan Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik).

b. Menyempurnakan transisi ke aplikasi yang terbaru dan menambah fungsi-fungsi dari sistem lama untuk mengoptimalkan sistem yang baru.

3. Konsultasi dan Kerjasama Pemanfaatan Peta Statistik

- **Jumlah permintaan penyusunan pengembangan pemetaan (tematik, SIG, dan muatan peta wilayah) yang ditindaklanjuti**

Peta digital wilkerstat yang dijelaskan di subbab ini adalah peta yang dimanfaatkan untuk kegiatan survei di luar BPS selama kurun waktu tahun 2020. Beberapa kegiatan permintaan data spasial tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendataan statistik pariwisata dengan melakukan pengumpulan data koordinat geografis dari lokasi-lokasi jasa pariwisata seperti objek wisata, hotel, restoran, dan lain-lain.
b. Permintaan peta wilkerstat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SLS dan peta titik infrastruktur untuk peta resiko bencana Covid-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
c. Permintaan pemadanan daftar desa/kelurahan (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) Kementrian Sosial dengan master file desa/kelurahan BPS dari Kementrian Sosial dan permintaan pemadanan daftar desa/kelurahan (Data Dukcapil Kemendagri) dengan master file desa/kelurahan BPS tahun 2019 dari Kemendikbud.

Jumlah permintaan penyusunan pengembangan pemetaan di tahun 2020 sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 5 permintaan. Tingkat pencapaiannya mencakup 100%. Selain kegiatan rutin yang dilakukan oleh *subject matter*, peta wilkerstat juga digunakan untuk kebutuhan survei lainnya, yang terutama adalah untuk kegiatan survei penanganan Covid-19.

Masalah /kendala yang dihadapi adalah:

a. Beberapa peta sampel blok sensus tidak tersedia pada *storage*.
b. Terdapat perbedaan master wilayah pada daftar sampel dengan file peta yang tersedia sehingga memerlukan waktu yang lama dalam menyesuaikannya.
c. Format file/dokumen yang tidak standar menyebabkan proses pemilihan peta membutuhkan waktu yang cukup lama.
d. Untuk permintaan peta tematik, template selalu berubah dengan adanya penambahan data atau dasar hitung.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

a. Untuk dokumen peta BS yang tidak tersedia dilakukan pemilihan BS pengganti atau jika peta tidak tersedia maka digunakan peta desa dimana wilayah BS tersebut berada.

b. Adanya perbedaan master wilayah dengan file peta diatasi dengan membuat penyesuaian daftar BS sampel terpilih dengan cara meminta ke subject matter untuk kondisi 2010 dan dilakukan pairing manual.
c. File format yang tidak standar perlu dilakukan konversi terlebih dahulu agar memudahkan pencarian sampel terpilih.
d. Untuk permasalahan peta tematik, penyesuaian dilakukan antara peta dan data sebelum peta tematik disusun.

4. Konsultasi Metodologi Survei Sektoral

Pada tahun 2020, Subdit Pengembangan Desain Sensus dan Survei melakukan beberapa pelayanan konsultasi dan sampling survei-survei statistik sektoral. Pembinaan dilakukan di antaranya dengan berperan aktif sebagai narasumber pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L tersebut dan juga K/L yang lainnya seperti narasumber terkait audit sampling di BPK, narasumber sampling untuk Global Adult Tobacco Survey (GATS) di Balitbang-Kementerian Kesehatan, narasumber sampling untuk Survei Dampak Sosial Ekonomi Covid-19 terhadap Perempuan (BAPPENAS-MAMPU) di BAPPENAS dan narasumber sampling untuk Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di BNN.

Sistem Aplikasi yang Dibangun dan Dipelihara oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan mendukung tercapainya hasil kegiatan yang berkualitas, maka pada tahun 2020 Direktorat PMSS melakukan pembangunan dan pemeliharaan beberapa sistem aplikasi. Sistem-sistem ini digunakan untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, pengumpulan data, analisis dan evaluasi dampai dengan diseminasi kegiatan. Sistem aplikasi yang dibangun dan dipelihara antara lain:

1. Aplikasi Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS (MFDOnline)

MFDONLINE merupakan Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS Berbasis Web yang digunakan untuk mengumpulkan informasi perubahan wilayah serta melakukan pemeliharaan master wilkerstat. Output Aplikasi MFDONLINE dapat memberikan informasi sejarah perubahan wilayah yang dapat dicatat dari waktu ke waktu dan menghasilkan Daftar Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat). Wilkerstat yang lebih dikenal dengan Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS) dijadikan rujukan dalam kegiatan sensus dan survei BPS dari tahap perencanaan sampai dengan diseminasi hasilnya. Sejak tahun 2010 Sistem Pemutakhiran MFD dan MBS atau MFDONLINE mulai

diimplementasikan untuk merekam perubahan wilayah yang terjadi sampai tingkat blok sensus. Hasil pemutakhiran dirilis per semester dalam setiap tahunnya berupa Peraturan Kepala BPS tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik.

Sistem MFD Online sejak pertama kali diimplementasikan 2010 telah mengalami pengembangan guna meningkatkan performa dan melengkapi fasilitas yang ada. Secara fungsi dan manfaat sistem yang ada sampai sekarang telah dapat memberikan hasil guna yang baik untuk memenuhi kebutuhan akan informasi perubahan master wilkerstat. Namun perlu penyesuaian dari sisi teknologi mengingat kebutuhan hubungan antar-sistem yang makin berkembang.

Masalah yang dihadapi Sistem MFD Online belum dibangun mengikuti perkembangan teknologi, saat ini belum bisa berkomunikasi dengan sistem lain melalui pertukaran services (API) sedangkan hampir seluruh sistem memerlukan master wilkerstat. Strategi yang diambil melakukan *re-engineering* dan *re-build* sistem pemutakhiran master wilkerstat. Pengajuan pembangunan sistem sudah dilakukan pada bulan Juni 2020 melalui halosis.bps.go.id. Pembangunan yang dilakukan oleh Direktorat SIS djiharapkan akan lebih mudah dirancang agar sistem dapat terkoneksi dengan sistem lainnya di BPS.

2. Aplikasi Iframe

Aplikasi ini merupakan aplikasi pengelolaan kerangka sampel yang dipelihara oleh Direktorat PMSS. Fasilitas yang ada pada aplikasi ini antara lain pengajuan permintaan desain dan sampel survei, monitoring progress persiapan survei mulai dari penyusunan desain, kerangka sampel, sampei dengan pengiriman daftar sampel ke BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, aplikasi digunakan untuk beberapa survei antara lain Survei Komoditas Strategis Perkebunan (KOMSTRAT2020) dan Survei Hortikultura Potensi (SHOPI2020). Kendala yang masih ditemui pada aplikasi ini antara lain sistem masih belum memiliki menu konfigurasi untuk pengiriman notifikasi email. Sistem ini masih terus dikembangkan untuk menambah beberapa fitur agar sistem dapat digunakan lebih optimal.

3. Aplikasi Sistem Pencarian Kode Klasifikasi Statistik Sibaku Online dan Sibaku Mobile

Dengan semakin meningkatnya pengguna klasifikasi, baik oleh kalangan internal maupun eksternal BPS, maka diperlukan suatu sarana untuk memudahkan para pengguna klasifikasi dalam mencari suatu kode, judul, atau deskripsi klasifikasi. Dalam rangka memfasilitasi pengguna, maka Direktorat PMSS telah mengembangkan suatu sistem aplikasi pencarian kode klasifikasi berbasis *web* (SPK Online) pada tahun 2010. Dalam perkembangannya, SPK Online telah didukung dalam bentuk sistem aplikasi multiplatform, yang tidak hanya berbasis *web*, tetapi juga berbasis desktop dan *mobile*. Sistem aplikasi berbasis desktop, yang diberi nama SPK *Offline*, ditujukan untuk penggunaan

operasional petugas/pengawas lapangan tanpa memerlukan koneksi internet. Sedangkan sistem aplikasi berbasis *mobile* yaitu SPK Android, ditujukan untuk kemudahan pencarian dengan menggunakan *smartphone* dengan sistem operasi Android. SPK Online juga dikembangkan dengan penambahan modul Standarisasi Lapangan Usaha (Standlapus) yang mencakup fungsi pendokumentasian hasil diskusi pertanyaan-pertanyaan KBLI yang dikhususkan untuk penggunaan internal Subdirektorat PSKS. Dengan dikembangkannya Standlapus, pelayanan klasifikasi statistik yang diberikan dapat lebih optimal dan terjaganya kesamaan pemahaman klasifikasi statistik antara tim klasifikasi statistik.

Pada tahun 2020, sistem aplikasi SPK dikemas ulang dengan nama baru yaitu Sistem Pembakuan Statistik (Sibaku) agar lebih mudah diingat oleh pengguna. SPK Online dikemas ulang menjadi Sibaku Online dan SPK Android dibangun ulang menjadi tidak hanya berbasis Android tetapi juga berbasis iOS menjadi Sibaku Mobile. Desain ulang SPK dimaksudkan agar penyebaran informasi dan pencarian kode berjalan lebih efektif, yakni dengan membuatnya lebih ramah pengguna. Sibaku Online dan Sibaku Mobile telah diluncurkan secara resmi dalam rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional 2020 bersamaan dengan peluncuran publikasi KBLI 2020. Sibaku Mobile juga sudah tersedia untuk publik pada marketplace android (Play Store) dan iOS (App Store).

Sibaku Online merupakan sistem aplikasi transisi yang bersifat *landing page* (link ke sistem aplikasi lain) dan hanya pengemasan ulang dari fitur-fitur SPK Online. Hal ini dikarenakan SPK Online akan dimigrasikan ke platform metadata yang terintegrasi dengan Direktorat Diseminasi Statistik yaitu *Metadata Management System (MMS)*. Proses migrasi basis data statistik sudah dilakukan untuk klasifikasi terbaru yaitu KBJI 2014, KBLI 2015, dan KBKI 2015. Perancangan desain dan analisis sistem dilakukan bersama tim MMS.

Fitur-fitur Sibaku Online meliputi menu klasifikasi statistik (pencarian, tabel kesesuaian, tanya kode (diarahkan ke Silastik), dan unduh publikasi klasifikasi (diarahkan ke halaman website BPS) dan standar data (pencarian standar data versi 1 dan ujicoba pengajuan usulan standar data). Menu layanan konsultasi klasifikasi statistik telah diintegrasikan ke Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik). Sedangkan fitur-fitur Sibaku Mobile yang dikembangkan pada tahun 2020 meliputi:

1. Mencari Kode (saat membuka aplikasi / pada home)
2. Mencari Kode pada hlm detail kode dengan jenis klasifikasi yang sama
3. Mencari Kode pada hlm detail kode dengan jenis klasifikasi yang berbeda
4. Mengatur, filter hasil pencarian
5. Mencari berdasarkan pencarian terakhir

Masalah/kendala yang dihadapi dalam pengembangan MMS, Sibaku Online dan Sibaku Mobile:

1. Terdapat kendala keamanan source code yang belum lulus uji keamanan jaringan sehingga Sibaku Online terpaksa ditutup kembali akses publik dan hanya bisa diakses internal melalui jaringan VPN.
2. SDM yang dimiliki tidak hanya fokus dalam pengembangan sistem Sibaku dan MMS saja karena adanya beban pekerjaan lain yang bersamaan waktu.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala:

1. Pemilihan fitur prioritas untuk pengembangan Sibaku Online dan Sibaku Mobile
2. Berkonsultasi dengan Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data untuk pengecekan jaringan dan identifikasi permasalahan. Link Sibaku Online selama masa perbaikan uji keamanan dikembalikan untuk sementara ke halaman SPK Online.
3. Migrasi database klasifikasi dibantu tim Subdirektorat Pengembangan Basis Data.
4. Melakukan evaluasi pengembangan fitur-fitur dan ekstensi sistem SPK Online untuk dicakup dalam spesifikasi Metadata System.

4. Aplikasi Sistem Statistical Business Register (SBR)

Pengembangan sistem SBR dimulai pada tahun 2019, dimana Sistem SBR menjadi salah satu modul yang tergabung dalam Sistem Frame and Register *(Frame Register System/FRS)*, dengan nama Modul Pengelolaan Data Bisnis. Pengembangan FRS (termasuk didalamnya modul SBR), dikembangkan oleh pihak ke-3 dengan sistem lelang. Akan tetapi sampai akhir tahun 2019, FRS belum dapat diselesaikan dan progress nya mencapai 90,14%. Khusus untuk Modul Pengelolaan Data Base (SBR), disebutkan bahwa pencapaian deliverable menjadi milik PPK, dalam hal ini BPS.

Terkait hasil akhir pengembangan FRS yang belum selesai, pada tahun 2020, diputuskan untuk melakukan pengembangan yang berfokus pada Modul Pengelolaan Database Bisnis atau SBR. Modul SBR direncanakan untuk dikembangkan secara *In-House*, dengan berbekal *Source Code* yang tersimpan pada environment BPS. Untuk melanjutkan pengembangan dari konsultan, kegiatan *assessment* SBR dilakukan terhadap FRS Modul SBR dari konsultan, baik *source code* maupun antarmuka sistem yang sudah ada. Selanjutnya dari hasil assessment disusun *Functional Requirement (FR)* pengembangan sistem SBR berdasarkan pada *requirement* awal pembangunan FRS khususnya modul Pengelolaan Database Bisnis, serta membuat prioritas terkait pencapaian untuk tahun 2020. Pembahasan FR dilakukan untuk mendapat FR final sebagai sumber revisi pengajuan anggaran konsultan dan pembuatan *backlog* ke depan. Karena waktu yang terbatas pada 2020, maka pembahasan FR juga meliputi mana saja yang merupakan item prioritas. Prioritas ini dimaksudkan khususnya untuk uji coba implementasi petunjuk teknis statistik ekonomi terintegrasi.

Kemajuan pengembangan sistem pada tahun 2020 meliputi penyiapan infrastruktur SBR, perbaikan basis data uji coba sistem, fasilitas untuk mengunduh hasil pencarian dalam bentuk excel dan pdf, peningkatan performa pada sistem, konfigurasi auto deploy, improvisasi halaman web sistem SBR, dan perbaikan fungsi pencarian pada sistem.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

a. Impor data, *cleaning*, dan *matching* data membutuhkan waktu lama
b. Pengembangan sistem SBR belum optimal dikarenakan perubahan struktur basis data yang harus disesuaikan *subject matter* menyebabkan beberapa fitur sistem perlu disesuaikan.
c. Beban dan jadwal pekerjaan yang bersamaan membutuhkan SDM yang fokus dalam pengembangan sistem.
d. Belum mampunya sistem dalam membuat master frame secara otomatis sehingga pengerjaannya kurang efisien.
e. Adanya variabel-variabel kebutuhan Neraca yang belum terakomodasi.
f. Belum mampunya sistem dalam membuat statistik/demografi usaha/perusahaan.
g. Adanya beberapa error dalam fungsi profiling perusahaan.
h. Belum siapnya sistem SBR untuk mengakomodasi data pajak dan sumber lain yang akan masuk ke SBR.
i. Sistem belum dapat digunakan untuk memproses *query* usaha/perusahaan oleh pengguna yang tidak terlalu paham dengan SQL Server
j. Sistem belum dapat digunakan sebagai dasar dalam penghitungan serta pengelolaan beban responden.
k. Sistem belum mampu untuk melakukan pencatatan perubahan data dengan baik.

Strategi yang diambil untuk mengatasi masalah/kendala:

a. Penyusunan analisis fungsi *(functional requirements)* dan menetapkan prioritas minimal untuk pengembangan Sistem SBR sebagai bagian dari *Frame Register System (FRS)*
b. Membentuk tim kolaborasi statistik terintegrasi meliputi perwakilan*/liaison officer (LO) subject matter*, neraca, dan Deputi Bidang MIS untuk mengidentifikasi variabel yang dibutuhkan untuk dicakup dalam SBR dan membangun standar data/ variabel awal yang ke depan disepakati dan digunakan bersama.
c. Melakukan sosialisasi pentingnya penggunaan ID SBR dalam proses integrasi dan pemutakhiran data hasil survei subject matter ke dalam basis data SBR.
d. Berkoordinasi dengan tim Direktorat Sistem Informasi Statistik untuk mencarikan solusi guna peningkatan performa sistem SBR, melalui pengembangan sistem yang mendukung SBR

e. Mendokumentasikan dan melakukan evaluasi proses bisnis pemutakhiran *survey feedback* dan data administratif untuk dibangun petunjuk teknis dan tata kelola yang lebih efisien ke depan.

5. Aplikasi Penggantian Sampel KSA berbasis web

Aplikasi Penggantian Sampel KSA berbasis web dibuat dan dikembangkan untuk mempermudah proses penggantian sampel KSA yang umumnya terjadi dalam setiap bulan pengamatan. Kegiatan penggantian sampel KSA yang semula dilakukan secara manual, kini telah dilakukan dalam sistem berbasis web sehingga dapat lebih cepat diproses, dapat di-monitor secara berkala, dan dilakukan sinkronisasi.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Aplikasi masih dikembangkan karena ada perubahan kebutuhan yang dinamis
- Master area frame yang belum di-update sehingga bisa menyebabkan perbedaan master wilayah lama dengan yang baru.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi masalah adalah:

- Pengembangan sistem terus dilakukan sesuai kebutuhan dan dilakukan bertahap.
- Master frame masih tetap menggunakan master yang lama sampai dilakukannya updating frame.

6. Aplikasi Clustering BS2020

Aplikasi Clustering BS adalah aplikasi berbasis web yang dibuat khusus untuk memudahkan pengguna dalam melakukan *clustering* dan *numbering* BS dari SLS/non SLS sehingga menghasilkan peta Blok Sensus. Pada aplikasi ini, pengguna dapat menggunakan menu upload peta SLS/non SLS yang akan di-*clustering*, menggabungkan SLS/non SLS yang berdekatan menjadi satu BS sesuai dengan syarat ketentuan pembentukan BS (*clustering*), memberikan nomor pada BS hasil *clustering* (*numbering*), verifikasi (monitoring), dan pemberian informasi muatan dominan pada BS hasil penomoran.

Masalah/kendala yang terjadi terkait aplikasi adalah:

- Adanya error saat melakukan upload peta pada aplikasi Clustering BS2020 karena adanya *self intersection* pada poligon yang di-*upload*.
- Basemap Google pada aplikasi menyebabkan proses loading semakin lama.
- Belum adanya monitoring progress, akses login khusus petugas mitra, informasi blok sensus yang mengalami keanehan.

- Terdapat perbedaan alur pada aplikasi sehingga daerah yang tidak diakui oleh wilayah manapun tidak bisa diproses pada aplikasi Clustering BS2020.

Strategi dan mitigasi yang dilakukan dalam mengatasi kendala adalah sebagai berikut:

- Perbaikan dilakukan oleh kabupaten/kota dan pada sistem ditambahkan fungsi untuk mengecek ke-valid-an geometri yang diupload.
- Menambahkan fitur menghilangkan basemap pada aplikasi untuk penggunaan kuota internet sehingga proses loading lebih cepat.
- Menambahkan fitur monitoring, fitur login mitra, fitur menampilkan BS yang mengalami keanehan.
- Penambahan fitur untuk pengolahan wilayah yang tidak diakui oleh wilayah manapun.

7. Aplikasi SP2020-IDSLS

Aplikasi SP2020-IDSLS digunakan untuk mengidentifikasi wilayah SLS pada kegiatan Rakor tingkat kecamatan dalam kegiatan SP2020. Dalam aplikasi ini, dapat dilakukan penambahan perbaikan pada SLS/non SLS pasca Rakor Kecamatan (Rakorcam). Perbaikan atau perubahan yang dapat dilakukan melalui aplikasi ini adalah:

- Perbaikan atau perubahan nama SLS,
- Perubahan untuk menggabungkan SLS, dan
- Penambahan SLS baru.

Masalah atau kendala dalam aplikasi ini adalah:

- Database master SLS yang tidak kompatibel dengan database aplikasi
- Aplikasi lambat karena database yang cukup besar
- Aplikasi tidak dapat digunakan kasus-kasus khusus, misal SLS yang pindah desa.
- Terdapat inkonsistensi pada rekap data untuk SLS yang pindah desa.

Strategi yang dilakukan dalam mengatasi kendala adalah:

- Perlu adanya konversi data agar database master dapat digunakan.
- Untuk performa database yang lebih baik dilakukan indexing pada database
- Fitur ditambahkan pada aplikasi untuk mengatasi kebutuhan yang dinamis atau untuk kasus-kasus khusus.
- Masalah inkonsistensi rekap data, dilakukan penggantian status secara manual pada SLS yang pindah desa.

8. Pembuatan sistem pelayanan “Geospatial API”

Sistem pelayanan Geospatial API dibuat untuk menyediakan service data peta BPS berupa API. Dalam sistem ini, disediakan menu pembuatan token API untuk dapat mengakses data geospasial yang dibutuhkan.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Dalam pembuatan token API terdapat rentang waktu secara default
- Data yang bersifat privat dapat dikonsumsi pengguna jika tidak dibatasi penggunaannya.
- Token API yang di-generate tidak bisa digunakan untuk mengambil data dari server geoportal.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Menambahkan pilhan waktu expired token paling lama 3 bulan.
- Menambahkan fitur internal untuk dapat mengakses data privat dan men-generate token setiap 60 menit sekali.
- Mengganti alamat request token API agar bisa digunakan untuk pengambilan data.

9. Pembuatan aplikasi Dashboard WebGIS administrator

WebGIS Administrator digunakan untuk melihat statistik dari website WebGIS BPS yang dapat diakses melalui https://sig.bps.go.id. Tujuan dibuat aplikasi ini adalah untuk menyajikan kepada publik berbagai informasi yang terkait dengan kerangka wilayah kerja statistik, peta, dan data. Beberapa fitur yang disediakan dari WebGIS Administrator adalah:

- Melihat jumlah unique visitor, visitor by IP, dan total hits pada WebGIS BPS
- Melihat jumlah pengunjung per hari
- Melihat distributor browser yang digunakan user
- Melihat distribusi operating system yang digunakan user
- Melihat asal link kunjungan dari user dan link yang sering dikunjungi user.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Pengguna salah interpretasi dalam memahami informasi pada web
- Data visitor menjadi anomali karena banyak permintaan yang ‘unknown’
- Data rekap/laporan yang tidak bisa diambil sewaktu-waktu

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Menambahkan penjelasan mengenai informasi pada tampilan web.
- Menghilangkan visitor yang memiliki informasi ‘unknown’
- Membuat fitur untuk men-download laporan sesuai rentang waktu yang dipilih.

10. Pengembangan Geospatial System (GS)

Geospatial System dibangun untuk mendukung proses bisnis SBFA (*Statistical Business Framework and Architecture*) yang berkaitan dengan fungsi Geospatial System dan saling terintegrasi dengan sistem lainnya di lingkungan BPS. Di tahun 2020, penyempurnaan sistem telah dilakukan seperti penerapan SSO, modifikasi modul rekap, dsb. Sistem sudah digunakan BPS kabupaten/kota, Provinsi, dan Pusat untuk kegiatan pembentukan Blok Sensus. Adanya GS sangat bermanfaat dalam:

- manajemen data geospasial
- memudahkan dalam mengakses data geospasial baik dalam raw data maupun service API (Application Programming Interface)
- memudahkan dalam memonitor progress dan kualitas data Geospasial yang dikirimkan BPS Kabupaten/Kota
- memudahkan mekanisme approval berjenjang terhadap data Geospasial yang dikirimkan BPS Kabupaten/Kota
- memudahkan sistem lain untuk mengakses data Geospasial dalam bentuk service API.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Kebutuhan GS yang dinamis.
- Kebutuhan storage yang sangat besar.
- Kurangnya SDM dalam pengembangan.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Penambahan fasilitas atau fitur disesuaikan dengan prioritas dan dilakukan secara bertahap.
- Perlu ada diskusi lebih lanjut dengan Subdirektorat Jaringan Komunikasi Data mengenai storage.
- Adanya penambahan SDM dari SIS (PBD) sebagai tim developer.

11. Pengembangan Aplikasi Wilkerstat berbasis mobile

Aplikasi Wilkerstat merupakan aplikasi berbasis android yang digunakan untuk membantu petugas lapangan dalam mengenali wilayah kerjanya, mengambil titik koordinat (geotagging) dan foto suatu landmark atau infrastruktur, dan dapat juga melakukan monitoring petugas lapangan.

Aplikasi Wilkerstat sudah dibangun sejak 2018. Di tahun 2019, Aplikasi Wilkerstat digunakan untuk kegiatan pemutakhiran peta wilkerstat yang dilaksanakan oleh seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) kabupaten/kota. Di tahun 2020, Aplikasi Wilkerstat dikembangkan berbasis mobile untuk kegiatan statistik pariwisata yang dilaksanakan oleh seksi Statistik Distribusi, yaitu untuk

updating direktori pariwisata, survei hotel tahunan, survei restoran UMB, dan survei usaha makan minum UMK.

Dalam kegiatan survei pariwisata, hasil geotagging lokasi jasa pariwisata yang direkam dengan aplikasi wilkerstat akan memperoleh kode unik ID willkerstat. Kode tersebut harus diinput ke aplikasi web entri bersamaan dengan isian kuesioner. Aplikasi web entri akan mengakses service ke aplikasi wilkerstat untuk memastikan ID wilkerstat tersebut terdaftar.

Aplikasi Wilkerstat juga digunakan untuk proses listing survei restoran (VREST). Selain untuk geotagging, aplikasi digunakan untuk mengisi isian variabel-variabel pertanyaan listing. Namun. Aplikasi Wilkerstat tidak didesain untuk kuesioner elektronik.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

- Kurangnya pengetahuan atau pemahaman seksi Statistik Distribusi mengenai penggunaan aplikasi wilkerstat terutama terkait pendaftaran user ke aplikasi mengingat pelatihan tidak maksimal (dilakukan secara online).
- Dari segi prosesnya, ID wilkerstat banyak yang tidak ditemukan saat dilakukan proses entri, padahal ID tersebut ditemukan dalam database.
- Oleh karena aplikasi wilkerstat tidak didesain untuk kuesioner elektronik maka tidak ada proses validasi di setiap variabel pertanyaan listing. Sehingga, saat penarikan sampel data dari aplikasi wilkerstat tersebut tidak bisa langsung digunakan.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

- Untuk mempermudah komunikasi antar dua seksi/bagian, seksi IPDS kabupaten/kota diminta untuk membantu menyelesaikan masalah pendaftaran user.
- Perubahan coding program dilakukan di web entry untuk memasukkan ID wilkerstat.
- Melakukan koreksi dan perapihan secara manual menggunakan Excel sebelum dikirimkan untuk proses pengambilan sampel.

3.1.2. Capaian Kinerja Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020

Peningkatan Peran Pelayanan Statistik Terpadu dalam Mendukung Sistem Statistik Nasional

Secara umum kinerja Direktorat Diseminasi Statistik menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 106,06 persen.

Sasaran 1. Meningkatkan pelayanan metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus

Sasaran pertama yaitu meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dicapai oleh Subdirektorat Rujukan Statistik. Tahun 2020, Subdit Rujukan Statistik memiliki 10 (sepuluh) indikator kinerja, dimana capaian rata-rata subdit Rujukan Statistik sebesar 102,26 persen.

Tabel berikut ini menyajikan capaian indikator kinerja tahun 2020 yang merupakan tolok ukur keberhasilan Subdit Rujukan Statistik.

Tabel 9. Capaian Kinerja Sasaran 1 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah usulan RKA aktivitas Rujukan Statistik	RKA	1	2	200,00
Jumlah sistem pendukung rujukan statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara	Sistem	4	4	100,00
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar yang dihimpun	Metadata	100	141	141,00
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Metadata	2.000	3.577	178,85
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	Metadata	2.100	3.693	175,86
Jumlah dokumen SKD yang dihimpun	Dokumen	16.820	18.385	109,30
Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu	Publikasi/ Laporan	2	2	100,00

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah publikasi/laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN	Publikasi/ Laporan	1	1	100,00
Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Instansi	15	10	66,70
Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	Instansi	15	10	66,70

Realisasi/pencapaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Subdit Rujukan Statistik adalah:

1. Jumlah usulan RKA aktivitas Rujukan Statistik

   Jumlah usulan RKA pada tahun 2020 adalah sebanyak 2 (dua) usulan yaitu pada komponen Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus dan komponen Peningkatan Penyelenggaraan SSN. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan sama dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 100 persen.

2. Jumlah sistem pendukung rujukan statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara

   Pada tahun 2020, Subdit Rujukan Statistik berhasil mengembangkan 4 (empat) sistem pendukung meliputi: (i) Sistem Rujukan Statistik (SIRUSA), (ii) Aplikasi SKD Online 2020, (iii) Aplikasi Romantik Online, dan (iv) Metadata Management System (MMS). Disamping itu ada 1 (satu) aplikasi lagi yang sebenarnya dipelihara oleh Subdir Rujukan Statistik yaitu Aplikasi Dokumentasi Pembinaan Statistik. Capaian ini sesuai dengan target 2020. Indikator ini baru menjadi indikator kinerja Subdir Rujukan Statistik sejak tahun 2020, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar yang dihimpun

   Pada tahun 2020, Subdit Rujukan Statistik berhasil menghimpun 141 metadata kegiatan statistik dasar. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100 metadata kegiatan statistik dasar, maka pencapaian dari sasaran ini mencapai 120 persen. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2019.

4. Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun

   Pada tahun 2020, jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang telah dihimpun sebesar 3577 metadata. Penghimpunan metadata kegiatan ini mencakup penghimpunan di

tingkat BPS Pusat melalui Subdir Rujukan Statistik, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 2000 metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus, maka pencapaian dari indikator kinerja ini mencapai 120 persen. Capaian ini sama dengan capaian tahun sebelumnya (2019).

5. Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam SIRUSA

   Pada tahun 2020, jumlah metadata kegiatan statistik yang masuk di SIRuSa sebanyak 3693 metadata kegiatan statistik. Angka ini mencakup metadata kegiatan statistik yang diinputkan oleh BPS Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 2100 metadata kegiatan statistik, maka pencapaian dari indikator kinerja ini adalah sebesar 120 persen. Capaian ini sama dengan capaian pada tahun 2019 (120 persen).

6. Jumlah dokumen SKD yang dihimpun

   Pada tahun 2020, jumlah dokumen SKD yang berhasil dihimpun sebanyak 18.385 dokumen. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, yaitu 16.820 dokumen, maka pencapaian dari indikator kinerja ini mencapai 109,3 persen. Persentase pencapaian ini mengalami kenaikan sebesar 3 persen jika dibandingkan tahun 2019 (106,3 persen).

7. Jumlah publikasi yang terbit tepat waktu

   Pada tahun 2020 jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu adalah sebanyak 2 (dua) publikasi yaitu Analisis Hasil SKD 2020 dan Laporan Sistem Statistik Nasional (SSN) 2020. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka pencapaian dari indikator kinerja ini adalah sebesar 100 persen. Namun capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2019, karena indikator ini tidak menjadi indikator kinerja Subdit Rujukan Statistik pada tahun 2019.

8. Jumlah publikasi/laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN

   Pada tahun 2020 jumlah publikasi/laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN adalah sebanyak 1 (satu) publikasi. Publikasi tersebut adalah Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data 2020 yang merupakan laporan hasil pelaksanaan SKD 2020. Apabila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, maka pencapaian dari indikator kinerja ini adalah sebesar 100 persen. Capaian indikator ini sama dengan capaian tahun 2019.

9. Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik

   Jumlah instansi yang mendapatkan rekomendasi dari BPS di tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) instansi. Jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 15, maka pencapaiannya hanya 66,67 persen. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 (120 persen). Hal ini disebabkan karena sedikitnya instansi yang memberitahukan rancangan kegiatan statistiknya

ke BPS. Pada tahun 2020, capaian indikator ini hanya memperhitungkan instansi yang berasal dari pemerintah pusat saja (Kementerian/Lembaga), tanpa memperhitungkan capaian yang ada di tataran pemerintah daerah (OPD). Konsep capaian indikator 2020 ini berbeda dengan konsep capaian 2019 yang juga memperhitungkan capaian di tingkat pemerintah daerah.

10. Jumlah Instansi yang telah Menindaklanjuti Rekomendasi

    Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi dari BPS di tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) instansi. Jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 15, maka pencapaiannya hanya 66,67 persen. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 (120 persen). Salah satu penyebabnya karena adanya pandemi di 2020 menyebabkan banyak Kementerian/Lembaga yang membatalkan penyelenggaraaan kegiatan statistiknya. Capaian indikator ini di tahun 2020 hanya memperhitungkan instansi yang berasal dari pemerintah pusat saja (Kementerian/Lembaga), tanpa memperhitungkan capaian yang ada di tataran pemerintah daerah (OPD). Sementara itu, capaian 2019 memperhitungkan capaian di tingkat pemerintah daerah, sehingga ada perbedaan konsep capaian indikator antara tahun 2019 dan 2020.

Sasaran 2. Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi

Sasaran kedua yaitu peningkatan kualitas dan layanan publikasi dicapai oleh Subdirektorat Rujukan Statistik. Tahun 2020, Subdit Rujukan Statistik memiliki 8 (delapan) indikator kinerja, dimana capaian rata-rata Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sebesar 102,58 persen.

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian indikator kinerja tahun 2020 yang merupakan tolak ukur keberhasilan Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik.

Tabel 10. Capaian Kinerja Sasaran 2 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Usulan RKA aktivitas Publikasi dan Kompilasi Statistik	RKA	1	1	100,00
Jumlah sistem pendukung layanan publikasi dan kompilasi statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara	Sistem	4	4	100,00
Jumlah permohonan perwajahan publikasi statistik yang dilayani	Layanan	250	250	100,00

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah publikasi statistik ARC yang terbit tepat waktu	Publikasi/ Laporan	14	15	107,14
Jumlah publikasi statistik yang sudah sesuai standar	Publikasi/ Laporan	15	16	106,67
Jumlah Publikasi/Laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN	Publikasi/ Laporan	15	16	106,67
Jumlah Publikasi/Laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN	Naskah	97	97	100,00
Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi publikasi statistik	Laporan	24	24	100,00

Realisasi/pencapaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik adalah sebagai berikut:

1. Jumlah usulan RKA aktivitas Publikasi dan Kompilasi Statistik

   Jumlah usulan RKA pada tahun 2020 adalah sebanyak satu usulan. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2019, tidak terdapat perbedaan capaian kinerja karena sudah maksimal yaitu 100 persen.

2. Jumlah sistem pendukung layanan publikasi dan kompilasi statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara

   Pada tahun 2020, Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik berhasil memelihara 4 (empat) sistem pendukung meliputi:

   a. Sistem Portal Publikasi, digunakan untuk mendukung proses penerbitan publikasi dan terintegrasi dengan wesite BPS melalui Web API BPS.
   b. Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Publikasi Statistik (SIMOTIK), digunakan untuk melakukan monitoring proses penerbitan publikasi.
   c. Sistem Manajemen Berita Resmi Statistik (SIMBRS), digunakan untuk mendukung proses penyusunan naskah Berita Resmi Statistik.
   d. Sistem Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI) diimplementasikan di tahun 2019 dengan fokus mengatasi konsistensi data pada publikasi Statistik Indonesia dengan Daerah Dalam Angka.

   Capaian ini sesuai dengan target 2020 yaitu dengan capaian 100 persen. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2019, capaian tahun 2020 ini lebih rendah karena di tahun

2019 capaian kinerja indikator ini mencapai 120 persen. Realisasi pengembangan/pemeliharaan sistem di tahun 2019 lebih banyak dibandingkan target yang telah ditetapkan di awal tahun, karena ada kegiatan pengembangan dan implementasi sistem baru (SIMDASI).

3. Jumlah permohonan perwajahan publikasi statistik yang dilayani

   Capaian indikator ini di tahun 2020 adalah sebesar 100 persen, Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sudah melayani semua permohonan perwajahan yang masuk dari subject matter, meliputi permohonan pembuatan kover publikasi, layouting publikasi, dan pembuatan infografis pembatas publikasi. Selain itu, terdapat permintaan desain lainnya seperti pembuatan standing banner, backdrop kegiatan, booklet informal (tanpa ISBN), infografis data-data tertentu seperti data pangan, data hasil pengolahan big data maupun laporan pimpinan. Indikator ini baru menjadi indikator kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sejak tahun 2020, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Jumlah publikasi statistik ARC yang terbit tepat waktu

   Capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 107,14 persen. Jumlah publikasi statistik ARC yang terbit tepat waktu tahun 2020 adalah sebanyak 15 publikasi. Lebih besar dari target yang telah ditentukan sebanyak 14 publikasi. Hal ini dikarenakan adanya publikasi ARC tambahan sebagai upaya percepatan rilis publikasi Statistik Indonesia, yaitu publikasi Statistik Indonesia, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan. Capaian ini lebih besar dari capaian pada tahun 2019 (100 persen).

5. Jumlah publikasi statistik yang sudah sesuai standar

   Capaian indikator ini di tahun 2020 adalah sebesar 106,67 persen. Dari target sebanyak 15 publikasi, berhasil diterbitkan sejumlah 16 publikasi statistik yang sudah sesuai standar, yang terdiri dari 15 publikasi ARC dan 1 publikasi Non-ARC. Indikator ini baru menjadi indikator kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sejak tahun 2020, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Jumlah Publikasi/Laporan statistik yang memiliki ISSN/ISBN

   Pada tahun 2020, Capian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 106,67 persen. Dari target sebanyak 15 publikasi, berhasil diterbitkan sejumlah 16 publikasi statistik yang memiliki ISSN/ISBN, yang terdiri dari 15 publikasi ARC dan 1 publikasi Non-ARC. Capaian ini lebih kecil dibandingkan capaian pada tahun 2019 (114,29 persen). Hal ini dikarenakan di tahun 2019, terdapat beberapa publikasi ad-hoc yang diterbitkan (booklet Hasil SE2016 Lanjutan) sehingga

capaiannya juga lumayan tinggi. Sementara di tahun 2020, realisasi tidak terlalu jauh melebihi target, artinya penentuan target sudah tepat.

7. Jumlah pengelolaan BRS yang tepat waktu

   Pada indikator ini capaian sudah sesuai dari target yang telah ditetapkan yaitu realisasi mencapai 100 persen dari target capaian kinerja tahun 2020. Indikator ini baru menjadi indikator kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sejak tahun 2020, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

   Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi publikasi statistik

8. Pada tahun 2020, capaian kinerja untuk indikator jumlah laporan pemantauan dan evaluasi publikasi statistik sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu realisasi mencapai 100 persen dari target capaian kinerja tahun 2020. Indikator ini baru menjadi indikator kinerja Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik sejak tahun 2020, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sasaran 3. Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Promosi Statistik

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian indikator kinerja tahun 2020 yang merupakan tolok ukur keberhasilan Subdit Layanan dan Promosi Statistik.

Tabel 11. Capaian Kinerja Sasaran 3 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah usulan RKA aktivitas Layanan dan Promosi Statistik	RKA	1	1	100,00
Jumlah sistem layanan dan promosi statistik yang dikembangkan dan/atau dipelihara	Sistem	7	7	100,00
Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen	Aktivitas	6.000	5.196	86,60
Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS	Persen	88	90,41	102,74
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui Website	Pengunjung	2.000.000	5.646.831	282,34
Jumlah satker yang memiliki Website yang terhubung secara online	Satker	549	549	100,00

Realisasi/pencapaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Subdit Layanan dan Promosi Statistik adalah:

1. Jumlah usulan RKA aktivitas Layanan dan Promosi Statistik

   Jumlah usulan RKA pada tahun 2020 adalah sebanyak 1 (satu) usulan. Hal ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2019, tidak terdapat perbedaan karena capaian sudah maksimal yaitu 100 persen.

2. Jumlah sistem pendukung Layanan dan Promosi Statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara

   Pada tahun 2020, jumlah sistem layanan dan promosi statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara terdiri dari 8 (delapan) sistem yaitu Website BPS, Allstat, webdash, Sistem Layanan Statistik (Silastik), Website sensus, portal pertukaran data/Transdata, search engine, dan aplikasi MTSM. Secara jumlah, sistem layanan dan promosi statistik yang dikembangkan dan atau meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2020 mencapai 114,29 persen.

3. Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen

   Secara absolut jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen terdapat kecenderungan penurunan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan sudah semakin banyak data dan informasi yang disajikan melalui Website BPS yang dapat diakses secara mandiri oleh konsumen, sehingga jumlah layanan langsung cenderung mengalami penurunan. Namun Secara persentase pencapaian dari indikator kinerja ini meningkat jika dibandingkan tahun 2019.

4. Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS

   Tahun 2020, persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS sebesar 90,41 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak konsumen yang puas akan layanan data BPS.

5. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui Website

   Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui Website BPS setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, pengunjung Website BPS adalah sebanyak 5.646.831 pengunjung unik. Jumlah ini meningkat sebesar 81,08 % dari tahun 2019 yang hanya 3.118.501 pengunjung unik. Awal tahun 2020 merupakan masa pandemi yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih untuk mengakses informasi melalui Website dibandingkan dengan mengunjungi layanan konsultasi maupun perpustakaan BPS secara langsung.

6. Jumlah satker yang memiliki Website yang terhubung secara online

Jumlah satker yang memiliki Website yang terhubung secara online meningkat sebanyak 36 satker. Sehingga pada tahun 2020, pencapaian dari indikator kinerja ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 549 satker (100 persen).

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja Subdit Layanan dan Promosi Statistik pada tahun 2020 terhadap target capaian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun mencapai 101,56 persen.

Sasaran 4. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Capaian kinerja Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik tahun 2020 mengalami peningkatan dari 97,31 persen pada tahun 2019 menjadi 102,86 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh indikator jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen dan persentase konsumen yang puas akan layanan statistik mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan, Adapun penetapan target pada tahun 2020 lebih kecil dari tahun 2019 karena ada penyesuaian dengan kondisi pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada proses pelayanan. Penyesuaian tersebut sebagaimana tertuang pada rencana strategis 2020-2024 yang disahkan pada Juli 2020.

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian indikator kinerja tahun 2019 yang merupakan tolak ukur keberhasilan Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik.

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran 4 Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah usulan RKA aktivitas Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik	RKA	2	2	100,00
Jumlah sistem pendukung layanan untuk diseminasi data dan informasi statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara	Sistem	2	2	100,00
Jumlah Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang menggunakan sistem aplikasi perpustakaan	Unit PST	35	35	100,00
Jumlah aktivitas layanan terhadap konsumen	Aktivitas	1.000	1.044	104,40
Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik	Persen	90,00	98,61	123,26

Realisasi/pencapaian tahun 2020 untuk masing-masing indikator kinerja pada Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik adalah:

1. Jumlah usulan RKA aktivitas Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik

   Sejak tahun 2019, Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik mengelola RKA sebanyak 2 (dua) usulan yaitu RKA untuk Rupiah Murni dan Peningkatan Pelayanan (PNBP). Kondisi tersebut terjadi juga pada tahun 2020, terget usulan RKA sebanyak 2 (dua) usulan dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Capaian tersebut sama dengan capaian kinerja pada tahun 2019.

2. Jumlah sistem pendukung layanan untuk diseminasi data dan informasi statistik yang dikembangkan dan atau dipelihara

   Sejak tahun 2017, Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik mengembangkan sistem pendukung yaitu PST-Desktop (Offline) menjadi PST-Online. PST-Online ini dapat diakses dengan cara datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS seluruh Indonesia, sehingga koleksi pustaka pada wilayah tertentu dapat diakses di wilayah lain. Untuk layanan online yang dapat diakses tanpa datang langsung disediakan melalui aplikasi Online Public Access Catalogue (OPAC) yang memberikan layanan informasi katalog/metadata koleksi pustaka/publikasi BPS. PST-Online dan OPAC pada prinsipnya sama, hanya ada perbedaan pada beberapa fitur disesuaikan dengan pemanfaatannya.

   Pada tahun 2020, OPAC dikembangkan dengan mengintegrasikan terhadap seluruh aplikasi layanan di PST pada Website pst.bps.go.id. Bersamaan dengan proses integrasi tersebut, OPAC dikembangkan dengan menambahkan fitur akses softcopy pustaka/publikasi dari fitur sebelumnya yang hanya memberikan informasi katalog pustaka/publikasi saja.

   Satu sistem aplikasi lagi dikembangkan pada tahun 2020, yaitu inovasi.bps.go.id sebagai upaya optimaliasai pengelolaan inovasi di BPS seluruh Indonesia untuk mendukung program kerja BPS yang disenergikan dengan program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas.

   Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020 sebesar 100 persen, Capaian tersebut sama dengan capaian kinerja pada tahun 2019 yang mengelola satu sistem saja.

3. Jumlah Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang menggunakan sistem aplikasi perpustakaan

   Sejak PST-Online di-launching pada tahun 2018, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada unit PST Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui kegiatan pembinaan kegiatan perpustakaan pada tahun yang sama. Implementasi PST-Online terus diupayakan secara bertahap dan berkelanjutan di setiap PST Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sejak adanya Website pst.bps.go.id yang mencakup seluruh layanan di PST, maka PST-Online diubah namanya menjadi aplikasi perpustakaan, agar

lebih jelas nomenklaturnya sesuai fungsi masing-masing. Pada tahun 2020, aplikasi perpustakaan sudah diimplementasikan di seluruh unit PST Provinsi, dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 100 persen. Indikator kinerja ini baru diukur pada periode rencana strategis 2020-2024.

4. Jumlah aktivitas layanan terhadap konsumen

   Pada tahun 2020, Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik menurunkan target kinerja indikator ini dibandingkan tahun 2019 karena adanya perubahan orientasi pengguna data dalam mendapatkan pelayanan dari layanan langsung menjadi layanan online. Sedangkan layanan di perpustakaan sebagaian besar dapat diperoleh malalui layanan langsung. Untuk menjawab kebutuhan pengguna data, maka pada tahun 2020 ini layanan perpustakaan mulai berbenah dengan mengoptimalkan pemberian layanan online yaitu menambahkan fitur akses softcopy pustaka/publikasi dari fitur sebelumnya yang hanya memberikan informasi katalog pustaka/publikasi saja. Sehingga capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020 meningkat menjadi 104,40 persen dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2019 yang sebesar 79,87 persen.

5. Persentase konsumen yang puas akan layanan statistik

   Pada tahun 2020, Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik menurunkan target kinerja indikator ini dibandingkan tahun 2019 karena adanya perubahan proses bisnis layanan sebagai adaptasi dimasa pandemi covid-19. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020 berhasil melebihi target yaitu sebesar 102,86 persen. Hal ini sebagai dampak dari upaya perbaikan layanan perpustakaan yaitu pengembangan layanan online melalui Website pst.bps.go.id sehingga semakin luas jangkauan layanan yang bisa diberikan kepada pengguna data. Capaian kinerja tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 106,70, hal ini disebabkan layanan offline tutup karena kondisi pandemi covid-19 kemudian dialihkan ke layanan online namun kondisi ini belum optimal bisa disosialisasi kepada pengguna data sehingga belum banyak pengguna data yang mengakses layanan online.

3.1.3. Capaian Kinerja Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2020

Direktorat SIS secara umum mendukung seluruh kegiatan yang dijalankan BPS untuk mencapai visinya. Namun secara spesifik Direktorat SIS mendukung sasaran Deputi Bidang MIS yaitu terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal dan Transformasi Digital untuk membangun *Smart* BPS. Untuk mengukur kinerja Direktorat dalam menjawab sasaran tersebut, digunakan Indeks Kepuasan Layanan TI dengan target 75 Poin.

Indeks kepuasan Layanan TI tersebut merupakan rangkuman dari indikator-indikator kinerja Direktorat SIS sebagai terjemahan aktifitas Direktorat SIS untuk mencapai tujuan khususnya dan visi BPS pada umumnya. Banyaknya aktifitas Direktorat SIS dituangkan dalam bebeapa sasaran strategis. Dimana setiap sasaran strategis diberikan indikator penilaian dan target kinerjanya. Kinerja tersebut merupakan hasil pengukuran Kinerja DIrektorat SIS dan dinilai kesesuaiannya dengan target kinerja Direktorat SIS yang merupakan keadaan atau kondisi yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat SIS.

Secara lebih rinci sasaran kinerja Direktorat SIS adalah sebagai berikut:

Sasaran 1. Tersedianya *platform* data *hub* yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan SDI.

Dalam rangka mewujudkan sistem layanan TI yang berkualitas dan prima, Direktorat SIS berperan dalam melakukan Pengembangan Sistem Informasi, Rekayasa Informatika dan pengelolaan TI yang handal dalam mendukung tersedianya *platform* data *hub* yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mendukung SDI. Kegiatan ini diukur dengan Jumlah koleksi data yang dipertukarkan dengan Kementrian/Lembaga lain. Disamping itu, kegiatan ini juga didukung dengan kegiatan lainnya yaitu: (i) penambahan koleksi data dalam sistem katalog data *micro* sebagai bahan baku dalam pertukaran data, (ii) jumlah penambahan koleksi data sensus survei yang dihimpun dan (iii) pengembangan sistem atau layanan yang mendukung *Digital Governance* untuk memastikan bahwa *tools* dibangun selaras dengan rencana transformasi *digital* yang digagas Direktorat SIS.

- ✓ **Jumlah koleksi data yang dipertukarkan dengan Kementrian/ Lembaga lain**

  Untuk mendukung SDI, Direktorat SIS menyiapkan *platform* data *hub* sebagai *tools* untuk pertukaan data antar instansi. Tahun 2020, *platform* ini telah dimanfaatkan untuk mendukung pertukaran data eKTP untuk keperluan SP2020 dengan Direktorat Jendral

Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri dan rencana pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial dengan Kementrian Sosial. *Platform* ini juga akan dimanfaatkan untuk memfasilitasi peningkatan pertukaran data ekspor impor yang telah dilakukan selama ini, rencana pertukaran data pajak dan juga pertukaran data *ecommerce*.

- ✓ **Penambahan koleksi data dalam sistem katalog data mikro.**

  Koleksi dalam sistem Katalog data mikro menyimpan data sekaligus metadatanya dan diperoleh dari hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh BPS maupun kompilasi. Per Januari 2021, Sistem Katalog Data mikro memiliki 321 dataset dan 419 kutipan dimana metadatanya dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris (masih ada sebagian metadata yang belum diterjemahkan ke Bahasa Inggris). Jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai data yang masuk ke dalam repositori data di Ditrektorat SIS.

- ✓ **Jumlah penambahan koleksi data sensus survei yang dihimpun**

  Pasca-pengolahan sensus/survei, s*ubject matter* mempunyai kewajiban untuk menyerahkan data dan metadata nya kepada Subdit PTI. Subdit PTI memiliki *repository* data untuk menyimpan hasil rilis data sensus/survei beserta kelengkapan dokumentasi mencakup kuesioner, *layout* data yang berisi metadata variabel dan buku pedoman. *Repository* di Subdit PTI terdiri dari *filebased storage* dan *Relational Data base Management System*. Koleksi pada *repository* Subdit PTI sampai dengan 2020 adalah 210 data. Sedangkan jumlah data yg dihimpun pada tahun 2020 sebanyak 65 dataset.

  Jumlah penambahan koleksi data yang dihimpun melebihi 100 persen. Artinya, penerimaan data dari *subject matter* berjalan dengan lancar, pihak *subject matter* lebih cepat dalam memberikan data dan dokumentasi sensus/survei kepada Subdit PTI.

- ✓ **Jumlah sistem atau layanan yang dikembangkan untuk mendukung *Digital Governance***

  Disamping pengembangan *platform* data *hub*, dikembangkan juga berbagai sistem pendukung, yaitu sistem informasi PTI terkait dengan pengelolaan data dan sistem informasi IPD terkait deng akuisisi data.

  - **Jumlah Sistem informasi PTI yang dibuat/dikembangkan/ dipelihara**

    Subdit PTI mengembangkan sistem informasi mencakup Sistem Katalog Data Mikro dan SIMDATA untuk pengelolaan data dan metadata serta Layanan *Disclosure Control* untuk mendukung diseminasi data.

    Secara garis besar metadata yang ditampilkan di Sistem Katalog Data Micro terdiri dari informasi kegiatan sensus/survei, deskripsi variabel-variabel dari data, dokumentasi kegiatan seperti kuesioner, pedoman, ataupun laporan. Dalam

sistem ini, pengguna data dapat mencari, membandingkan, dan jika ada kesesuaian dapat mengakses dan mengunduh data tergantung kebijakan akses untuk masing-masing data. Metadata dari dataset – dataset yang dikirimkan *subject matter* ke Subdit PTI dibuat mengikuti standar DDI (*Data Document Initiative*). Sedangkan untuk datasetnya disimpan dalam suatu *repository* data yang kemudian akan diproses untuk dikirimkan ke Subdit Layanan dan Promosi Statistik. Selain data dan metadata, Sistem Katalog Data Mikro juga berfungsi untuk mengelola dokumen yang terkait dengan data seperti kuesioner, pedoman, dan lain – lain. Setiap dataset juga dihubungkan dengan kutipan (*citation*) dari publikasi/jurnal/buku hasil dari penelitian-penelitian yang menggunakan data tersebut.

SIMDATA mencatat perkembangan data meliputi penerimaan, permintaan dan pengeluaran data. Sistem ini juga merekam kelengkapan dan repositori data serta target *Advance Release Calendar* untuk tiap data.

Layanan *Disclosure Control* mencakup penghilangan variable/kolom yang tidak boleh didiseminasikan dan penghilangan identitas. Aturan Anonimisasi dan *Confidentiality* tiap survey dan sensus berbeda. Terbagi menjadi dua basis yaitu survei/sensus berbasis rumah tangga dan survei/sensus berbasis Perusahaan. Pada tahun 2020 terdapat 23 survei/sensus yang telah dilakukan proses anonimasi dan *confidentiality*.

- **Jumlah Sistem informasi IPD dibuat/dikembangkan/dipelihara**

Data statistik yang dikumpulkan dan dihasilkan oleh BPS dikelola dalam sistem atau layanan pengumpulan/akuisisi data yang dikembangkan untuk mendukung *Digital Governance. Digital Governance* merupakan arah kegiatan Direktorat SIS yang ingin mengintegrasikan seluruh layanan TI untuk penyelenggaraan kegiatan Statistik Nasional dan meningkatkan peran SIST dalam mendukung SSN. Tujuannya adalah agar kegiatan statistik dapat berjalan dengan baik dan cepat karena hasil pengumpulan data dapat langsung diolah lebih lanjut untuk kemudian didiseminasikan

Selama tahun 2020, Direktorat SIS sudah membangun 134 program aplikasi untuk kegiatan statistik dari target total 10 program. Sistem atau layanan yang dikembangkan dimaksudkan untuk menghasilkan *output* data yang akurat, handal dan terpercaya.

Tabel 13. Tingkat Pencapaian Tersedianya Platform Data Hub Yang Atraktif, Kolaboratif Dan Terpercaya Untuk Mewujudkan Satu Data Indonesia Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya *platform* data *hub* yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan SDI	Jumlah koleksi data yang dipertukarkan dengan Kementrian/Lembaga lain*	2	2	100
		Jumlah sistem atau layanan yang dikembangkan untuk mendukung *Digital Governance*	10	13	130

*: Indikator Kinerja Utama

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel di atas,

i) Untuk mendukung terwujudnya platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan SDI, diperlukan konten atau data yang menjadi obyek yang akan mengalir dalam platform tersebut. Untuk tahun 2020 dilakukan pertukaran data menggunakan platform ini yaitu data e-KTP dari Dirjen adminduk dan data export impor dari beacukai.

ii) tingkat pencapaian dalam terciptanya jumlah sistem informasi pengelolaan TI yang dibuat/dikembangkan/ dipelihara melebihi 100 persen. Jumlah penambahan koleksi data dalam sistem katalog data mikro mencapai 100 persen. Artinya, penerimaan data dari *Subject Matter* berjalan dengan lancar, pihak *subject matter* cepat dalam memberikan data dan dokumentasi sensus/survei kepada Subdit PTI.

iii) tingkat pencapaian dalam terlaksananya pengembangan sistem informasi dan rekayasa informatika dalam mendukung tersedianya *platform* data *hub* yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan SDI menunjukkan kinerja yang berhasil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa persentase realisasi kinerja ada yang mencapai 100 persen dan ada yang melebihi 100 persen.

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal.

- ✓ **Meningkatnya kualitas layanan TI untuk aspek aksesibilitas, kemudahan dan kecepatan pelayanan dengan dukungan Tata Kelola TI**
  - **Indeks Kepuasan layanan TI**
    - ✓ **Persentase Permintaan Akses data yang ditindaklanjuti**

Kebutuhan pegawai BPS untuk bekerja secara *mobile* (dari luar kantor) dengan mengakses berbagai sumber daya TI yang terdapat di jaringan kantor difasilitasi dengan layanan Personal *Virtual Private Network* (VPN). Dengan adanya

layanan personal VPN, pegawai yang berada di jaringan publik (internet) dapat mengakses perangkat TI, sistem, maupun data yang terdapat di jaringan *Local Area Network* (LAN) kantor secara aman. Layanan ini menggunakan teknologi untuk membangun terowongan (*tunnel*) VPN di atas jalur internet. Setiap pegawai mendapatkan akses yang berbeda-beda sesuai dengan hak akses dan permintaannya. Dengan demikian, dapat dipastikan keamanan pengguna ketika mengakses data maupun sistem/aplikasi yang terdapat di jaringan BPS. Pada tahun 2020, terdapat 59 permintaan Layanan Personal VPN yang dipenuhi sehingga Persentase Permintaan Akses data yang ditindaklanjuti sebesar 100%.

- ✓ **Persentase Permintaan *Video Conference* yang ditindaklajuti**

Layanan vicon merupakan layanan komunikasi antara kantor BPS Pusat, BPS Provinsi, Politeknik STIS, dan Pusdiklat menggunakan perangkat vicon dan melalui jaringan *VPN* yang telah terpasang. Dengan layanan ini, koordinasi antara Pusat dan Daerah dapat dengan mudah dilakukan melalui pertemuan virtual, terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Selain efisien, intensitas komunikasi dengan unit organisasi BPS di daerah dapat semakin ditingkatkan. Pada layanan vicon juga terdapat fitur *web-vicon* untuk bergabung dengan vicon melalui *web* dan fitur *live streaming* melalui VPN.

Kegiatan vicon rutin diselenggarakan setiap awal bulan dan pertengahan bulan untuk keperluan *press release* dengan pihak wartawan dan jurnalis. Selain kegiatan rutin, layanan vicon digunakan sesuai permintaan untuk koordinasi kegiatan BPS. Pada tahun 2020, BPS telah menyelenggarakan kegiatan vicon dengan berbagai tema sebanyak 54 kali sesuai dengan permintaan. Dengan demikian Persentase vicon yang ditindaklajuti sebesar 100%.

- ✓ **Persentase Permintaan Alokasi *Storage* yang ditindaklanjuti**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, unit kerja memerlukan tempat penyimpanan file dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk berbagi pakai dengan pengguna lain. Kebutuhan ini difasilitasi dengan Layanan *File Share Storage/Spool*. Unit kerja dapat menentukan siapa saja pegawai yang berhak mengakses *spool* tersebut. Permintaan Alokasi Akses *Storage* dapat mencakup permintaan untuk hak akses, penambahan alokasi *storage* yang sudah ada, dan permintaan alokasi *storage* yang baru. Sebelum permintaan alokasi *storage* dipenuhi dilakukan identifikasi untuk menentukan berapa besar alokasi *storage* yang dibutuhkan. Pada tahun 2020 terdapat 32 permintaan Layanan *File Share*

Storage/Spool. Persentase Permintaan Alokasi *Storage* yang ditindaklajuti sebesar 90% sesuai dengan target yang telah ditentukan

- ✓ **Jumlah Permintaan Penyusunan Sistem informasi/aplikasi pengolahan yang ditindaklajuti**

  Direktorat SIS, khususnya Subdit IPD memberikan pelayanan pengolahan data berbagai sensus dan survei yang diselenggarakan oleh BPS yang meliputi pembuatan dan pengembangan program pengolahan data untuk dapat meningkatkan kualitas data. Terwujudnya data yang berkualitas dan tepat waktu tentunya membutuhkan komitmen dari berbagai pihak termasuk unit kerja terkait dalam pengolahan data yaitu *subject matter*. Koordinasi dengan *subject matter* harus terus dibina dan ditingkatkan. Selain itu strategi yang tepat dalam pengolahan data, dapat mendorong terwujudnya data yang berkualitas. Dengan terpusatnya pelayanan pembuatan program pengolahan data pada Subdit IPD, maka volume pekerjaan menjadi meningkat. Volume pekerjaan yang demikian besar dan harus selesai dalam waktu yang relatif singkat serta dalam waktu yang cenderung bersamaan seringkali menyebabkan terjadinya beberapa kesalahan dalam proses pengolahan data, untuk meminimalisir kesalahan perlu dilakukan *testing* terhadap semua program atau aplikasi yang sudah dibangun. *Testing* aplikasi juga melibatkan *subject matter* sebagai penanggung jawab konten suatu survei, untuk memastikan konsistensi yang diaplikasikan ke dalam program sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh *subject matter* sebelum aplikasi tersebut di-*release*.

- ✓ **Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu**

  Terwujudnya data yang berkualitas dan tepat waktu merupakan salah satu komitmen BPS untuk memberikan layanan terbaik bagi pemerintah. Sejalan dengan visi dan misi Direktorat SIS adalah pengguna mendapatkan manfaat dan layanan TI BPS yang prima dan inovatif secara aman, efektif, terpercaya dan handal. Demi mewujudkan data yang berkualitas dan tepat waktu. Oleh karena itu hasil pengolahan data sensus dan survei yang dikirimkan secara tepat waktu ke BPS Pusat menjadi salah satu indikator penting untuk mewujudkan komitmen tersebut, agar data yang dihasilkan oleh BPS menjadi masukan bagi pemerintah untuk pengambilan kebijakan.

- ✓ **Persentase Peserta pelatihan pengolahan yang layak bertugas**

  Untuk mendapatkan data yang berkualitas dan tepat waktu, diperlukan operator pengolahan yang berkompeten dan handal. Untuk mendapatkan operator seperti itu diperlukan adanya pelatihan pengolahan secara berjenjang, mulai dari pelatihan innas, inda hingga pelatihan pengolahan untuk operator. Untuk itu persentase peserta pelatihan pengolahan yang layak bertugas menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan data yang berkualitas dan tepat waktu.

- ✓ **Jumlah Buku Pedoman pengolahan yang disusun/ disempurnakan**

  Untuk memastikan bahwa kualitas pengolahan data dapat terjaga, maka Direktorat SIS menyusun buku pedoman pengolahan dan menyelenggarakan pelatihan pengolahan agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengolahan dapat menggunakan sistem informasi/aplikasi pengolahan data dengan baik. Secara umum buku pedoman pengolahan bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai fitur pada aplikasi pengolahan. Secara khusus, buku pedoman pengolahan bertujuan membantu para petugas pengolahan dalam melakukan instalasi program pengolahan, pengoperasian aplikasi entri data, menu pendukung dan report hasil entri data. Dengan diselenggarakannya pelatihan dengan menggunakan buku pedoman pengolahan, kegiatan pengolahan diharapkan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat waktu. Selama Tahun 2020, Direktorat SIS sudah membuat sebanyak 15 buku pedoman dari target sebanyak 15 buku pedoman pengolahan yang disusun atau disempurnakan.

- ✓ **Persentase pemenuhan layanan TI yang sesuai dengan *Service Level Agreement* (Survei Kepuasan Layanan TI HaloSIS secara keseluruhan: 90%)**

  Perbaikan layanan TI merupakan salah satu dari dua jenis pelayanan yang diberikan Direktorat SIS kepada para pengguna layanan TI selain pemenuhan permintaan layanan TI. Perbaikan layanan TI yang mengalami gangguan/insiden yang sudah tertangani sesuai kesepakatan tingkat layanan atau *Service Level Agreement* (SLA) mengindikasikan bahwa pelayanan perbaikan yang dilakukan oleh Direktorat SIS dilakukan secara prima, fokus, dan konsisten, sehingga tidak mengalami keterlambatan dalam penanganannya dan tidak melampaui batas waktu pelayanan yang ditetapkan dalam SLA. Selain perbaikan layanan TI, pemenuhan kebutuhan layanan TI juga merupakan proses yang ditetapkan SLA-nya secara ketat. Penentuan SLA didasarkan kepada kesepakatan antara penyedia

jasa layanan TI dalam hal ini adalah Direktur SIS dengan *subject matter* terkait. SLA yang ditentukan merupakan tingkat kesepakatan yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak untuk mewujudkan kelancaran dan efisiensi dalam penyediaan/penanganan layanan TI.

Kegiatan pemeliharaan/perawatan perangkat keras dilakukan secara *On Call Maintenance*, dimana bila terjadi kerusakan pada perangkat keras maka biaya Jasa dan penggantian suku cadang harus diadakan oleh penyedia layanan pemeliharaan/perawatan secara penuh bila masih tersedia dana di anggarannya. Penggunaan metode *On Call Maintenance* di tahun 2020 ini ditujukan untuk penghematan biaya pemeliharaan perangkat keras karena anggaran hanya terpakai untuk perangkat keras yang rusak dan memerlukan pemeliharaan saja. Sedangkan jika pemeliharaan dilakukan dengan metode *All Risk Maintenance*, maka biaya pemeliharaan sesuai dengan penawaran yang diberikan oleh penyedia layanan *maintenance*, tidak tergantung pada jumlah perangkat keras yang rusak atau memerlukan pemeliharaan.

Untuk menjamin proses pemeliharaan/perawatan berjalan cepat, penyedia jasa wajib membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan/perawatan untuk setiap jenis barang/perangkat dalam jangka waktu sebagai berikut:

- Maksimal 3 hari kerja meliputi jenis pekerjaan diagnosis dan perbaikan tanpa penggantian suku cadang;
- Maksimal 7 hari kerja kalender meliputi jenis pekerjaan diagnosis den perbaikan yang membutuhkan penggantian suku cadang;
- Maksimal 14 hari kalender meliputi jenis pekerjaan diagnosis dan perbaikan yang membutuhkan penggantian suku cadang khusus untuk perbaikan *Notebook, printer* dan *personal computer* tipe khusus serta *Scanner*.

Pada tahun 2020 Pemeliharaan Komputer, *notebook, Printer* dan alat pendukung lainnya dilaksanakan dalam 3 tahap dengan total perangkat keras yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 266 unit, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap 1 sebanyak 101 unit,
- Tahap 2 sebanyak 102 unit,
- Tahap 3 sebanyak 63 unit.

Nilai persentase pemenuhan layanan TI sesuai SLA sebesar 90% dari total pelayanan yang telah diberikan sepanjang tahun 2020 diperoleh dari capaian yang terukur dari hasil Survei kepuasan layanan TI berikut riwayat pencatatan tiket yang masuk melalui Pusat Layanan TI HaloSIS. Nilai realisasi ini sesuai target yang sudah ditetapkan di awal tahun sehingga dapat dikatakan bahwa persentase realisasi dari pelaksanaan kegiatan pealyanan ini sebesar 100%.

Tabel 14. Tingkat Pencapaian Peningkatan Kualitas Layanan TI Untuk Aspek Aksesibilitas, Kemudahan Dan Kecepatan Pelayanan Dengan Dukungan Tata Kelola TI Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal	Indeks Kepuasan layanan TI*	75	75	100
		Jumlah penambahan koleksi data sensus survei yang dihimpun	20	65	325
		Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu	96	96	100
		Persentase perbaikan sarana TI yang sesuai dengan SLA	90	90	100

*: Indikator Kinerja Utama

✓ **Tersedianya pengelolaan layanan TI yang handal dengan dukungan sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal**

JKD merupakan salah satu penunjang keberhasilan BPS dalam menyediakan akses informasi statistik dengan cepat. Berbagai macam teknologi dimanfaatkan untuk menunjang kebutuhan BPS membangun JKD dengan BPS Daerah, DRC, Kementerian/Lembaga di luar BPS, dan dengan jaringan publik. Untuk menghubungkan BPS Pusat, BPS Provinsi, Pusdiklat dan Politeknis STIS dimanfaatkan teknologi VPN sehingga dapat mempercepat proses pengiriman data dan menjamin keamanan datanya. Koneksi VSAT disediakan untuk BPS Kabupaten yang belum terjangkau koneksi kabel fiber optik. Koneksi Metro *Ethernet* untuk menghubungkan DC dan DRC. Koneksi *Ekstranet* dimanfaatkan untuk pertukaran data dengan Kementerian/Lembaga lain. Selain itu juga terdapat koneksi internet pengguna yang dimanfaatkan pegawai BPS

dalam mencari informasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya, koneksi internet *server* yang dimanfaatkan untuk memberikan akses kepada pengguna data terhadap data statistik secara *online* yang tesimpan dalam DC, dan koneksi internet DRC untuk akses DRC.

Kegiatan statistik yang dilakukan BPS mulai dari pengumpulan data sampai dengan diseminasi data memerlukan dukungan TI. Infrastruktur TI yang memiliki peran penting yaitu DC yang mampu menyediakan layanan sistem informasi/aplikasi dan media penyimpanan yang sangat besar. Oleh karena itu dibutuhkan DC yang andal yang mampu menangani proses pengolahan, penyimpanan, dan diseminasi data statistik. *Server*, *storage*, dan perangkat jaringan yang merupakan sarana pokok di DC perlu dijaga keandalannya agar dapat bekerja secara optimal. Perangkat-perangkat tersebut memerlukan perawatan secara rutin baik perawatan untuk pencegahan kerusakan maupun perawatan atau perbaikan perangkat-perangkat yang telah mengalami kerusakan.

Layanan-layanan BPS, terutama layanan untuk publik, harus selalu terjaga untuk dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Penggunaan teknologi di DC BPS memungkinkan untuk menjaga layanan-layanan tersebut tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi permasalahan pada *server* yang menjalankannya. Namun masih terdapat risiko permasalahan lain seperti bencana alam, kebakaran dsb, dapat menyebabkan DC tidak dapat beroperasi, sehingga menyebabkan seluruh layanan BPS ke publik juga tidak dapat dijalankan. Melihat kondisi bahwa BPS memerlukan media alternatif yang dapat dijalankan sewaktu-waktu terjadi permasalahan pada DC, serta telah tersedianya infrastruktur TI yang berada di *DRC*, maka pada tahun 2020 dilakukan kegiatan pemeliharaan perangkat-perangkat TI maupun infrastruktur pendukungnya baik di DC maupun DRC.

- ✓ **Persentase *uptime* layanan jaringan komunikasi data (99%)**

  Selama tahun 2020, layanan jaringan komunikasi data dengan berbagai jenis koneksi yang digunakan dapat beroperasi dengan baik untuk mendukung berbagai kegiatan di BPS dengan persentase *uptime* layanan sebesar 99%.

- ✓ **Persentase pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir (75%)**

  Selama tahun 2020, Direktorat SIS terus melakukan pembangunan sistem sebagai tindak lanjut dari pembangunan sistem yang telah dilakukan pada tahun 2019. Agar dapat membuat sistem yang lebih baik dalam menunjang proses bisnis utama, Direktorat SIS juga melakukan pengkajian dan dan perancangan sistem dan aplikasi infrastruktur

statistik. Hasil kajian dan perancangan ini digunakan dalam mengembangkan SIST, yang terdiri dari:

1. *DMS* adalah sistem untuk pengelolaan data dan repositori. Diharapkan DMS dapat menjadi *single source of truth* di BPS sehingga dapat menjadi solusi atas permasalahan data *silo* yang selama ini terjadi.
2. *ICS* adalah sistem yang memfasilitasi multimode data *collection* termasuk perancangan kuesioner dan manajemen survei.
3. *IPAS* adalah sistem yang memfasilitasi pemrosesan dan analisis data yang terintegrasi.
4. *MAS* merupakan sistem yang digunakan untuk mengotomasi fungsi-fungsi terkait pemanfaatan data makro dan penyusunan neraca nasional serta analisis terhadapnya. Untuk tahun 2019, MAS berfokus pada *Supply and Use Table* dan *Full Sequence Account.*
5. *GS* merupakan sistem yang bertujuan untuk mengelola data spasial yang dimiliki oleh BPS, yaitu peta *digital* dan *landmark*.
6. *FRS* adalah sistem yang dibuat untuk menunjang optimalisasi perencanaan kegiatan statistik yang berkesinambungan, khususnya terkait dengan metodologi yang dibantu dengan teknologi terkini untuk mewujudkan penyajian data berkualitas secara efektif dan efisien.
7. *IDS* merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola produk statistik BPS, seperti *website* dan perpustakaan.
8. *MMS* adalah sistem yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan metadata baik yang dihasilkan maupun yang digunakan dalam *Statistical Business Framework and Architecture*.
9. *ITSM* merupakan sistem pelayanan TI untuk menerima pencatatan dan penanganan terhadap segala bentuk laporan gangguan atau insiden TI dan/atau menerima dan memenuhi segala bentuk laporan permintaan TI. Konsep yang digunakan pada ITSM adalah pelayanan terintegrasi atau satu pintu. Fungsinya adalah untuk mengintegrasikan laporan dan solusi tentang gangguan layanan, permintaan layanan, maupun permintaan perubahan terhadap layanan TI dari pengguna ke Direktorat SIS.
10. *DEA* merupakan sebuah alat yang dapat digunakan sebagai *gateway* dalam melaksanakan transformasi *digital*. Implementasi digital pada tahun 2020, BPS berfokus pada pemanfaatan EA dalam mengintegrasi survei-survei BPS yang

berbasis usaha *(Business Product Class)* serta mendukung survei terintegrasi melalui *Economic Wide Survey (EWS).*

11. *OMS* adalah sistem yang dibuat untuk mewujudkan kolaborasi yang baik antar pegawai maupun mitra, dan dapat mengintegrasikan pengelolaan kegiatan, jadwal, informasi, dan dokumen yang ada di BPS.

Adapun untuk kegiatan dengan indikator Persentase pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir mencakup pembangunan DMS, ICS, IPS, MAS, GS, FRS, IDS, MMS, ITSM, DEA, dan OMS) diberikan target 75% dan tercapai sesuai target.

- ✓ **Persentase sistem TI yang menerapkan standar pembangunan sistem (100%)**
  - **Persentase pengembangan TI BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir** *(Jumlah: 75% secara kuantitas modul sistemnya, namun penerapan standar pembangunan sistemnya sudah 100%, mengikuti standar yang ditetapkan)*

    Standar pembangunan sistem secara umum yang mengikuti standar keilmuan antara lain adalah *Waterfall* dan *Agile*. Dua jenis standar ini selain sudah umum digunakan oleh para perancang dan pembangun sistem dalam menciptakan produk sistem informasi, juga telah dijabarkan dalam dokumen *Strategy and Design IT* yang sudah disusun Direktorat SIS pada tahun 2018. Dokumen ini mensyaratkan tentang pembangunan sistem yang mengikuti standar pembangunan menggunakan *agile* dan *waterfall* sembari memberikan deskripsi detil tahapan proses pembangunan melalui dua metode tersebut. Dua metode ini dinyatakan dalam dokumen karena merupakan standar yang umum digunakan oleh pengembang sistem informasi di Direktorat SIS sehingga dirasa perlu untuk didokumentasikan dan distandarisasi meskipun belum menjadi dukungan hukum yang legal tetapi secara umum sudah diterima dan diimplementasikan di lingkungan Direktorat SIS.

    Implementasi *Waterfall* maupun *Agile* bisa dilihat dari evaluasi pembangunan sistem inforamasi yang berlangsung sepanjang tahun 2020 diketahui bahwa semua proses pembangunan mengikuti standar umum yang berlaku tersebut. Hal ini mensyaratkan bahwa tim perancang dan pembangun sistem informasi sudah mengikuti kaidah yang umum berlaku dalam pembangunan sistem. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan sistem informasi yang telah berlangsung sepanjang tahun 2020 ini telah mengikuti standar pembangunan sistem yang berlaku.

  - **Jumlah sistem informasi PTI yang dibuat/dikembangkan/ dipelihara**

Pada tahun 2020 Subdit PTI juga sedang membangun aplikasi *Backoffice* Selindo, yang nantinya akan digunakan oleh seluruh BPS Seluruh Indonesia. Pengelolaan, pengawasan, dan pemberdayaan pegawai memerlukan informasi kepegawaian yang lengkap, cepat dan akurat. Untuk itu, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) beserta pengelolaan databasenya sangat diperlukan. SIMPEG harus dapat membantu biro Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya dan dapat memberikan informasi terkait kepegawaian kepada pegawai BPS. Dari tahun 2015 SIMPEG sudah dapat diakses secara *online* dan dapat diakses oleh seluruh pegawai BPS, tentunya dengan pengaturan dalam pemberian hak akses. Sudah dilakukan migrasi database dan file arsip kepegawaian ke *server* baru untuk meningkatkan performa aplikasi. Selain itu, ditambahkan pula mekanisme replikasi dan pemeliharaan pada *database* lama untuk menjaga kesesuaian data kepegawaian pada aplikasi pendukung SIMPEG. Kemudian sebagai wujud dukungan terhadap kegiatan statistik, subdit PTI juga membantu unit kerja dalam pembuatan program atau aplikasi berbasis *web* seperti SIMPEG *Online*, Presensi *Online*, Baperjakat *Online*, TK *Online*, SIM Perundang-undangan, SKP Online, Monev *upload*, PPID, Sijafung dsb., serta untuk aplikasi desktop seperti Sistem *Backoffice*, Sistem *Backoffice*. Realisasi penambahan sistem tahun ini 64 sistem, dengan tingkat standar pengembangan sistem mencapai 100 persen.

- **Jumlah Sistem informasi IPD dibuat/dikembangkan/dipelihara**

  Selama tahun 2020, Subdit IPD terus melakukan pembangunan sistem sebagai tindak lanjut dari pembangunan sistem yang telah dilakukan pada tahun 2019. Agar dapat membuat sistem yang lebih baik dalam menunjang proses bisnis utama. Serangkaian tahapan tata laksana (*business process*) kegiatan pengolahan perlu ditentukan untuk dapat meminimalisir beberapa kesalahan setiap kegiatan pengolahan data sensus dan survei. Tahapan tata laksana yang dilakukan meliputi perencanaan kegiatan yang mencakup pembagian kerja *programmer*, standarisasi pembuatan dan pengembangan program, dsb; kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan yang meliputi pengembangan perencanaan dan menguji potensi solusi; pengecekan dan evaluasi yang dimaksudkan untuk mengukur seberapa efektif pengujian solusi sebelumnya dan menganalisis apakah langkah tersebut dapat ditingkatkan; serta tahap implementasi yaitu *deployment* program pengolahan data yang berpedoman pada pengolahan data yang berkelanjutan.

- ✓ **Persentase pengadaan barang dan jasa TI yang akuntabel (100%)**

Pengadaan perangkat keras merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan perangkat keras pada unit kerja BPS untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan BPS. Pada tahun 2020, pengadaan perangkat keras di BPS diperuntukkan untuk mendukung kebutuhan kegiatan pengolahan SP2020, peremajaan perangkat keras, dan mendukung kelancaran kegiatan *work from home*. Berikut rincian pengadaan perangkat keras yang dilakukan pada tahun 2020:

1. Pendukung kegiatan SP2020, yaitu pengadaan *Desktop Personal Computer* (PC) beserta *UPS*-nya sebanyak 548 unit yang dialokasikan untuk unit kerja di BPS Pusat dan 12 kantor BPS Provinsi yang masih kekurangan perangkat Desktop PC.
2. Peremajaan perangkat keras, terdiri dari:
   a. Pengadaan *Desktop PC All In One* sebanyak 132 unit yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pejabat struktural dan kegiatan pelayanan di BPS.
   b. Pengadaan *Printer* warna sebanyak 17 unit yang dialokasikan untuk unit kerja BPS Pusat.
3. Pendukung kegiatan *Work From Home*, terdiri dari:
   a. Pengadaan *Tablet* beserta pengadaan *Book Cover Keyboard* sebagai perangkat pendukungnya sebanyak 10 unit yang dialokasikan untuk struktural tinggi BPS.
   b. Pengadaan *Laptop* sebanyak 7 unit yang dialokasikan untuk struktural tinggi BPS.

- **Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi**

Pada tahun 2020, dikarenakan adanya penghematan anggaran, kegiatan pengadaat perangkat pengolah data dan komunikasi tidak dapat dilakukan.

- **Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan**

Tidak ada kegiatan pengadaan pengolah data dan komunikasi yang dilakukan pada tahun 2020 sehingga persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan sebesar 0%.

- **Jumlah dokumen pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi**

Tidak ada dokumen pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dikarenakan tidak adanya pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang dilakukan pada tahun 2020.

Tabel 15. Tingkat Pencapaian Terlaksananya Pengelolaan Layanan TI yang Handal dengan Dukungan Sistem Terintegrasi dan Jaringan Komunikasi yang Handal Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal	Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir*	75	75	100
		Persentase uptime layanan jaringan komunikasi data	99	99	100
		Persentase sistem TI yang menerapkan standar pembangunan sistem	100	100	100
		Persentase pengadaan barang dan jasa TI yang akuntabel	100	100	100

*: Indikator Kinerja Utama

Sasaran 3. Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka transformasi *digital*.

✓ **Persentase keselarasan strategi bisnis dan TI***

Strategi TI adalah keseluruhan rencana yang terdiri dari tujuan, prinsip, dan taktik yang berkaitan dengan pemanfaatan TI dalam organisasi. Dalam menyusun strategi TI terutama di era revolusi industri 4.0 saat ini perlu penyelarasan dengan strategi organisasi dalam mencapai tujuan bisnisnya. Salah satu alat yang digunakan BPS dalam menyelaraskan strategi TI dan bisnis adalah Digital EA (DEA). DEA menyediakan informasi dari layer visi, bisnis, data, aplikasi serta teknologi yang saling berelasi. Dengan mengetahui kondisi *real* dari organisasi saat ini, kita bisa mengetahui di bagian mana pada organisasi kita yang tidak efektif dan efisien terutama keselarasan antara strategi TI dan bisnis.

Dalam upaya penyelarasan strategi TI dan bisnis dengan DEA telah dilakukan beberapa hal seperti: penggambaran Renstra BPS dan penyelarasan Renstra Direktoat SIS dengan Renstra BPS, melihat peluang integrasi survei berbasis usaha BPS yang menjadi salah satu masukan dalam mendesain EWS, serta memberikan dukungan bagi tim Business *Process Reengineering* (BPR). Keseluruhan kegiatan telah dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

Dari sisi kebijakan, tentu kita membutuhkan dasar hukum dalam menjalankan proses penyelarasaan strategi TI dan bisnis tersebut. Beberapa kebijakan terkait TI telah disusun mulai dari Transformasi Digital, Tata Kelola DEA, dan Tata Kelola *Agile Project Management* (APM). Draft kebijakan-kebijakan tersebut dalam saat ini sedang dalam proses reviu internal BPS. Setelah proses reviu internal selesai, kebijakan-kebijakan tersebut akan segera dilakukan harmoninasi ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

Tabel 16. Tingkat Pencapaian Terwujudnya Keselarasan Strategi TI dan Bisnis dengan Digital EA Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
3	Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka transformasi digital	Persentase keselarasan strategi bisnis dan TI*	100	100	100

*: Indikator Kinerja Utama

Secara keseluruhan target dari Terwujudnya Keselarasan Strategi TI dan Bisnis dengan Digital EA telah berhasil dicapai terutama dalam hal penyelarasan melalui implementasi Digital EA (100%), sedangkan upaya penyelarasan strategi TI dan Bisnis melalui kebijakan masih dalam proses internal reviu oleh BPS (75%).

- ✓ **Terwujudnya Tata Kelola TI yang terstandardisasi, terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi kepada pengguna**
  - ✓ **Jumlah Dokumen STATCAP CERDAS Bidang TI yang terbit tepat waktu (4 dokumen: 1 laporan tahunan dan 3 SOP)**
    - **Jumlah Dokumen Transformasi TI yang terbit tepat waktu (Jumlah 1: Dokumen laporan pelaksanaan STATCAP CERDAS)**

      Dokumen Laporan Pelaksanaan STATCAP-CERDAS berisi laporan perjalanan implementasi 2018-2020. Pada Tahap Implementasi 2018 – 2020, dengan adanya pembiayaan dari APBN, tim pelaksana STATCAP-CERDAS kembali melanjutkan kegiatannya. Di saat yang sama, Bidang TIK melakukan perubahan pada skema pembangunan sistemnya, dari pendekatan *waterfall* menjadi *agile*.
    - **Jumlah Laporan Perancangan Data *Management* (Jumlah 1: Laporan Implementasi DMS)**

Laporan Implementasi DMS berisi perjalanan implementasi DMS 2019-2010. Terdapat beberapa modul utama DMS yang dirancang di tahun 2019, yaitu *Enterprise Data Lake* (EDL), *Data Warehouse* (DWH), *Extract, Transform, Load* (ETL), *Data Exploration Tool*, *Metadata Management*, *Role Management System*, dan *API Tool*. Sebagian besar modul DMS tersebut terjawab dengan *Commercial off-the-shelf* (COTS) *solution* sehingga perlu konfigurasi dan eksplorasi. Selain itu, pembangunan aplikasi builtin tetap dilakukan untuk menjawab requirement yang tidak terdapat dalam COTS *solution*. Untuk pengembangan tahun 2020, Modul yang menjadi prioritas yaitu EDL, DWH, ETL, *Metadata Adjudication* (bagian dari *metadata management*), *Data Exploration Tool*, DMS *User-Interface* (komponen *built-in* dari DMS).

- ✓ **Jumlah SOP yang dikembangkan (Jumlah 3: SOP HaloSIS, SOP *Learning Management System* (*eLearning*), dan SOP *Knowledge Management System (KMS*)**
  a. SOP halosis berisi Standar Operasional Pemanfaatan aplikasi HaloSIS dalam *Call Center* Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dan Penggunaan *dashboard* HaloSIS untuk memantau perkembangan kegiatan *Call Center* SP2020.
  b. SOP LMS berisi Standar Operasional Pemanfaatan Aplikasi LMS. April 2020, BPS memutuskan untuk membangun LMS. *E-learning* BPS pertama kali dipakai untuk pelatihan petugas Survei Pendataan Restoran pada bulan Juni 2020. Selain itu, *E-Learning* versi publik pertama kali digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) SP2020.
  c. SOP KMS berisi Standar Operasional Aplikasi KMS. KMS di BPS telah diimplementasikan dan mulai digunakan dalam pelenggaraan SP2020. Sistem ini digunakan untuk menyimpan semua permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan SP2020. Dengan KMS, petugas sensus dapat mencari terlebih dahulu permasalahan yang muncul di KMS.

- ✓ ***Performance & IT Risk Management Metrics* (100%)**
  - **Risiko Pengolahan Data SP2020**

    Direktorat SIS melaksanakan kegiatan manajemen risiko TI pada penyelenggaraan pengolahan SP2020 yang melibatkan 4 area risiko TI, yaitu

aplikasi, proses pengadaan, infrastruktur aplikasi, dan serangan keamanan. Risiko yang telah diidentifikasi meliputi risiko aplikasi SP2020 *Online* (SPO) tidak tersedia tepat waktu, proses pengadaan *hardware* gagal atau terlambat, infrastruktur aplikasi SPO tidak bisa digunakan, dan serangan keamanan pada server aplikasi SPO.

1. Risiko aplikasi SPO tidak tersedia tepat waktu

   Risiko ini disebabkan oleh kebutuhan aplikasi yang tidak jelas dengan kemungkinan terjadi adalah tinggi (skala 4), kebutuhan aplikasi yang berubah-ubah dengan kemungkinan terjadi adalah sangat tinggi (skala 5), dan *programmer* cuti atau sakit dengan kemungkinan terjadi adalah jarang atau kecil (skala 2). Tindakan pencegahan (*preventif*) yang dapat dilakukan adalah Rapat koordinasi antara unit pembuat aplikasi dengan *subject matter* dan dibentuk tim *programmer*. Dampak dari terjadinya risiko ini adalah aplikasi SPO yang digunakan masih belum final dengan kemungkinan terjadi dampak adalah menengah (skala 3), fitur aplikasi SPO yang berubah-ubah saat sudah digunakan dengan kemungkinan terjadi dampak adalah kecil (skala 2), dan pembangunan aplikasi SPO terhambat dengan kemungkinan terjadi dampak adalah sedang (skala 3). Tindakan perbaikan (*korektif*) adalah melakukan instalasi perbaikan saat aplikasi sudah digunakan.

2. Proses pengadaan *hardware* gagal atau terlambat,

   Risiko ini disebabkan oleh penyusunan KAK pengadaan tidak tepat waktu dengan kemungkinan terjadi adalah sedang (skala 3) dan tidak mendapatkan calon penyedia yang sesuai dengan kemungkinan terjadi adalah kecil (skala 2). Tindakan pencegahan (*preventif*) yang dapat dilakukan adalah diskusi intens untuk menyusun KAK dan Kebutuhan pengadaan yang sesuai dengan ketersediaan pasar. Dampak dari terjadinya risiko ini adalah waktu pengadaan menjadi sedikit dengan kemungkinan terjadi dampak adalah menengah (skala 3) dan tidak ada atau sedikit penyedia yang ikut pengadaan dengan kemungkinan terjadi dampak adalah besar atau tinggi (skala 4).

3. Infrastruktur aplikasi SPO tidak bisa digunakan,

   Risiko ini disebabkan oleh versi server baru tidak *compatible* dengan *environment* yang ada dengan kemungkinan terjadi adalah kecil (skala

2) dan terjadi kerusakan *environment DC* dengan kemungkinan terjadi adalah kecil (skala 2). Tindakan pencegahan (*preventif*) yang dapat dilakukan adalah versi *hardware* baru disesuaikan dengan *environment* yang ada dan *monitoring* keadaan D*C* secara berkala. Dampak dari terjadinya risiko ini adalah menjadi temuan BPK terkait utilisasi *hardware* dengan kemungkinan terjadi dampak adalah besar (skala 4) dan data *center* tidak bisa operasional dengan kemungkinan terjadi dampak adalah besar atau tinggi (skala 4).

4. Serangan keamanan pada server aplikasi SPO

   Risiko ini disebabkan oleh penggunaan *hacking tool* dengan kemungkinan terjadi adalah tinggi (skala 4), beberapa fitur keamanan belum diaktifkan dengan kemungkinan terjadi adalah kecil (skala 2), dan proses autentifikasi yang mudah dengan kemungkinan terjadi adalah besar atau tinggi (skala 4). Tindakan pencegahan (*preventif*) yang dapat dilakukan adalah pengujian keamanan sistem secara menyeluruh dan proses autentifikasi dibuat kompleks. Dampak dari terjadinya risiko ini adalah *server* mati dan database *corrupt* untuk ketiga penyebab resiko yang telah teridentifikasi tersebut dengan masing-masing kemungkinan terjadi dampak adalah sama-sama sedang (skala 3). Tindakan perbaikan (*korektif*) adalah penyediaan *redundant server* dan melakukan *backup database*.

Tabel 17. Tingkat Pencapaian Terwujudnya Tata Kelola TI Yang Terstandardisasi, Terintegrasi, Berkelanjutan, Dan Berorientasi Kepada Pengguna Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
3	Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka transformasi digital	Jumlah Dokumen Statcap Cerdas Bidang TI yang terbit tepat waktu	4	4	100
		Performance & IT Risk Management Metrics	100	100	100

Dari kegiatan manajemen risiko pengolahan SP2020, Direktorat SIS telah berhasil mengidentifikasi 4 area resiko TI yang disertai dengan penyebab dan skala kemungkinan terjadi penyebab. Selanjutnya, telah berhasil ditentukan juga tindakan pencegahan (*preventif*) untuk masing-

masing penyebab risiko tersebut. Kemudian, dampak dari masing-masing resiko TI juga telah diidentifikasi lengkap dengan skala kemungkinan terjadi dampak. Terakhir, tindakan perbaikan (*korektif*) yang perlu dilakukan untuk beberapa resiko TI juga sudah ditentukan. Dengan demikian, dari seluruh resiko TI yang telah diidentifikasi pada kegiatan pengolahan SP2020 telah berhasil ditentukan penyebab, dampak, tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan dengan baik untuk masing-masing resiko TI atau pencapaian indikator penyusunan matrik kinerja risiko TI ini mencapai 100%.

- ✓ **Terwujudnya transformasi digital untuk membangun BPS yang *Smart* dan *Agile***
  - ✓ **Jumlah inovasi TI yang mendukung Transformasi Digital (10)**
- o **Jumlah *kajian dan perancangan sistem dan aplikasi infrastruktur statistik*** *(Jumlah: 10, kajian untuk sistem Core dan Enable: ICS, IPAS, MAS, IDS, FRS, GS, DMS, MMS, INDAH, LMS)*

  Pada tahun 2020 Direktorat SIS melakukan kajian atas 10 Sistem Infomasi/Aplikasi yang mendukung transformasi proses bisnis pada implementasi Transformasi Digital. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pembangunan Sistem Informasi yang berakhir pada akhir Tahun 2019. Dalam upaya implementasi oleh pengguna, maka dilakukan kegiatan kajian dan perancangan sistem dan aplikasi infrastruktur statistik, untuk memastikan bahwa sistem sudah memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang terus berubah. Perubahan kebutuhan bisnis tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan kajian dan perancangan sistem dan aplikasi infrastruktur statistik yang meliputi :

  a. *ICS*

     Pengkajian dan perancangan ICS 2020 dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan SPOnline menggunakan *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI), *Post Enumeration Survey* SP2020, Penjaminan Kualitas (PK) SP2020, Survei Dampak Covid 19, Konfirmasi Pendataan SP2020, KPPT, *Passenger Exit Survey* 2020, Pendataan Wilayah Khusus SP2020, Penggunaan KMS dalam mendukung SP2020, SITASI 2020 (Ekonomi, KOR, MPA, Pemutakhiran), Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi Barang (SKTNPB), Survei Khusus Triwulanan Necara Produksi Jasa (SKTNPJ), Survei Ubinan Padi 2020, Survei VHTL 2020, Survei Wisatawan Nasional 2020, Survei Wisatawan Nusantara 2020, *Updating* Direktori PIPA 2020, *Updating* Podes 2020, Verifikasi Sentra Industri 2020, serta VREST20_UMK

  b. *IPAS*

     Kajian dan Perancangan *IPAS* yang mencakup pengembangan Modul yaitu *data integration, derivation system, tabulation system, analysis method, data visualization,*

versioning management, user access management, data access management, project access management, dan *internal data management.*

c. *MAS*

Kajian dan perancangan MAS tahun 2020 mencakup :

1. Implementasi *Modul Macro Data Management* untuk mendukung penyediaan data makro sebagai data dasar penyusunan neraca dari level nasional dan regional yang dilakukan oleh satuan kerja di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.
2. Implementasi Modul *Dashboard* Data dan Indikator Makro telah diimplementasikan untuk membantu dalam memonitor keadaan data dan fenomena makro level nasional dan regional.
3. Pengembangan Modul SUT dan FSA untuk membantu proses penyusunan SUT dan FSA.
4. Pemanfaatan *Big Data* dari Laporan Perusahaan yang tergabung dalam Bursa Saham IDX.

d. *GS*

Kajian dan perancangan GS pada tahun 2020 mencakup:

1. Dukungan terhadap kegiatan pembentukan Blok Sensus 2020
2. Dukugan pada kegiatan updating peta jika dibutuhkan
3. Pengembangan *service* yang diguanakan pada SITASI

e. *DMS*

Kajian dan Perancangan DMS tahun 2020 mencakup dukungan terhadap *Web* SP2020 dan *implementasi Big Data* yang mencakup:

1. Perbaikan/*redesign* arsitektur DMS
2. Penyiapan *Environment Development* 2020,
3. Mendukung implementasi *Web* SP2020 melalui pengembangan rancangan *data warehouse*/*data mart*, melakukan ETL, menyiapkan API untuk akses *data warehouse*, *maintain* data dan *maintain* API,
4. Mendukung Implementasi *big data* yang mencakup migrasi data dari *big query* ke *hadoop*, *requirement gathering* dan *architecture design*, *preprocessing* beberapa dataset, serta migrasi visualisasi/*dashboard* ke *production.*

f. *FRS*

Kajian dan Perancangan FRS 2020 yang mencakup pengembangan Modul *Statistical Business Register* (SBR) dengan berfokus pada pengembangan Modul *Profiling* serta

Modul *List View* dan *Update*, yang memungkinkan pengguna untuk mulai implementasi pengelolaan SBR.

g. *IDS*

Kajian dan perancangan IDS pada tahun 2020 mencakup pengembangan *website* diseminasi yang sejalan dengan MMS.

h. *MMS*

Kegiatan kajian dan perancangan MMS pada tahun 2020 mencakup :

1. Pengembangan data model, yang terus menerus disesuaikan dengan kebutuhan *Subject Matter,*
2. Pengembangan *service* untuk mendukung implementasi SDI,

i. *Indonesia Data Hub (INDAH)*

INDAH merupakan salah satu inovasi TI yang mendukung Transformasi Digital. Adapun kajian dan perancangan pada tahun 2020 mencakup :

1. *Requirement gathering* dan *architecture design*
2. Membangun tabulasi dinamis
3. Menyediakan *environment* dan *case* awal *sandboxing*
4. Menyediakan *environment* dan *case* awal visualisasi
5. Menyiapkan data dan register metadata ke mms untuk data *catalog*

j. *LMS*

Kajian dan perancangan tahun 2020 mencakup Implementasi fitur:

1. *Student Reporting* untuk memudahkan monitoring progress pembelajaran peserta dan hasil evaluasi pembelajaran
2. Integrasi *elearning* dengan *zoom meeting* yang memberikan kemudahan penjadwalan *virtual* class dari *e-learning* yang terintegrasi dengan akun *zoom meeting*
3. Presensi otomatis

k. Jumlah kajian terkait teknologi baru terkait transformasi sistem informasi statistik dan manajemen (Jumlah: 3, kajian untuk sistem *Support* dan/atau *Management*: HaloSIS, DEA, OMS)

1. HaloSIS

   Pada tahun 2020, kajian dan pengembangan HaloSIS masih berfokus pada pengembangan HaloSIS ke sistem yang baru. Salah satu fokus penting yang dilakukan pada tahun 2020 ini adalah sistem *security*. Selain hal tersebut juga dilakukan kajian

dan perancangan *system*, mengambil peran dalam kegiatan mendukung pelaksanaan SP2020 yaitu *Call Center.*

2. DEA

   Kegiatan Kajian dan perancangan DEA pada tahun 2020 berfokus pada:

   1. Perluasan metamodel untuk penyelarasan Arsitektur Bisnis terhadap arsitektur Visi. Hal tersebut sejalan dengan disahkannya Rencana Strategis BPS 2019-2024.
   2. Kajian juga dilakukan untuk mengembangkan arsitektur bisnis untuk dapat memperlihatkan peta bisnis BPS secara generik, terutama terkait kegiatan Sensus dan Survei.
   3. Dalam upaya pengembangan pelaksanaan kegiatan secara *Agile*, dilakukan kajian terkait peran DEA dalam mendorong terlaksananya manajemen proyek secara *Agile*.

3. OMS

   1. Pada tahun 2020 kajian dan perancangan OMS berfokus pada Pengembangan Fitur OMS untuk dapat memfasilitasi dokumentasi dan *monitoring* dari setiap projek yang dikerjakan secara berkelompok/Tim maupun individu.
   2. Kajian dan perancangan juga dilakukan pada OMS untuk mendukung sistem kerja secara *agile*.

Tabel 18. Tingkat Pencapaian Terwujudnya Transformasi Digital Untuk Membangun BPS Yang Smart Dan Agile Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
3	Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka transformasi digital	Jumlah inovasi TI yang mendukung Transformasi Digital	10	10	100

3. 2 Perkembangan Capaian Kinerja Deputi Bidang Bidang MIS Tahun 2020 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2019

Perkembangan capaian kinerja Deputi Bidang MIS 2020 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Perkembangan Capaian Kinerja Deputi Bidang MIS Tahun 2020 terhadap Realisasi Kinerja 2019

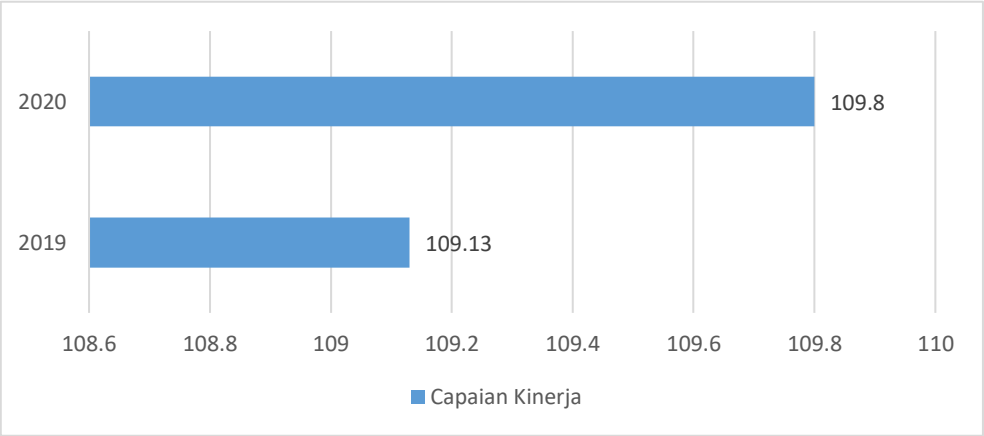

Berdasarkan gambar di atas, secara umum capaian kinerja Deputi Bidang MIS sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 sebesar 0,67 persen. Nilai realisasi sebesar 109,8 persen pada tahun 2020 ini menandakan bahwa Deputi Bidang MIS mampu melaksanakan setiap program, kegiatan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dengan baik.

3. 3 Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Renstra 2020-2024

Tabel 19. Capaian Kinerja Tahun 2020 terhadap Target Renstra 2020 - 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang handal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas					
4.1. Tersedianya dukungan Metodologi Sensus dan survei yang tepat guna	Persentase koordinasi penyelenggaran kegiatan statitsik terkait metodologi yang direalisasikan (%)	Persen	100	134,69	131,24
4.2. Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang	Indeks Kepuasan Layanan TI	Poin	75	75	100

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
handal dan Transformasi Digital untuk membangun Smart BPS					
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik					
5.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah Sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	Instansi	14	10	71,43
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN)					
6.1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I	Aktivitas	3	4	133,33
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	80	90,41	113,01
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS					**109,80**

3. 4 Kegiatan Prioritas 2020

Kegiatan prioritan Deputi Bidang MIS dirinci dalam kegiatan priotitas untuk masing-masing direktorat.

1. Kegiatan prioritas Direktorat PMSS pada tahun 2020 diantaranya adalah:
   a. Pembentukan Blok Sensus 2020,
   b. Capacity Building Bidang Metodologi Sensus dan Survei,
   c. Penyusunan Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan 2020,
   d. Penyusunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020,
   e. Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data Statistik dalam Satu Data Indonesia, dan
   f. Post Enumeration Survey (PES) - SP2020.

2. Kegiatan prioritas Direktorat Diseminasi Statistik pada tahun 2020 diantaranya adalah:
   a. Pembinaan Statistik Sektoral kepada K/L/I/D,
   b. Penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan SDI, antara lain: Peraturan BPS tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, Keputusan Kepala BPS tentang Tim Pelaksana dan Walidata pada BPS,
   c. Percepatan rilis publikasi Statistik Indonesia 2020 dan Daerah Dalam Angka 2020,
   d. Interoperabilitas data antara SIMDASI dan sistem yang ada di K/L dan interoperabilitas antara SIMDASI dengan sistem pengolahan data yang tersedia di BPS,
   e. Pengembangan sistem antara lain penambahan berbagai fitur/fungsi di SIMDASI, SIMBRS, Portal Publikasi, dan SIMOTIK,
   f. Pengembangan Website Sensus Penduduk 2020 sebagai dasar wesbite Sensus antar tahun serta Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi,
   g. Pengembangan Search Engine Website BPS yang handal dengan menggunakan ElasticSearch,
   h. Pengembangan sistem layanan data dan informasi statistik yang meliputi penambahan fitur/fungsi pada SILASTIK, TRANSDATA,
   i. Pengembangan TRANSDATA-CLOUD untuk manajemen pengiriman data kepada pengguna data layanan maupun pengguna data pada Perjanjian Kerjasama BPS dengan Kementerian/Lembaga,
   j. Pengembangan SILASTIK Backend untuk mengakomodir layanan data dan informasi di BPS Provinsi,
   k. Penyusunan kajian data mikro untuk diseminasi,
   l. Penyusunan draft reviu PP PNBP terhadap UU PNBP nomor 9 tahun 2018,
   m. Pengembangan Website pst.bps.go.id meliputi penambahan fitur dan proses bisnis lebih luas lagi hingga bisa diimplementasikan pada unit PST Provinsi dan Kabupaten/Kota,
   n. Mendorong munculnya inovasi-inovasi baru maupun replikasi untuk mendukung optimalisasi kinerja BPS melalui sinergi program kerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas,
   o. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan karya cetak dan karya rekam di BPS dengan Perpusakaan Nasional sebagai upaya memperkaya dan memperluas jangkauan aksesibilitas masyarakat terhadap karya anak bangsa Indonesia.
3. Kegiatan prioritas Direktorat SIS pada tahun 2020 diantaranya adalah:
   a. Penyediaan platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan SDI. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan strategi Direktorat SIS, yaitu:

Tersedianya platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan SDI. Arah kebijakan dan strategi ini akan mendukung terintegrasinya sistem layanan TI yang handal untuk penyelenggaraan kegiatan statistik Nasional dan meningkatkan peran SIST dalam mendukung SSN.

b. Peningkatan kualitas layanan TI dengan dukungan Tata Kelola TI, sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan strategi Direktorat SIS, sebagai berikut:
    1. Meningkatnya kualitas layanan TI untuk aspek aksesibilitas, kemudahan dan kecepatan pelayanan dengan dukungan Tata Kelola TI.
    2. Tersedianya pengelolaan layanan TI yang handal dengan dukungan sistem terintegrasi dan jaringan komunikasi yang handal.

    Arah kebijakan dan strategi ini akan mendukung peningkatan kualitas Layanan TI yang berorientasi kepada pengguna.

c. Perwujudan keselarasan Strategi Bisnis dan TI dalam kerangka transformasi digital. Arah kebijakan ini diselaraskan dengan strategi Direktorat SIS, sebagai berikut:
    1. Terwujudnya keselarasan Strategi TI dan Bisnis dengan DEA
    2. Terwujudnya Tata Kelola TI yang terstandardisasi, terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi kepada pengguna
    3. Terwujudnya transformasi digital untuk membangun BPS yang Smart dan Agile

    Arah kebijakan dan strategi ini akan mendukung terwujudnya Transformasi Digital yang mendukung keselarasan Strategi TI dan Bisnis dalam kerangka SSN.

3. 5 Upaya Efisiensi

3.5.1. Upaya Efisiensi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Tahun 2020

Upaya efisiensi yang dilakukan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selama tahun 2020 adalah:

1. Dalam rangka mendukung program pemerintah menangani pandemi COVID19, maka dilakukan penghematan pada beberapa pos anggaran antara lain pelaksanaan pelatihan dan workshop secara online. Penyampaian materi melalui video conference sehingga mengurangi biaya akomodasi untuk peserta pelatihan dan workshop.
2. Kegiatan pembentukan BS2020 dilakukan secara integrasi antara kegiatan Sub-direktorat Pengembangan Kerangka Sampel dan Sub-direktorat Pengembangan Pemetaan Statistik tahun

2020. Kegiatan ini dikoordinir oleh 2 unit kerja sehingga efektif dalam pelaksanaan pelatihan, pengolahan, dan monitoringnya sehingga waktu dan biaya menjadi lebih efisien.

3. Pelaksanaan pelatihan BS2020 juga terintegrasi dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidang Metodologi Sensus dan Survei yang mengundang peserta dari BPS Provinsi. Dengan kegiatan ini banyak output yang bisa dihasilkan yaitu sharing knowledge terkait metodologi sensus dan survei mulai dari perancangan metode, penyusunan klasifikasi, penyusunan standarisasi, penyusunan kerangka sampel, dan pengembangan peta statistik.
4. Pengembangan aplikasi wilkerstat berbasis android, aplikasi Clustering BS2020, aplikasi SP2020-IDSLS, sistem layanan Geoportal API, aplikasi Dashboard WebGIS administrator menggunakan software tidak berbayar (open source). Developer aplikasi tersebut berasal dari Direktorat PMSS. Hal ini meniadakan biaya pengadaan software.
5. Pengembangan Frame Register System (FRS) Modul SBR melanjutkan source code pihak ketiga yang belum terselesaikan pada tahun 2019. Pengembangan dilakukan secara inhouse kolaborasi pengembang (developer) dari Direktorat PMSS dan SIS. Demikian pula pengembangan Sistem Pembakuan Statistik (Sibaku) Online dan Mobile untuk pencarian dan ujicoba pengusulan standar data/ klasifikasi statistik yang juga dikembangkan inhouse oleh developer Direktorat PMSS.
6. Pengalihan layanan konsultasi klasifikasi statistik berbasis web (online) yang sebelumnya dikelola secara terpisah di Direktorat PMSS melalui sistem SPK Online, menjadi diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) yang dikelola bersama antara Direktorat PMSS dan Direktorat Diseminasi Statistik sehingga lebih efisien dalam komunikasi dan mudah diakses oleh pengguna secara satu pintu.
7. Pelaksanaan pembahasan KBLI 2020 dan penyusuan uji coba Juknis Standar Data Statistik menggunakan media zoom sehingga dapat menghemat pengeluaran anggaran terkait pembiayaan rapat maupun FGD, menyikapi adanya Pandemi Covid 19 sehingga metode diskusi, harmonisasi data KBLI 2020 dan Standar Data merupakan perintis penggunaan teknologi informasi berbasis online sebelum Direktorat lain menggunakannya.
8. Dari sisi sumber daya energi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei berupaya menghemat energi listrik (misal: meminimalisasi lampu pada siang hari, tidak bekerja diluar jam kerja seorang diri di dalam ruang kantor), menghemat prasarana (misal meminimalisasi penggunaan kertas/paperless).

3.5.2. Upaya Efisiensi Direktorat Diseminasi Statistik Tahun 2020

Upaya efisiensi yang dilakukan Direktorat Diseminasi Statistik selama tahun 2020 di antaranya adalah penghematan sumber daya energi dan penganggaran. Dari sisi sumber daya energi, Direktorat Diseminasi Statistik berupaya untuk hemat energi listrik dan air. Dari sisi penganggaran, efisiensi pembiayaan kegiatan dilakukan sampai dengan 31,34 persen.

3.5.3. Upaya Efisiensi Direktorat Sistem Informasi Statistik Tahun 2020

Efisiensi penggunaan sumber daya terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Sistem Informasi Statistik, diantaranya:

1. Melakukan evaluasi kegiatan secara berkala.
2. Melakukan evaluasi capaian kinerja pegawai.
3. Melakukan monitoring dalam hal penggunaan anggaran.

3. 6 Prestasi

3.6.1. Prestasi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei pada tahun 2020

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei pada tahun 2020 diantaranya:

1. Telah dilakukan ujicoba penggunaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kerangka Sampel Area (KSA) yang terintegrasi dengan aplikasi web dan mobile KSA-Pro. KSA Pro merupakan reenginering KSA yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Pusat Statistik. Fungsi yang diujicobakan meliputi pengajuan usulan penggantian sampel, persetujuan usulan penggantian sampel, dan updating Master Area Sampling Frame. Aplikasi ini melibatkan peran dari BPS Kabupaten, BPS Provinsi, dan BPS Pusat dalam melakukan pengelolaan sampel segmen KSA.
2. Program alokasi dan penarikan sampel rumah tangga secara otomatis yang terintegrasi pada dashboard monitoring Survei Pertanian Terintegrasi 2020 (SITASI2020). Inovasi penggunaan program dalam bentuk script R yang tertanam pada aplikasi dashboard monitoring ini telah memangkas waktu pemrosesan alokasi pan penarikan sampel karena dapat dilakukan real time.
3. Penggunaan Sistem Pengelolaan Kerangka Sampel (iFrame) pada beberapa survei bidang produksi antara lain Survei Komoditas strategis Tebu dan Lada 2020 dan Survei Hortikiltura Potensi (SHOPI) 2020. Pengajuan survei dan progres persiapan survei mulai dari pengusunan desain sampai dengan pembuatan daftar sampel terdokumentasi dalam sistem sehingga dapat

menjadi rujukan informasi bagi pihak-pihak yang terlibat yaitu Subject Matter di BPS Pusat, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten.

4. Aplikasi Clustering BS2020 merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat khusus untuk memudahkan pengguna dalam melakukan clustering dan numbering BS dari SLS/non SLS sehingga menghasilkan peta Blok Sensus.
5. Aplikasi SP2020-IDSLS merupakan aplikasi yang mendukung pemutakhiran data SLS untuk kegiatan SP2020.
6. Aplikasi Wilkerstat sebagai output pengembangan teknologi Geographycal Information System (GIS) dinilai sebagai inovasi untuk mendapatkan peta yang akurat. Aplikasi Wilkerstat berbasis mobile telah dikembangkan untuk kegiatan survei pariwisata.
7. Penyempurnaan Geospatial System telah dilakukan seperti penerapan SSO, modifikasi modul rekap, dsb. Sistem sudah digunakan BPS kabupaten/kota, Provinsi, dan Pusat untuk kegiatan pembentukan Blok Sensus..
8. Geospatial API dan Aplikasi Dashboard WebGIS Administrator merupakan aplikasi berbasis web yang berkaitan dengan pengguna data.
9. Tindak lanjut dari Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPS dengan Kemenkeu untuk perolehan data wajib pajak sebagai sumber pemutakhiran data administratif SBR secara reguler; sudah secara bertahap mengirimkan data yang dibutuhkan oleh SBR serta inisiasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya sebagai bentuk kolaborasi data administratif.
10. Terbitnya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 mengenai KBLI dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Petunjuk Teknis Standar Data Statistik merupakan rujukan kode referensi dan standar data baik di internal BPS maupun di Kementerian dan lembaga lainnya bentuk wujud dari implementasi Prinsip Satu Data Indonesia khususnya prinsip pertama dan prinsip keempat.
11. Peluncuran dan sosialisasi secara live melalui media Zoom dan Youtube BPS terkait Peraturan Badan KBLI 2020 dan pengemasan ulang sistem pencarian klasifikasi statistik berbasis web dan mobile dengan nama baru Sistem Pembakuan Statistik (Sibaku) yang lebih ramah pengguna, dalam rangkaian Hari Statistik Nasional 2020.
12. Penyusunan draft awal Standar Data Statistik dan Petunjuk Teknis Penyiapan Statistik Ekonomi Terintegrasi berkolaborasi lintas unit kerja (Deputi Bidang MIS, subject matter, biro hukum/ kerja sama, bina program, dan neraca) sebagai langkah awal proses transisi integrasi statistik dari hulu ke hilir di lingkungan BPS sesuai dengan proses bisnis baru GSBPM dan SBFA.
13. Data SBR pasca Sensus Ekonomi 2016 mulai digunakan sebagai kerangka (frame) survei subject matter secara bertahap. Kegiatan updating direktori Pariwisata dan dilanjutkan Survei Statistik

Pariwisata tahun 2020 menggunakan data SBR hasil integrasi dengan subject matter Statistik Pariwisata yang hasil pencacahan lapangan dikembalikan ke SBR untuk input pemutakhiran data SBR. Data tersebut juga dipetakan dan dilengkapi dengan kode wilayah kerja statistik dan geocode (latitude dan longitude). Data SBR yang telah diperbarui dipersiapkan untuk kembali digunakan sebagai kerangka survei Statistik Pariwisata pada tahun 2021. Metode ini disebut pemutakhiran survey feedback yang akan berjalan secara reguler dan terus akan diperluas dengan survei survei lainnya di Subject matter.

14. Partisipasi aktif tim SBR dalam pembahasan indikator ekonomi digital di tingkat internasional sebagai delegasi BPS dalam Task Team Digitalization dan Globalization pada UN Committee Expert on Business and Trade Statistics.

3.6.2. Prestasi Direktorat Disemiasi Statistik pada tahun 2020

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Disemiasi Statistik pada tahun 2020 diantaranya:

1. Penetapan Keputusan Kepala BPS Nomor 182 Tahun 2020 tentang Walidata SDI pada BPS
2. Penetapan Keputusan Kepala BPS Nomor 183 Tahun 2020 tentang Tim Pelaksana SDI pada BPS
3. Penetapan Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik yang dijadikan pedoman bagi K/L/I/D dalam membuat/memutakhirkan metadata statistik sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Satu Data Indonesia.
4. Penyediaan web service pada aplikasi Sirusa sehingga metadata yang tersimpan pada SIRuSa dapat dibaca oleh beberapa aplikasi lainnya seperti Website BPS, Website KKP, dll.
5. Pengembangan aplikasi SKD Online dengan penambahan dan penyempurnaan beberapa fitur seperti penggunaan Single Sign On (SSO) dalam login aplikasi SKD, rencana tindak lanjut, dll.
6. Optimalisasi penggunaan aplikasi Romantik Online dalam pemrosesan rekomendasi kegiatan statistik baik pada satker BPS Pusat maupun BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
7. Mengupayakan percepatan rilis publikasi Statistik Indonesia 2020 dan Daerah Dalam Angka 2020 untuk penyediaan data dalam Musyarawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dan memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai profesi.
8. Melakukan inovasi dalam pengemasan publikasi antara lain pembuatan publikasi Statistik Indonesia dalam Infografis 2020. Infografis Statistik Indonesia 2020 ini dikemas sedemikian rupa guna memudahkan pengguna data untuk lebih memahami data yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia 2020.

9. Optimalisasi penggunaan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (SIMDASI) di lingkungan BPS baik level pusat maupun daerah untuk menyelesaikan masalah inkonsistensi data yang disajikan pada publikasi Statistik Indonesia (SI) untuk data level Nasional dan Daerah Dalam Angka (DDA) untuk data level regional/daerah.
10. Optimalisasi penggunaan dan implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Publikasi Statistik (SIMOTIK) untuk memudahkan monitoring dan evaluasi publikasi BPS sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik melalui publikasi BPS.
11. Optimalisasi penggunaan dan implementasi Sistem Informasi Manajemen BRS (SIMBRS) untuk memudahkan pegawai BPS dalam melakukan pengelolaan terhadap penyusunan naskah Berita Resmi Statistik.
12. Pengembangan/maintenance Sistem Portal Publikasi. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung proses penerbitan publikasi dan terintegrasi dengan wesite BPS melalui Web API BPS.
13. Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp. 0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Pihak Tertentu Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik sebagai acuan dan pedoman dalam pelayanan permintaan data melalui mekanisme Rp.0,00;
14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
15. Integrasi Layanan dalam Pelayanan Statistik Terpadu yang semula berada pada ruangan yang terpisah menjadi terintegrasi dalam satu ruangan sehingga menambah kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna layanan statistic BPS. Integrasi ini juga sebagai tindak lanjut dalam pemenuhan rekomendasi dari tim penilai Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) KemenPAN RB di tahun 2019;
16. Peremajaan dekorasi area Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang memberikan suasana baru pada area ruang PST sehingga menambah kenyamanan bagi pengunjung PST;
17. Optimalisasi layanan digital melalui portal satu pintu layanan pst.bps.go.id sebagai bentuk inovasi pelayanan statistik di masa pandemi. Hal ini merupakan bukti komitmen BPS kepada publik akan jaminan pelayanan meskipun dalam kondisi yang terbatas;
18. Optimalisasi kegiatan promosi statistik melalui media digital dalam bentuk kegiatan BPS Goes To Campus (GTC) Online yang membuktikan komitmen BPS untuk terus berupaya meningkatkan literasi statistik kepada publik, salah satunya akademisi;
19. Optimalisasi promosi statistik melalui media sosial BPS dalam bentuk infografis dan videografis;

20. Pengembangan Website sensus sebagai media diseminasi data sensus, baik Sensus Penduduk, Sensus Pertanian dan Sensus Ekonomi;
21. Pengembangan fitur Website dengan penambahan teknologi elastic search yang memudahkan pengguna data mencari data secara spesifik dalam cakupan wilayah yang lebih luas;
22. Pengembangan fitur Transdata untuk kebutuhan pemenuhan pertukaran data dengan Kementerian/Lembaga dari sisi bisnis proses dan penambahan fitur untuk layanan kuesioner Luar Negeri;
23. Pengembangan TRANSDATA-CLOUD untuk manajemen pengiriman data kepada pengguna data layanan maupun pengguna data pada Perjanjian Kerjasama BPS dengan Kementerian/Lembaga;
24. Pengembangan fitur SILASTIK dengan penambahan berbagai fitur untuk memudahkan pengguna data maupun operator layanan;
25. Implementasi SILASTIK backend untuk layanan data dan informasi di BPS Provinsi;
26. BPS aktif berpartisipasi pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) setiap tahunnya sejak KIPP tersebut diselenggarakan pada tahun 2014. Pada KIPP Tahun 2020, BPS kembali berhasil lolos seleksi dan masuk dalam TOP 99 melalui inovasi dengan judul “BIKIN ASIK: Jambi Terkini Dalam Aplikasi Statistik;
27. BPS mendapat kepercayaan dari KemenPANRB untuk membantu dalam penyelenggaraan Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. SHPRB diselenggarakan oleh KemenPANRB rutin setiap tahun sejak tahun 2015. Pada tahun 2015, SHPRB diselenggarakan KemenPANRB bekerjasama dengan BPS, tahun 2016-2017 SHPRB diselenggarakan KemenPANRB bekerjasama dengan Lembaga Survei, tahun 2018-2019 SHPRB kembali diselenggarakan KemenPABRB bekerjasama dengan BPS karena hasil penyelenggaraan survei oleh BPS dinilai lebih berkualitas. Namun di tahun 2020, BPS mengajak dan mendampingi KemenPANRB untuk bisa mandiri dalam penyelenggaraan statistik sektoralnya, hal ini sebagai bagian dari peranan BPS sebagai pembina data dalam Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia;
28. BPS kembali dievaluasi pada kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh KemenPANRB sejak tahun 2015. Pada tahun 2020 ini, sesuai surat rekomendasi dari KemenPANRB bahwa hasil penilaian BPS tidak ada catatan pelayanan yang perlu diperbaiki. Untuk pemberian penghargaan diagendakan pada Maret 2020 pelayanan publik. Semoga

hasilnya menggembirakan sebagaimana prestasi yang sudah diraih pada tahun 2019 dengan predikat “Sangat Baik”.

3.6.3. Prestasi Direktorat Sistem Informasi Statistik pada tahun 2020

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Sistem Informasi Statistik pada tahun 2020 diantaranya:

1. Tersedianya platform data hub yang atraktif, kolaboratif dan terpercaya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI). Untuk mendukung SDI, Direktorat SIS telah menyiapkan platform data hub sebagai tools untuk pertukaan data antar instansi. Tahun 2020, platform ini telah dimanfaatkan untuk mendukung pertukaran data eKTP untuk keperluan SP2020 dengan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri dan rencana pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial dengan Kementrian Sosial. Platform ini juga akan dimanfaatkan untuk memfasilitasi peningkatan pertukaran data ekspor impor yang telah dilakukan selama ini, rencana pertukaran data pajak dan juga pertukaran data ecommerce.
2. Pengembangan portal Indonesia Data Hub (INDAH) yang merupakan salah satu inovasi TI yang mendukung Transformasi Digital. Platform Indonesia Data Hub (INDAH) digunakan sebagai tool orkestrasi data dari berbagai sumber dengan mempertimbangkan metadata dan standar data yang ada sehingga integrasi data pun dapat lebih mudah dilakukan dan diharapkan dapat meminimalkan data silo
3. Penambahan koleksi data dalam sistem katalog data mikro. Koleksi dalam sistem Katalog data mikro menyimpan data sekaligus metadatanya dan diperoleh dari hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh BPS maupun kompilasi. Per Desember 2020, Sistem Katalog Data mikro memiliki 321 dataset dan 419 kutipan dimana metadatanya dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris (masih ada sebagian metadata yang belum diterjemahkan ke Bahasa Inggris). Jumlah tersebut akan terus bertambah sesuai data yang masuk ke dalam repositori data di Ditrektorat SIS.
4. Optimalisasi layanan personal VPN dalam mendukung pegawai yang berada di jaringan publik (internet) dapat mengakses perangkat TI, sistem, maupun data yang terdapat di jaringan Local Area Network (LAN) kantor secara aman. Pada tahun 2020, terdapat 59 permintaan Layanan Personal VPN yang dipenuhi sehingga Persentase Permintaan Akses data yang ditindaklanjuti sebesar 100%.
5. Selama tahun 2020, layanan jaringan komunikasi data dengan berbagai jenis koneksi yang digunakan dapat beroperasi dengan baik untuk mendukung berbagai kegiatan di BPS dengan persentase uptime layanan sebesar 99%.

6. Selama tahun 2020, Direktorat SIS terus melakukan pembangunan sistem sebagai tindak lanjut dari pembangunan sistem yang telah dilakukan pada tahun 2019. Agar dapat membuat sistem yang lebih baik dalam menunjang proses bisnis utama, Direktorat SIS juga melakukan pengkajian dan dan perancangan sistem dan aplikasi infrastruktur statistik.
7. Implementasi presensi pegawai dengan menggunakan Kaizala di masa pandemic COVID-19. Dalam rangka mendukung mekanisme kerja working from home, Tim direktorat SIS telah membuat sistem presensi via kaizala yang bisa dilakukan oleh pegawai dari rumah masing masing dengan menggunakan sarana handphone.
8. Dukungan terhadap pelatihan secara daring melalui elearning di masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan Learning Management System (LMS). Direktorat SIS mengembangkan sistem e-learning yang disebut juga sebagai Learning Management System (LMS) dengan menggunakan moodle. Dengan LMS, pengelola bisa menautkan materi-materi pembelajaran, bisa menentukan alur pelatihan, bisa membuka forum, dan bisa mengadakan kuis/tugas serta presensi peserta yang pengelolaan nilainya sudah diatur oleh moodle.
9. Sosialisasi Digital Enterprise Architecture (DEA) dan penyusunan Video Penjelasan Peta Proses Bisnis BPS dalam DEA dan SOP Pegembangan Sistem
10. Pemanfaatan portal kolaborasi yang mendukung pengerjaan dokumen secara bersama-sama dan menyimpan serta berbagi pakai file kepada pegawai lainnya. Sampai saat ini, selain portal kolaborasi yang digunakan oleh unit-unit kerja, portal kolaborasi juga dimanfaatkan untuk kegiatan lintas unit kerja
11. Penggunaan CAPI dan CAWI pada Sensus Penduduk 2020. Salah satu inovasi SP2020 adalah penggunaan metode kombinasi dan penerapan mode pengumpulan data yang didukung dengan kemajuan teknologi. Yaitu menggunakan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dimana masyarakat disediakan layanan web untuk meng-update data kependudukannya secara online dan mandiri. Selain itu, pada SP2020 juga akan digunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), petugas akan menggunakan gadget khusus dalam melakukan pendataan SP2020. Dengan CAWI dan CAPI, waktu pendataan akan lebih singkat dalam mengolah data hasil sensus.
12. Perluasan Penggunaan CAPI dalam Beberapa Survei. Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) merupakan metode pengumpulan data yang dikembangkan oleh BPS untuk mengefisienkan pengumpulan data, sehingga saat ini pengumpulan data tidak hanya dilakukan menggunakan kertas, namun juga menggunakan gadget. Dengan menggunakan CAPI maka akan mempercepat proses pengolahan survei, meningkatkan kualitas data hasil

pencacahan, memudahkan subject matter dalam pembuatan kuesioner dan mengelola data hasil pencacahan, dan lainnya.

13. Sistem Statistik Terintegrasi digunakan untuk mendukung SP2020. Untuk SP Online menggunakan modul CAWI yang ada pada *Integrated Collection System* (ICS).
14. Pemanfaatan ICS untuk dalam mendukung Daftar Penduduk Digital Sensus Penduduk 2020 (SP 2020).
15. Dashboard untuk monitoring SP2020. Dashboard berisi status progress kegiatan SP2020 dan dapat dilihat di semua layar monitor di ruangan-ruangan BPS yang request untuk menampilkan dashboard, terutamanya di ruang pimpinan dan ruang rapat. Dengan demikian, pimpinan akan selalu mendapatkan progress terkini dari kegiatan SP2020, dan bisa cepat melakukan pengambilan keputusan.
16. Penggunaan Barcode pada Manajemen Petugas dan Pengelolaan Dokumen Sensus Penduduk 2020. Pemanfaatan teknologi pada SP2020 selain menggunakan CAPI dan CAWI juga menggunakan barcode untuk manajemen mitra sebagai petugas SP2020. Direktorat SIS telah mengembangkan sistem manajemen mitra petugas (SIMITRA) secara online yang bisa digunakan sebagai identifikasi penggunaan perangkat (device) mitra yang mendukung CAPI. Barcode petugas diciptakan untuk memudahkan responden dalam melakukan verifikasi terhadap data petugas sensus yang mendatangi tempat tinggalnya melalui website agar tercipta rasa aman dan nyaman dari kedua belah pihak baik petugas sensus maupun responden sehingga proses pemuktakhiran atau pendataan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
17. Pengembangan Digital Enterprise Architecture. Secara kelembagaan, pembenahan proses bisnis juga dapat dilakukan dengan adanya Digital Enterprise Architecture (DEA). DEA merupakan gambaran lengkap organisasi, yang dikategorikan menjadi beberapa arsitektur, dimana salah satunya ada arsitektur bisnis. Dengan adanya arsitektur bisnis, maka dapat dilihat keterkaitan antara proses bisnis dengan visi dan misi yang akan dicapai. Selain itu, dapat dilihat juga keterkaitan antara satu proses bisnis dengan proses bisnis lainnya. Hal ini tentunya akan sangat membantu ketika BPS akan melakukan pembenahan proses bisnis.
18. Pengembangan Sistem Menggunakan Metode Agile. Agile adalah metodologi pengembangan sistem yang mempunyai adaptabilitas tinggi terhadap perubahan yang terjadi. Beberapa sistem yang saat ini dikembangkan antara lain: Data Management System, Frame Register System, Geospatial System, Integrated Collection System, Integrated Dissemination System, Integrated Processing System, Macro Analysis System, Metadata Management System, Operational Management System, dan National Statistic Command Center.

19. Dengan adanya upaya implementasi Transformasi TI dan juga adanya beban kerja yang meningkat khususnya penyediaan dan layanan TI di BPS, Direktorat SIS berinisiatif untuk melakukan penghitungan kebutuhan pegawai. Penghitungan kebutuhan ini dilakukan khususnya untuk formasi jabatan fungsional Pranata Komputer (Prakom) di BPS dengan mempertimbangkan kemungkinan dihapuskannya beberapa jabatan struktural di BPS.
20. Pelopor Pemanfaatan Big Data Dengan Bekerja Sama dengan Kementerian dan Organisasi Internasional. Direktorat Sistem dan Informasi Statistik berperan sebagai pelopor dalam memanfaatkan Big Data untuk official statistics. Dalam memanfaatkan Big Data, BPS bekerja sama dengan unit lain di BPS dan juga dengan Kementerian lain seperti Kementerian Pariwisata, Bappenas, dan Kementerian Perhubungan.
21. BPS menggunakan Integrated Collection System (ICS) sebagai platform dalam mengumpulkan data. ICS akan menangani data masuk, baik yang berasal dari sensus/survey, maupun data administratif dan big data
22. Dalam rangka mendukung proses birokrasi di lingkungan internal BPS, telah digunakan suatu sistem yang disebut BackOffice. Pada tahun 2020, Direktorat SIS juga sedang membangun aplikasi Backoffice Selindo, yang nantinya akan digunakan oleh seluruh BPS Seluruh Indonesia. Pengelolaan, pengawasan, dan pemberdayaan pegawai memerlukan informasi kepegawaian yang lengkap, cepat dan akurat.
23. Pengembangan Sistem HaloSIS dan Sistem Informasi Permintaan Aplikasi (SIPA). Berbicara mengenai layanan TI, pelaksanaan Pusat Layanan TI (HaloSIS) tidak hanya dilakukan dengan memperbaiki proses layanan TI di BPS, namun juga dengan menyediakan tools berupa portal yang dapat diakses oleh semua pegawai baik di pusat maupun daerah yaitu pada http://halosis.bps.go.id. Dengan adanya portal ini, layanan TI menjadi customer based. Jika sebelumnya pengguna TI harus mengetahui kemana ia harus melaporkan permasalahan TI-nya, sekarang pengguna TI cukup melaporkan melalui HaloSIS saja. Pengguna layanan TI juga dipermudah untuk melakukan pelaporan atau permintaan TI ke Direktorat SIS secara mandiri, yaitu dengan cara membuat tiket pada portal dan juga mengetahui status dari pelaporan tersebut.
24. Penyediaan Dokumen Katalog Layanan TI dan Service Level Agreement (SLA) Layanan TI. Direktorat SIS telah menerbitkan Katalog Layanan TI, yang berisikan informasi dari 60 layanan TI yang disediakan. Selain itu, telah disusun juga SLA dari setiap layanan yang tersedia. SLA ini berisi tingkat layanan yang menjadi komitmen dari Direktorat SIS sebagai penyedia layanan yang baik. Baik Katalog Layanan TI maupun SLA dapat diakses oleh semua pegawai BPS pada portal HaloSIS.

25. Survei Kepuasan Layanan TI. Untuk mengukur akuntabilitas terhadap layanan TI, dilakukan Survei Kepuasan Layanan TI dengan responden seluruh pegawai BPS, baik pusat maupun daerah. Nilai persentase pemenuhan layanan TI sesuai SLA sebesar 90% dari total pelayanan yang telah diberikan sepanjang tahun 2020 diperoleh dari capaian yang terukur dari hasil Survei kepuasan layanan TI berikut riwayat pencatatan tiket yang masuk melalui Pusat Layanan TI HaloSIS. Survei tahun 2020 menunjukkan bahwa terjadi kenaikan tingkat kepuasan pada 2019-2020 untuk domain layanan, petugas, dan informasi.
26. Direktorat SIS mengembangkan sebuah Operational Management System (OMS) yang mampu mengolaborasikan tugas dan pekerjaan antar unit kerja di BPS. Sistem ini digunakan sebagai sarana untuk mengelola sebuah proyek/kegiatan yang diassign kepada pegawai di unit kerja BPS, serta mampu memperlihatkan status dan progress penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya modul ini, para stakeholder dalam sebuah kegiatan dapat bersama-sama memantau capaian dari kegiatan tersebut. Melalui sistem ini, para stakeholder yang terlibat dapat mendapatkan informasi dalam menentukan langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan capaian suatu kegiatan.
27. Direktorat SIS melaksanakan kegiatan manajemen risiko TI pada penyelenggaraan pengolahan SP2020 yang melibatkan 4 area risiko TI, yaitu aplikasi, proses pengadaan, infrastruktur aplikasi, dan serangan keamanan. Risiko yang telah diidentifikasi meliputi risiko aplikasi SP2020 Online (SPO) tidak tersedia tepat waktu, proses pengadaan hardware gagal atau terlambat, infrastruktur aplikasi SPO tidak bisa digunakan, dan serangan keamanan pada server aplikasi SPO.
28. Direktorat SIS melakukan kajian atas 10 Sistem Infomasi/Aplikasi yang mendukung transformasi proses bisnis pada implementasi Transformasi Digital, yaitu sebanyak 10 kajian untuk sistem Core dan Enable: ICS, IPAS, MAS, IDS, FRS, GS, DMS, MMS, INDAH, LMS.
29. Implementasi ICS telah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan SPOnline menggunakan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), Post Enumeration Survey SP2020, Penjaminan Kualitas (PK) SP2020, Survei Dampak Covid 19, Konfirmasi Pendataan SP2020, KPPT, Passenger Exit Survey 2020, Pendataan Wilayah Khusus SP2020, Penggunaan KMS dalam mendukung SP2020, SITASI 2020 (Ekonomi, KOR, MPA, Pemutakhiran), Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi Barang (SKTNPB), Survei Khusus Triwulanan Necara Produksi Jasa (SKTNPJ), Survei Ubinan Padi 2020, Survei VHTL 2020, Survei Wisatawan Nasional 2020, Survei Wisatawan Nusantara 2020, Updating Direktori PIPA 2020, Updating Podes 2020, Verifikasi Sentra Industri 2020, serta VREST20_UMK.

30. Pengembangan IPAS yang mencakup pengembangan Modul yaitu data integration, derivation system, tabulation system, analysis method, data visualization, versioning management, user access management, data access management, project access management, dan internal data management.
31. Macro Analysis System (MAS) mulai digunakan oleh subject matter untuk mendukung analisis data makro
32. Implementasi Modul Macro Data Management untuk mendukung penyediaan data makro sebagai data dasar penyusunan neraca dari level nasional dan regional yang dilakukan oleh satuan kerja di BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota.
33. Implementasi Modul Dashboard Data dan Indikator Makro telah diimplementasikan untuk membantu dalam memonitor keadaan data dan fenomena makro level nasional dan regional.
34. Pengembangan Modul SUT dan FSA untuk membantu proses penyusunan SUT dan FSA.
35. Pemanfaatan Big Data dari Laporan Perusahaan yang tergabung dalam Bursa Saham IDX.
36. Pengembangan Geospatial System, mencakup Dukungan terhadap kegiatan pembentukan Blok Sensus 2020, Dukugan pada kegiatan updating peta jika dibutuhkan, dan Pengembangan service yang diguanakan pada SITASI
37. Pemanfaatan DMS dalam mendukung implementasi Web SP2020 melalui pengembangan rancangan data warehouse/data mart, melakukan ETL, menyiapkan API untuk akses data warehouse, maintain data dan maintain API,
38. Mendukung Implementasi big data yang mencakup migrasi data dari big query ke hadoop, requirement gathering dan architecture design, preprocessing beberapa dataset, serta migrasi visualisasi/dashboard ke production.
39. Pengembangan Modul Statistical Business Register (SBR) dengan berfokus pada pengembangan Modul Profiling serta Modul List View dan Update, yang memungkinkan pengguna untuk mulai implementasi pengelolaan SBR.
40. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Frame Register System (FRS) pada Modul Statistical Business Register/SBR (profiling dan logic data entry) untuk mendukung pelaksanaan survei EWS dan survei COVID; Metadata Management System (MMS) yang mengakomodir Information Model versi 2 dan menyediakan informasi KBLI, KBJI, dan KBKI; dan Data Management System (DMS) yang terintegrasi dengan MMS, INDAH, dan Website Sensus Penduduk 2020
41. Pengembangan MMS yang mencakup pengembangan data model, yang terus menerus disesuaikan dengan kebutuhan Subject Matter, serta Pengembangan service untuk mendukung implementasi SDI.

42. Pemanfaatan Kaizala (salah satu implementasi Operational Management System/OMS) sebagai media komunikasi resmi BPS, pembuatan group unit kerja dan group kegiatan BPS di Triwulan I. Kaizala juga menjadi media presensi pegawai BPS di masa pandemic Covid-19 baik secara Work from Office (WFO) maupun Work from Office (WFH). Implementasi OMS lainnya dalam mendukung manajemen kegiatan/pekerjaan.
43. Pengembangan Dashboard System dalam mendukung pimpinan dalam memantau lokasi dan kinerja pegawai selama WFH
44. Pemanfaatan dan sosialisasi DEA untuk mendukung penilaian RB BPS dan penggambaran Renstra BPS 2020-2024 di Triwulan III
45. Konsenstrasi kebijakan dan strategi TI berbasis EA yang selaras dengan Visi Misi BPS
46. Penyusunan beberapa naskah Tata Kelola dan Tata Laksana TI, yaitu tata kelola data, tata kelola DEA, dan tata kelola agile project management dengan dukungan SPBE.
47. Penyusunan Juknis Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan melakukan analisis beban kerja kegiatan Prakom untuk menghitung Total Formasi Pranata Komputer.
48. Implementasi ITSM menggunakan HaloBPS untuk manajemen masalah saat SP 2020, yaitu mencatat incident dan solusi permasalahan yang dilaporkan responden. Sedangkan pemanfaatan KMS sebagai knowledge base untuk fitur Question and Answer terkait SP2020.

3. 7 Realisasi Anggaran Tahun 2020

Dari pagu anggaran yang diberikan sebesar Rp 12.777.391.000,- Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menyerap sebesar Rp 9.713.422.466,- atau sebesar 76,02% dari total pagu yang ada. Dengan penyerapan anggaran sebesar tersebut, kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun 2020 mencapai 109.80%.

Tabel 20. Realisasi Penggunaan Anggaran
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Tahun Anggaran 2020

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah)		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik				
	Direktorat PMSS			
2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	1.488.044.000	1.435.713.925	96,48
2905	Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	412.503.000	358.507.446	86,91
2897	Sistem Pendukung Layanan untuk Diseminasi Data dan Informasi Statistik	216.310.000	174.227.000	80,54
2897	**Direktorat Diseminasi Statistik**			
	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	1.135.693.000	846.641.320	74,55
2901	**Direktorat SIS**			
	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	9.524.841.000	6.898.332.775	72,05
Jumlah Anggaran		**12.777.391.000**	**9.713.422.466**	**76,02**

BAB IV
PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Pelaporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik merupakan perwujudan kewajiban Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran. Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan juga merupakan penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024.

Pencapaian Visi Deputi Bidang MIS yaitu "Penyedia Metodologi dan Informasi Statistik berkualitas untuk Mendukung Indonesia Maju" untuk mendukung visi BPS "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju", dicerminkan dari keberhasilannya mengembangkan metodologi dan sistem yang andal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualitas, membina K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik, meningkatkan layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional, dan membangun SDM yang kompeten untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik menunjukkan keberhasilan dari tahun sebelumnya. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 109,80 persen selama tahun 2020.

Tingkat pencapaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik sudah sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta agar mampu memenuhi misi BPS.

4.2. Tindak Lanjut

Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, di antaranya adalah:

Permasalahan dan Kendala Utama

1. **Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei**
   a. Tuntutan kualitas dan keragaman data dari pemerintah dan pemangku kepentingan kepada BPS menyebabkan peningkatan beban kerja Direktorat PMSS sangat tinggi, sehingga tidak seimbang dengan jumlah SDM yang ada.
   b. Peningkatan kapasitas SDM di bidang metodologi sensus dan survei belum dapat dilakukan secara rutin.
   c. Permasalahan teknis yang ditemui adalah belum optimalnya implementasi tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM).

2. **Direktorat Diseminasi Statistik**
   a. Masih minimnya tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah secara mandiri melaporkan rancangan maupun hasil survei statistik sektoral. Begitupula instansi swasta/masyarakat masih belum proaktif untuk menyerahkan sinopsis kegiatan statistiknya secara mandiri ke BPS.
   b. Tidak adanya anggaran pelatihan petugas Survei Kebutuhan Data dari BPS Pusat ke seluruh BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota.
   c. Masih minimnya pemahaman di internal maupun eksternal BPS perihal metadata statistik.
   d. Masih minimnya sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dalam mengemas publikasi menjadi output yang menarik (seperti infografis maupun videografis).
   e. Tidak adanya anggaran pelatihan desain perwajahan untuk BPS Kabupaten/Kota.
   f. Masih minimnya koleksi aset desain (berupa gambar, foto, font, template presentasi, template website, aset 3D, video template, audio, dan lainnya) dan software yang legal yang dimiliki BPS untuk mendukung pembuatan desain publikasi.
   g. PC untuk pembuatan desain perwajahan serta visual masih belum memadai.
   h. Belum adanya kebijakan diseminasi publikasi yang lengkap dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
   i. Belum optimalnya integrasi antar sistem pendukung penyediaan dan layanan informasi kepada publik.
   j. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah petugas pelayanan dengan jumlah transaksi permintaan pelayanan yang masuk sehingga berimpilikasi pada beban kerja yang tinggi dan kecepatan penyelesaian pelayanan.

k. Belum adanya implementasi penggunaan teknologi dalam penandatangan LADU sehingga masih dilakukan secara konvensional yang memerlukan waktu lebih lama.
l. Meningkatnya pelayanan data melalui surat yang menyebabkan proses penyiapan datanya memerlukan prosedur birokrasi yang cukup panjang.
m. Belum optimalnya pengelolaan koleksi pustaka pada Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.
n. Aplikasi perpustakaan masih secara offline di setiap Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga untuk mencari pustaka antar daerah menjadi sulit.
o. Masih banyaknya pustaka yang tidak tersedia dalam format softcopy sehingga pengguna data masih kesulitan menemukan series data pada layanan pustaka digital.

3. Direktorat Sistem Informasi Statistik

a. Tata Kelola Teknologi Informasi dilingkungan BPS dalam pemanfaatan SDM dan perangkat keras yang terdapat di BPS belum optimal.
b. Tingkat pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia TIK dalam hal database, perangkat lunak, perangkat keras, serta pengetahuan umum lainnya yang berkaitan dengan TIK masih tidak merata.
c. Permintaan layanan TI berbagai kegiatan sensus dan survei yang tidak terkoordinir dengan baik menyebabkan penumpukan beban kerja di satu waktu sehingga dapat mengurangi kualitas layanan TI.
d. Kegiatan pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan banyak waktu dalam pembahasan dan persetujuan untuk KAK dan dokumen pendukung lainnya, sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan semakin berkurang dan akhirnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai rencana.

Tindak Lanjut

1. Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

a. Pengayaan SDM terus dilakukan, bisa dengan memanfaatkan media belajar secara *online* atau pun mengikuti forum atau grup statistik di dalam negeri dan internasional.
b. Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait di internal BPS dan peningkatan manajemen/tata kelola kegiatan dalam pelaksanaan desain sensus dan survei serta pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi, agar keseimbangan antara beban tugas, waktu, dan sumber daya yang tersedia tetap terjaga, dan tujuan tercapai.

c. Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal sangat dibutuhkan terutama teknologi *Geographical Information System* (GIS) untuk kegiatan pengembangan kerangka sampel, *updating*, dan pengumpulan data kegiatan sensus dan survei. Pengembangan sistem aplikasi berbasis GIS juga perlu ditingkatkan untuk memudahkan proses pengerjaan peta digital agar lebih efisien, akurat, dan tepat guna.
d. Integrasi antar-sistem perlu dilakukan sehingga semua pekerjaan tidak lagi dilakukan secara manual dan konsisten, seperti manajemen data SBR, kerangka sampel, peta wilkerstat, dan lain-lain. Sistem yang terus dikembangkan adalah *Geospatial System* dan yang harus dibuat adalah *Frame Register System*.
e. Penerapan tahapan dan proses GSBPM harus dipatuhi dan dikembangkan sesuai dengan teknologi terakhir.
f. Peningkatan pelayanan publik satu pintu di bidang metodologi statistik seperti konsultasi desain survei, *Geospatial System*, dan klasifikasi statistik berdasarkan standardisasi manajemen yang modern.

2. Direktorat Diseminasi Statistik

a. Meningkatkan pemahaman K/L/OPD penyelenggara survei statistik sektoral akan kewajiban memberitahukan rencana dan hasil survei.
b. Menyusun petunjuk teknis penyusunan metadata statistik.
c. Membentuk tim pelaksana Satu Data Indonesia di BPS dan menetapkan unit kerja yang menjadi walidata Satu Data Indonesia di BPS.
d. Melakukan inovasi dalam pengemasan publikasi dan informasi statistik yang ada.
e. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ada terutama untuk meningkatkan kemampuan dalam mengemas publikasi menjadi output yang menarik seperti infografis maupun videografis
f. Melakukan pengadaan untuk koleksi aset desain dan PC untuk desain grafis.
g. Menyusun kebijakan diseminasi publikasi yang lengkap dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
h. Melakukan penguatan user engagement melalui pengelolaan data konsumen untuk menghasilkan analisis perilaku pengguna data sehingga diperoleh kebijakan diseminasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna data.
i. Mengembangkan variasi kegiatan promosi sehingga dapat menyentuh seluruh segmen masyarakat.

j. Melakukan peningkatan Kemampuan dan keterampilan SDM melalui kusus dan pelatihan, khususnya dalam bidang marketing dan public service untuk mendukung pelayanan yang lebih berorientasi pada pelanggan.
k. Melakukan pengembangan SILASTIK secara berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data yang terus berkembang.
l. Melakukan penguatan sistem pencarian konten statistik seluruh indonesia.
m. Melakukan penguatan manajemen tabel statistik dari subject matter.
n. Melakukan peningkatan fitur aplikasi Allstats.
o. Melaksanakan Pembinaan Pelayanan Statistik Terpadu (PST) pada BPS Provinsi dengan peserta seluruh Pengelola PST BPS Kabupaten/Kota.
p. Membangun aplikasi secara terpusat yaitu PST Online yaitu setiap Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengakses koleksi pustaka dari wilayah lainnya.
q. Melakukan proses alih media pustaka tercetak dalam format softcopy secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan aktivitas layanan pustaka digital.
r. Harus dibuat sistem terintegrasi antara sistem pendukung penyediaan dan layanan informasi yang ada di Direktorat Diseminasi Statistik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik BPS.

3. Direktorat Sistem Informasi Statistik

a. Meningkatkan tata kelola dan tata laksana TI untuk mendukung kegiatan operasional statistik.
b. Untuk meningkatkan tingkat pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia di bidang TIK, secara bertahap mengikuti pelatihan-pelatihan.
c. Dalam rangka untuk menyederhanakan permintaan dukungan layanan TI sehingga terkoordinir dengan baik, telah membangun sistem manajemen layanan TI yaitu HaloSIS. Hingga, di tahun 2019 sistem manajemen telah berjalan (HaloSIS) dan menjadi layanan TI yang handal untuk mendukung proses bisnis di BPS. Setiap permintaan dukungan diberikan sebuah nomor tiket yang dapat digunakan untuk melacak kemajuan dan tanggapan secara online.
d. Kegiatan pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir membutuhkan integrasi yang baik antar sistem dan pemantauan secara ketat. Ketika ada sistem tertentu yang mengalami kendala, maka akan berpengaruh ke sistem yang lain. Selain itu karena pelaksana pengembangan ini adalah konsultan yang merupakan pihak diluar BPS, performa dari konsultan itu sendiri tidak bisa sepenuhnya diandalkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK
Peraturan Kepala BPS No. 007 Tahun 2008, Tanggal 15 Februari 2008

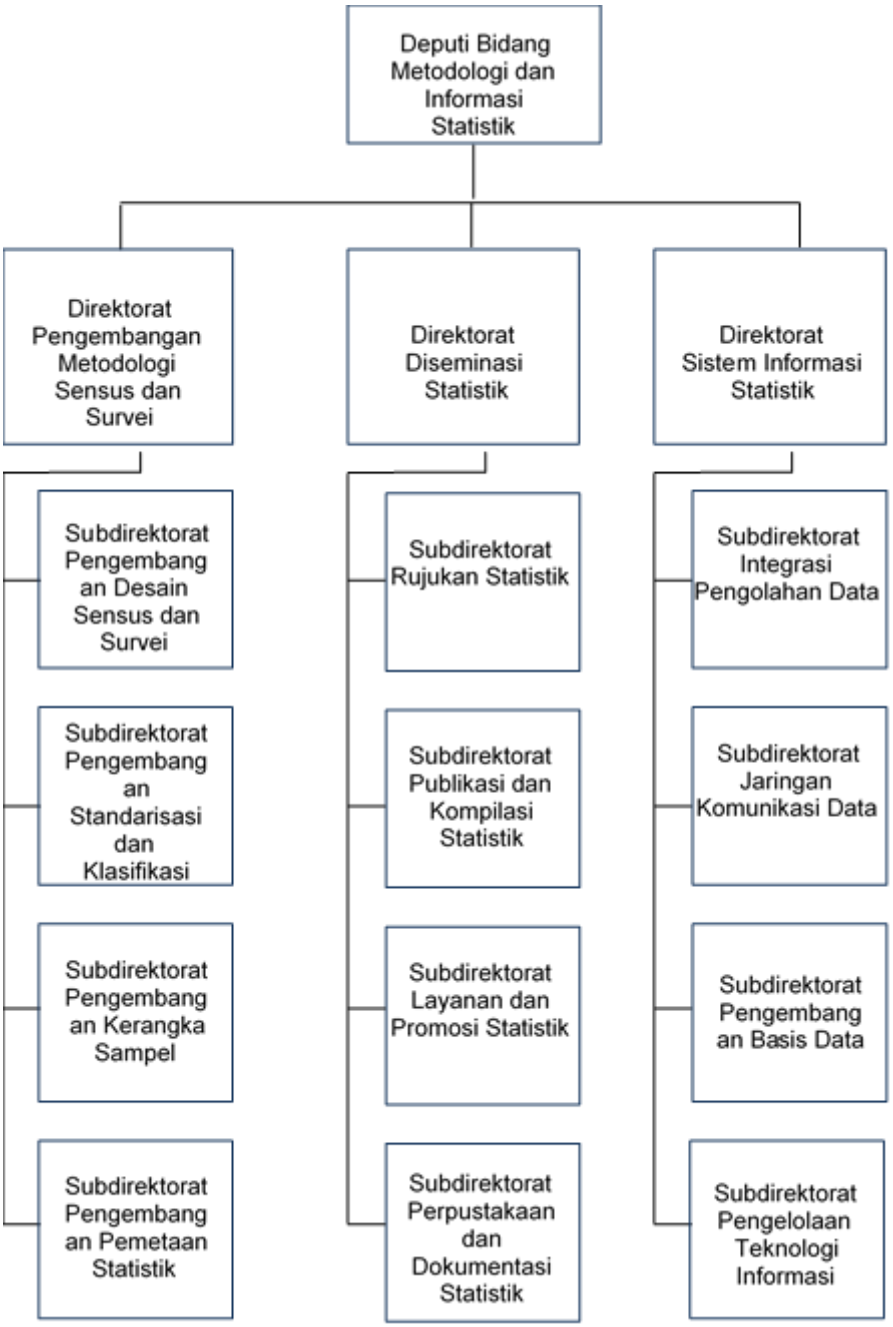

Lampiran 2

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK TAHUN 2019

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output
(1)	(2)	(3)	(4)			
1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang handal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualita 1.1. Tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna 1.2. Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal dan transformasi digital untuk membangun Smart BPS	Persentase koordinasi penyelenggaran kegiatan statitsik terkait metodologi yang direalisasikan (%)	Persen	100	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Publikasi/ Dokumen/ Laporan Koordinasi terkait Metodologi dan Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei
	Indeks Kepuasan Layanan TI	Poin	75	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	Dokumen/ Laporan Koordinasi terkait Pengembangan Sistem Informasi Statistik
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik 2.2. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah Sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	Instansi	14	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	Publikasi/ Dokumen/ Laporan koordinasi terkait Diseminasi Statistik
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I	Aktivitas	3	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	Publikasi/ Dokumen/ Laporan koordinasi terkait Diseminasi Statistik
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) 3.2. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	80	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	Publikasi/ Dokumen/ Laporan koordinasi terkait Diseminasi Statistik

Lampiran 3

CAPAIAN KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG
METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK TAHUN 2020

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang handal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualita 1.1. Tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna	Persentase koordinasi penyelenggaran kegiatan statitsik terkait metodologi yang direalisasikan (%)	Persen	100	131,24	131,24	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Rp. 1.968.448.371
1.2. Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal dan transformasi digital untuk membangun Smart BPS	Indeks Kepuasan Layanan TI	Poin	75	75	100	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Rp 6.898.332.775
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik 2.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah Sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	Instansi	14	10	71,43	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Rp. 846.641.320
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I	Aktivitas	3	4	133,33	
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) 3.1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	80	90,41	113,01	

Lampiran 4

CAPAIAN KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG
METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK TAHUN 2020

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Tersedianya Metodologi dan Sistem yang handal dan terstandar untuk tersedianya statistik berkualita 1.1. Tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna	Persentase koordinasi penyelenggaran kegiatan statitsik terkait metodologi yang direalisasikan (%)	Persen	100	131,24
1.2. Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal dan transformasi digital untuk membangun Smart BPS	Indeks Kepuasan Layanan TI	Poin	75	75
2. Meningkatnya kolaborasi dengan K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik	Jumlah Sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	Instansi	14	10
2.1. Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dengan K/L/D/I dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I	Aktivitas	3	4
3. Meningkatnya kualitas layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) 3.1. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	Poin	80	90,41

Lampiran 5

TABEL IKU KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK TERKAIT METODOLOGI YANG DIREALISASIKAN (%)

Keterangan	IKU Turunan	Satuan	Target	Realisasi	Persentase IKU
1. Internal	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas (%)	Persen	100	100	100
	Jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Dokumen	47	59	125.53
	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi/ Laporan	5	6	120
	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persen	100	100	100
2. Eksternal	Jumlah pembinaan dan/atau kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Kegiatan	75	158	210,67
	1. Kerjasama penyusunan metodologi sampling survei sektoral (desain sampling, daftar sampel dan peta wilkerstat)		6	6	
	2. Layanan konsultasi klasifikasi statistik		98	98	
	3. Pelatihan klasifikasi statistik		47	47	
	4. Konsultasi dan kerjasama pemanfaatan peta		3	3	
	5. Konsultasi terkait metodologi survei		4	4	
Koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik terkait metodologi yang direalisasikan (%)					131,24

Lampiran 6

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK MENURUT INFO KERJA DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2020

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/ DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	1	-	-	-	-	-	-	**1**
2.	Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	**3**	**25**	**32**	**3**	**2**			**65**
3.	Direktorat Diseminasi Statistik	1	28	46	6	3			**84**
4.	Direktorat Sistem Informasi Statistik	4	54	91	1	8	-	-	**158**
Jumlah		**8**	**106**	**171**	**10**	**13**	**-**	**-**	**308**

Sensus Penduduk 2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Telp: 021 3841195, 3842508, 3810291 Fax: 021 3857046
Homepage: http://www.bps.go.id *Email*: bpshq@bps.go.id